



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

LAKIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang disusun tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kinerja terhadap anggaran di tahun 2023

KABUPATEN
DHARMASRAYA



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA INSPEKTORAT

Jl. Lintas Sumatera KM. 2 Pulau Punjung Telp. 0754-451440 Fax. 0754-451492
Website : <http://http.dharmasraya.go.id> Email : Irda_Dharmasraya@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk tahun anggaran 2023, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pulau Punjung, 20 Maret 2024

INSPEKTUR,


Drs. ANDY SUMANTO, CFA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681220 199009 1 001

IKHTISAR EKSKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya 2021-2026.

Keberhasilan/kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian 17 sasaran strategis dengan 33 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024.

Dari 33 indikator kinerja utama, sebanyak 17 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori memuaskan, sebanyak 11 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori sangat baik, 2 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori baik dan 1 indikator kinerja mencapai keberhasilan dengan kategori kurang baik.

Sasaran Strategis **“Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat”** yang diukur oleh indikator kinerja **Persentase Penerima Zakat** berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 210.6%. Akan tetapi, sasaran strategis **“Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat”** yang diukur oleh indikator kinerja **Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya** berhasil dengan capaian kinerja terendah sebesar 50%.

Rincian pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

Misi 1 : MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Untuk Pencapaian misi 1 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ditetapkan 1 tujuan yaitu “Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata Dan Berkualitas” Tujuan misi 1 memiliki sasaran yang diukur dengan 7 Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur secara Merata dan Berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio Kemantapan Jalan	60	58.16	96.93%
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	89,00	89.07	100,08%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	95%	92,50%	97.36%
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Rasio Pemukiman Layak Huni	43.03%	68%	157.99%
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	91.45%	84.31%	92.19%
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan sumber daya air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	76,37%	76,37%	100,00%
			Indikator Sasaran Persentase Pengendalian Daya Rusak Air			
Rata-rata Capaian Indikator Misi 1						107.4%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 7 indikator kinerja utama adalah 111.12% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Misi 2 : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk pencapaian misi 2 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ditetapkan 1 tujuan yaitu untuk “meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia” tujuan tersebut memiliki 3 sasaran strategis yang diukur dengan 4 kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya	Meningkatnya Derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	71.87	72.24	100.5%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
	Manusia	masyarakat					
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-Rata Sekolah		8,56	8,71	101.752
			Harapan Lama Sekolah		12,51	12,68	101,36
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	IPG		89.17	88,56	99.32
Rata-rata Capaian Indikator Misi 2							100.733%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 4 Indikator Kinerja Utama adalah 100.733% termasuk kategori keberhasilan memuaskan

Misi 3 : MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING

Untuk pencapaian misi 3 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ditetapkan 1 tujuan yaitu untuk “Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing” tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 3 kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)		44.79	55.62	124.19%
			Rasio Net Ekspor Terhadap PDRB		3.4	8.05	236.65%
		Mengurangi pengangguran	Tingkat Penganggur		5.49	6,22	86.7%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			an Terbuka			
			Tingkat Kemiskinan	6,02	5,56	107.6%
Rata-rata Capaian Indikator Misi 3						138.79%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 4 indikator kinerja utama adalah 138.79% termasuk kategori keberhasilan memuaskan

MISI 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Untuk pencapaian misi 4 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ditetapkan 2 tujuan yaitu untuk “Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik” dan “Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari” tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 12 Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3.322	3.92	117.39%
			Opini Terhadap Laporan Keuangan	BPK WTP	WTP	100%
			Hasil Evaluasi AKIP	BB (70)	B (64,65)	92,35%
			Nilai LPPD	3,7000	3,5036	94.69%
		Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan			
			INDEKS SPBE	2.41	2.83	117.43%
			Indeks Profesionalisme ASN	71.7	71,7*	100%
		Pelayanan publik yang Prima	Publik Service Indeks	3.12	3.860	123.7%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	83.7	84,35	100,77%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Nagari	Rata-rata	Indeks Ketahanan Sosial	0,8354	0,8464	101.3%
			Rata-Rata	Indeks Ketahanan Ekonomi	0,7127	0,7436	104 %
			Rata-Rata	Indeks Ketahanan	0,6010	0,6667	111%
			Ekologi	/			
			Lingkungan				
Rata-rata Capaian Indikator Misi 4							105.7%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 12 indikator kinerja utama adalah 90.27% termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik

MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan

Untuk pencapaian misi 5 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ditetapkan 1 tujuan yaitu untuk “Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)” tujuan tersebut memiliki 3 sasaran strategis yang diukur dengan 3 Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	10 %	7,74 %	77,41 %
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.47	63.48	96.96%
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah	125	130.02	95.84%

Rata-rata Capaian Indikator Misi 5

90.12%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja utama adalah 96.40% termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik

MISI 6 : Meningkatkan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Daerah

Untuk pencapaian misi 6 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ditetapkan 1 tujuan yaitu untuk “Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)” tujuan tersebut memiliki 3 sasaran strategis yang diukur dengan 3 Indikator Kinerja Utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Penerima Zakat	115	31.59	210.6 %
			Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	85	90.48	106.4%
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya	4	2	50%
Rata-rata Capaian Indikator Misi 6						122.33%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 6 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja utama adalah 122.33% termasuk kategori keberhasilan memuaskan



KABUPATEN DHARMASRAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat kami selesaikan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya jangka waktu 5 tahun periode 2021-2026. Materi laporan menguraikan capaian sasaran yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

Substansi laporan ini merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan kepada pemerintah sesuai dengan amanat yang diterima.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya telah berhasil dalam melaksanakan kinerja, dengan adanya laporan ini diharapkan jadi

bahan evaluasi agar kedepannya lebih terukur antara Aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan, Pelaksanaan, dan Evaluasi untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat Dharmasraya. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari partisipasi, kerjasama serta kerja keras semua pihak yakni masyarakat, dunia swasta dan aparat pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami berharap agar laporan kinerja pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, serta peningkatan kinerja dan komitmen bagi seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Atas Kontribusi tersebut kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Pulau Punjung, Maret 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE., M.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

EKSEKUTIF SUMMERY

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1.	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG.....	1
1.2	PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA.....	1
1.2.1	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1
1.2.2	SUMBER DAYA APARATUR.....	3
1.3	SEJARAH SINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA	5
1.3.1	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA	5
1.3.2	GAMBARAN UMUM DAERAH	5
1.4	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.....	7
1.4.1	PERMASALAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA	8
1.4.2	ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.....	8
1.5	DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA.....	9
1.6	MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.6.1	MAKSUD	10
1.6.2	TUJUAN.....	10
1.7	TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2023	10
1.8	SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
BAB 2.	PERENCANAAN KINERJA	17
2.1	VISI DAN MISI	17
2.1.1	VISI	17
2.1.2	MISI	17
2.1.3	PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.2	PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023..	18
BAB 3.	AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1	METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA.....	23
3.2	HASIL PENGUKURAN KINERJA	23
3.3	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	26
3.4	REALISASI ANGGARAN.....	159
BAB 4.	PENUTUP	164

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Golongan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.....	3
Tabel 1.2 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	11
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	19
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja terhadap target tahun Kinerja 2023 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	24
Tabel 1.1.1 Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2023	27
Tabel 1.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	27
Tabel 1.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten dengan Target Akhir Masa RPJMD	28
Tabel 1.4.1 Perbandingan Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023	28
Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan berdasarkan target tahun 2023.....	31
Tabel 2.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	32
Tabel 2.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	32
Tabel 2.4.1 Perbandingan Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023	33
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. berdasarkan target tahun 2023	35
Tabel 3.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	36
Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	36

Tabel 3.4.1 Perbandingan Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Dharmastraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023	37
Tabel 4.1.1 Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh berdasarkan target tahun 2023	39
Tabel 4.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	39
Tabel 4.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	40
Tabel 5.1.1 Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni berdasarkan target tahun 2023.....	43
Tabel 5.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	44
Tabel 5.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni dengan Target Akhir Masa RPJMD	44
Tabel 5.4.1 Perbandingan Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Dharmastraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	45
Tabel 5.7.1 Program Kegiatan Anggaran Serta Realisasi Anggaran Dalam Mencapai Indikator Kinerja rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2023	46
Tabel 6.1.1 Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik berdasarkan target tahun 2023	47
Tabel 6.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	47
Tabel 6.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	48
Tabel 8.1.1 Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup berdasarkan target tahun 2023	51
Tabel 8.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	51
Tabel 8.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup dengan Target Akhir Masa RPJMD	52
Tabel 8.4.1 Perbandingan Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmastraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	52
Tabel 8.5.1 Kinerja Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Angka Harapan tahun 2023.....	54

Tabel 9.1.1 Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2023.....	58
Tabel 9.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	59
Tabel 9.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target Akhir Masa RPJMD	59
Tabel 9.4.1 Perbandingan Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	60
Tabel 9.5.1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Yang Mendukung Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023	61
Tabel 10.1.1 Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2023.....	62
Tabel 10.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	63
Tabel 10.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	63
Tabel 10.4.1 Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	64
Tabel 11.1.1 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender berdasarkan target tahun 2023.....	66
Tabel 11.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	67
Tabel 11.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender dengan Target Akhir Masa RPJMD	67
Tabel 11.4.1 Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	68
Tabel 12.1.1 Capaian Kinerja PDRB Per Kapita berdasarkan target tahun 2023	70
Tabel 12.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	71
Tabel 12.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja PDRB Per Kapita dengan Target Akhir Masa RPJMD	71
Tabel 12.4.1 Perbandingan Kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	72
Tabel 13.1.1 Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap Pdrb berdasarkan target tahun 2023.....	75

Tabel 13.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap Pdrb Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	76
Tabel 13.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap Pdrb dengan Target Akhir Masa RPJMD	77
Tabel 14.1.1 Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan target tahun 2023	81
Tabel 14.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	81
Tabel 14.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	82
Tabel 14.4.1 Perbandingan Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	82
Tabel 15.1.1 Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan berdasarkan target tahun 2023.....	86
Tabel 15.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	87
Tabel 15.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan dengan Target Akhir Masa RPJMD	87
Tabel 15.4.1 Perbandingan Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional	88
Tabel 16.1.1 Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi berdasarkan target tahun 2023.....	90
Tabel 16.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	91
Tabel 16.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi dengan Target Akhir Masa RPJMD	91
Tabel 17.1.1 Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan berdasarkan target tahun 2023	95
Tabel 17.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	96
Tabel 17.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	96
<i>Tabel 18.1.1 Perbandingan antara target kinerja Hasil Evaluasi AKIP dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023</i>	<i>99</i>
Tabel 18.1.2 Komponen Penilaian SAKIP	100
Tabel 18.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Akip Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	101

Tabel 18.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Akip dengan Target Akhir Masa RPJMD	102
Tabel 18.4.1 Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP diatas B	102
Tabel 19.1.1 Capaian Kinerja LPPD berdasarkan target tahun 2023.....	105
Tabel 19.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	106
Tabel 19.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks SPBE dengan Target Akhir Masa RPJMD	107
Tabel 19.4.1 Perbandingan capaian kinerja LPPD Dharmasraya dengan Kabupaten Kota Lain dan Provinsi Sumatera Barat.....	107
Tabel 21.1.1 Capaian Kinerja Indeks SPBE berdasarkan target tahun 2023.....	110
Tabel 21.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	111
Tabel 21.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks SPBE dengan Target Akhir Masa RPJMD	111
Tabel 21.4.1 Perbandingan Kinerja Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat tahun 2023	112
Tabel 22.1.1 Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan target tahun 2023.....	115
Tabel 22.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	115
Tabel 22.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN dengan Target Akhir Masa RPJMD	116
Tabel 22.4.1 Perbandingan Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat.....	116
Tabel 23.1.1 Capaian Publik Servis Indeks berdasarkan target tahun 2023	119
Tabel 23.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Publik Service Indeks Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	119
Tabel 23.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Publik Service Indeks dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	120
Tabel 23.4.1 Rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan public tahun 2023.....	120
Tabel 23.6.1 Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Public Service Indeks Tahun 2023	121
Tabel 24.1.1 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan target tahun 2023.....	122
Tabel 24.1.2 Rekapitulasi Skor IKM Kab. Dharmasraya Tahun 2023	122

Tabel 24.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	123
Tabel 24.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target Akhir Masa RPJMD	124
Tabel 25.1.1 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial berdasarkan target tahun 2023.....	127
Tabel 25.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	128
Tabel 25.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	128
Tabel 26.1.1 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi berdasarkan target tahun 2023	130
Tabel 26.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	130
Tabel 26.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	131
Tabel 27.1.1 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan berdasarkan target tahun 2023	132
Tabel 27.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	133
Tabel 27.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan dengan Target Akhir Masa RPJMD	133
Tabel 28.1.1 Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan target tahun 2023.....	135
Tabel 28.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	135
Tabel 28.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Target Akhir Masa RPJMD	136
Tabel 29.1.1 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan target tahun 2023.....	139
Tabel 29.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	140
Tabel 29.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Target Akhir Masa RPJMD	140
Tabel 29.4.1 Perbandingan Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharma Raya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	141

Tabel 30.1.1 Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah berdasarkan target tahun 2023.....	142
Tabel 30.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	143
Tabel 30.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah dengan Target Akhir Masa RPJMD	144
Tabel 31.1.1 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat berdasarkan target tahun 2023.....	147
Tabel 31.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	148
Tabel 31.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat dengan Target Akhir Masa RPJMD	149
Tabel 32.1.1 Capaian Kinerja Persentase Mda/Tpa/Tpsa Yang Aktif berdasarkan target tahun 2023	152
Tabel 32.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Mda/Tpa/Tpsa Yang Aktif Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	152
Tabel 32.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Mda/Tpa/Tpsa Yang Aktif dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	153
Tabel 33.1.1 Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya berdasarkan target tahun 2023	156
Tabel 33.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir	156
Tabel 33.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya dengan Target Akhir Masa RPJMD.....	157
Tabel 3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023.....	159

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program- program pembangunan yang strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparatur pemerintah.

Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action plan*) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya.

1.2 PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA

1.2.1 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah implementasi peraturan tersebut mendasari pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai Berikut:

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:
 - a. Asisten Pemerintah dan Kesra, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian dan SDA,

- 2) Bagian Administrasi pembangunan,
- 3) Bagian pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 1) Bagian Umum dan Perengkapan,
 - 2) Bagian Protokol dan TU Pimpinan,
 - 3) Bagian Organisasi.
2. Sekretriati DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh Inspektur;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Badan;
6. Badan Keuangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan;
7. Dinas Pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
8. Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas;
10. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas;
14. Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas;
16. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
20. Dinas Perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
21. Dinas Pangan dan Perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
22. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas;
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Kantor;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan ;
25. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur RSUD;
26. Kecamatan dipimpin oleh Camat terdiri dari 11 Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kecamatan Sungai Rumbai membawahi 4 Nagari,
 - b. Kecamatan Koto Besar membawahi 7 Nagari,
 - c. Kecamatan Asam Jujuhan membawahi 5 Nagari,
 - d. Kecamatan Koto Baru membawahi 4 Nagari,

- e. Kecamatan Koto Salak membawahi 5 Nagari,
 - d. Kecamatan Koto Tiumang membawahi 4 Nagari,
 - e. Kecamatan Koto Sitiung membawahi 4 Nagari,
 - f. Kecamatan Koto Timpeh membawahi 5 Nagari,
 - g. Kecamatan Padang Laweh membawahi 4 Nagari,
 - h. Kecamatan Pulau Punjung membawahi 6 Nagari,
 - i. Kecamatan Sembilan Koto membawahi 4 Nagari,
27. Nagari dipimpin oleh Wali Nagari terdiri dari 52 Nagari

1.2.2 SUMBER DAYA APARATUR

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Golongan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023

No	INSTANSI	GOLONGAN										JUMLAH		TOTAL
		I		II		III		IV		P3K		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	3	2	16	18	13	1	4	4	36	25	61
2	SEKRETARIAT DPRD	0	0	2	0	8	6	2	1	0	3	12	10	22
3	INSPEKTORAT	0	0	1	2	5	11	7	2	0	0	13	15	28
4	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	0	0	5	10	4	1	0	0	9	11	20
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	2	1	9	15	5	4	2	4	18	24	42
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	5	2	7
7	BADAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	3	9	18	5	7	2	0	16	28	44
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0	0	13	0	5	1	5	0	20	0	43	1	44
9	DINAS PENDIDIKAN	1	0	10	26	250	847	120	246	109	563	490	1682	2172
10	DINAS KESEHATAN	2	0	14	133	47	308	8	44	22	171	93	656	749
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	1	0	11	4	2	3	0	0	14	7	21
12	DINAS PERTANIAN	1	0	13	1	22	40	6	5	22	7	64	53	117
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	9	7	4	1	2	0	15	8	23
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	9	2	23	9	2	1	0	2	34	14	48
15	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	10	3	10	2	4	0	0	0	24	5	29
16	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	1	0	2	1	6	8	3	1	0	0	12	10	22
17	DINAS KEBUDAYAAN	0	0	2	2	5	5	4	0	0	0	11	7	18

No	INSTANSI	GOLONGAN										JUMLAH		TOTAL
		I		II		III		IV		P3K				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA													
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0	0	1	1	4	11	2	2	0	2	7	16	23
19	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	0	0	0	0	10	8	6	1	2	6	18	15	33
20	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN	0	0	0	1	5	11	2	3	0	0	7	15	22
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	1	1	8	7	2	3	0	1	11	12	23
22	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	0	2	0	4	5	2	1	0	0	8	6	14
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	3	8	2	2	0	0	5	10	15
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	3	0	6	7	4	2	0	0	13	9	22
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	1	3	3	8	2	1	1	7	7	19	26
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	0	22	43	32	122	9	15	9	62	73	242	315
27	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	5	1	6
28	KECAMATAN ASAM JUJUAN	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	5	1	6
29	KECAMATAN IX KOTO	0	0	2	0	5	0	3	0	0	0	10	0	10
30	KECAMATAN KOTO BARU	0	0	2	3	6	5	0	0	0	0	8	8	16
31	KECAMATAN KOTO BESAR	0	0	3	2	5	2	4	0	0	0	12	4	16
32	KECAMATAN KOTO SALAK	0	0	0	2	3	4	1	0	0	0	4	6	10
33	KECAMATAN PADANG LAWEH	0	0	2	1	6	0	1	0	0	0	9	1	10
34	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	0	0	1	2	4	8	4	1	0	0	9	11	20
35	KECAMATAN SITIUNG	0	0	2	1	7	2	2	2	0	0	11	5	16
36	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	0	0	4	0	0	7	1	1	0	0	5	8	13
37	KECAMATAN TIMPEH	1	0	2	0	6	1	1	0	0	0	10	1	11
38	KECAMATAN TIUMANG	0	0	1	0	5	3	1	0	0	0	7	3	10

No	INSTANSI	GOLONGAN										JUMLAH		TOTAL
		I		II		III		IV		P3K				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	JUMLAH	7	0	131	238	572	1529	248	352	195	832	1153	2951	4104

Sumber Data : BKPSDM Dharmasraya, 2023

1.3 SEJARAH SINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia yang merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran di Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. Kabupaten ini lahir dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari 4 kecamatan dengan luas 2.961, 13 Km atau 296.113 Ha. Pada kawasan ini dahulunya pernah menjadi ibu kota dan pusat kerajaan Malayapura. Ibu kota Kabupaten Dharmasraya berada di Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 wilayah administrasi Kecamatan dan 52 Nagari atau pemerintahan setingkat Desa. Selain itu untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (Pemerintah Kabupaten) Dharmasraya menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut Pemerintah Kabupaten membentuk 18 dinas daerah, 3 (tiga) badan, dan 1 (Satu) kantor. Dengan komposisi tersebut diharapkan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik.

1.3.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Dalam perkembangannya Kabupaten Dharmasraya terbentuk atas dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

1.3.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Geografi Kabupaten Dharmasraya

Secara geografis kabupaten Dharmasraya berada pada posisi, 00 47'7" LS -- 141' 56", Lintang Selatan (LS) dan, 1019' 21", BT -- 1010 54' 27", Bujur Timur (BT). Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan:

* Sebelah Utara dengan Kab. Sawahlunto/Sijunjung dan kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau

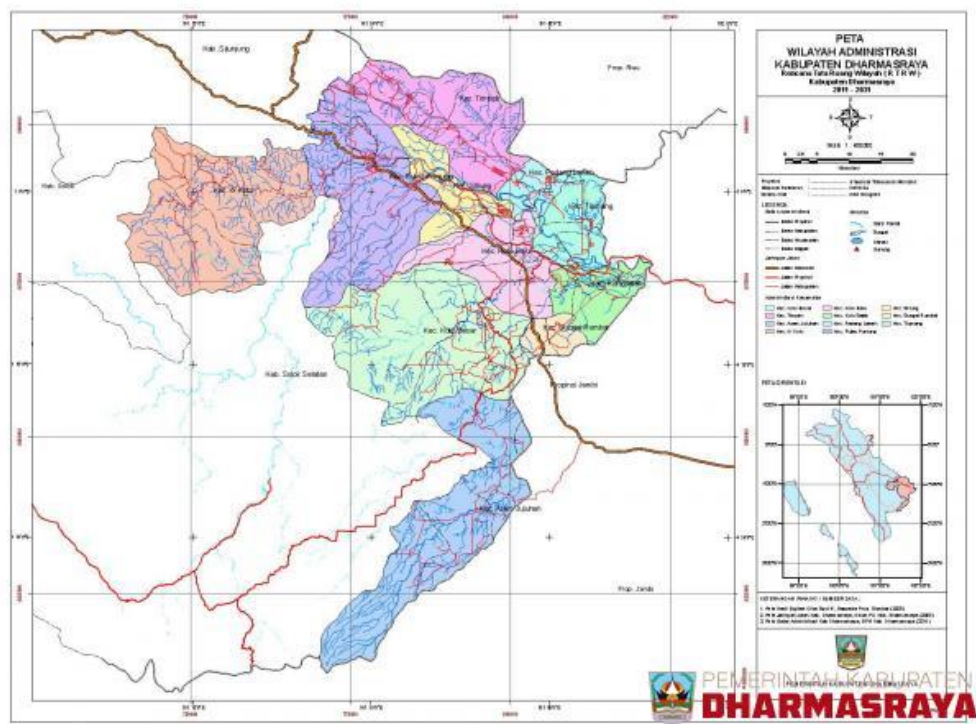
* Sebelah Selatan dengan Kab. Bungo dan Kab. Kerinci Provinsi Jambi

* Sebelah Timur dengan Kab. Tebo dan Bungo Propinsi Jambi

* Sebelah Barat dengan Kab. Solok dan Solok Selatan.

Letak geografis Kabupaten Dharmasraya 00048'25,4"- 1041'40,3" LS dan 10108'32,5"- 101053'30,2" BT.. Luas wilayah berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 adalah 2.961,13 Km² (296.113 Ha). Sebesar 87,4% dari luas wilayahnya merupakan lahan pertanian, sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km² (302.599) Ha. Peta Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1-1 Peta Kabupaten Dharmasraya



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa letak geografis Kabupaten Dharmasraya sangat strategis. Dengan posisi sangat strategis berada di segitiga emas Sumbar, Riau dan Jambi, persisnya di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan batas sebelah barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat.

B. Wilayah dan Geografi Ekonomi Kabupaten Dharmasraya

Suhu berkisar antara 210 C -- 330 C dengan rata-rata hari hujan 14,35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan. Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 98,3 M sampai 1.525 M dari permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK) yang didominasi oleh hutan hujan tropik dan perkebunan. Hutan seluas 133.186 Ha (44,98 %), perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12 %) dan lain-lain sebesar (14,90 %).

Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Di samping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, cokelat, cengkih, dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Penghasil kelapa sawit paling banyak di kabupaten ini adalah Kecamatan Sungai Rumbai.

Selain itu terdapat potensi tambang yang hingga detik ini belum tergarap, yakni batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit, dan sebagainya. Kabupaten ini masih baru dan masih dalam tahap mengembangkan diri dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Ditunjang dengan posisi strategisnya di Sumatera (dilintasi Jalur Lintas Tengah Sumatera sepanjang 100 km), maka Dharmasraya cepat menjadi kawasan yang maju dan tumbuh sebagai wilayah perdagangan dan jasa.

C. Demografi Kabupaten Dharmasraya

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebanyak orang dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung, sedangkan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai (479 Jiwa/Km²), Sebagian besar wilayah Kabupaten Dharmasraya telah dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian, mulai tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang mencapai 87,74 persen dari total luas wilayah.

Dilihat dari sisi kependudukan di Dharmasraya, komposisi penduduk menurut suku bangsa diperoleh data Suku Minang 62,93%, Suku Jawa 32,96%, Suku Sunda 1,49%, Suku Batak 0,88%, Melayu 0,71% dan Suku lainnya 1,03%. Berdasarkan distribusi penduduk menurut tingkat usia, diperoleh data angkatan kerja (15-59 tahun) sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dengan tingkat ketergantungan 63,15%.

1.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Sedangkan isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat dimasa datang. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang tidak dimanfaatkan.

1.4.1 PERMASALAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan dapat juga dimaknai sebagai penyebab terjadinya kesenjangan tersebut, beberapa permasalahan di Kabupaten Dharmasraya sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah :

1. Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup (infrastruktur)
2. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia
3. Permasalahan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
4. Permasalahan birokrasi pemerintahan daerah (birokrasi)

Selain permasalahan Pembangunan, Permasalahan akibat *covid-19* juga muncul, Pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai permasalahan yang meluas di banyak bidang kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, dan psikologis. Berikut adalah beberapa permasalahan yang umumnya timbul karena pandemi COVID-19:

1. Kesehatan Masyarakat, Penyebaran virus dan beban penyakit yang tinggi dapat menyebabkan tekanan berlebih pada sistem kesehatan, termasuk kurangnya kapasitas di rumah sakit, kekurangan peralatan medis, dan peningkatan risiko infeksi bagi tenaga medis.
2. Ekonomi, perbaikan ekonomi pasca wabah *Covid-19* menjadi masalah serius mengingat pada masa covid diberlakukan pembatasan gerak dan penurunan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.
3. Kesejahteraan Sosial, Pembatasan sosial dan fisik telah memengaruhi interaksi sosial, kesejahteraan emosional, dan kesehatan mental individu, dengan meningkatnya kasus depresi, kecemasan, dan stres pada banyak orang.
4. Ketergantungan pada Teknologi, Peningkatan penggunaan teknologi untuk komunikasi, pembelajaran, dan pekerjaan telah menghasilkan tantangan terkait privasi, keamanan data, dan aksesibilitas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses yang memadai atau keterampilan teknologi.

Ini hanyalah sebagian dari permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan individu, dengan fokus pada pemulihan kesehatan, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

1.4.2 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di

masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk itu, isu-isu strategis akan di analisa dengan berbagai fakta dan informasi kunci yang telah di intefikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Berikut diuraikan isu-isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 , Dengan adanya Pandemi Covid-19, antisipasi akan difokuskan untuk penanganan isu terkait :

1. Peningkatan ekonomi,
2. Pembenahan sektor kesehatan,
3. Peningkatan kualitas pendidikan,
4. Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat khususnya yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan Prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 akan lebih difokuskan pada 3 sektor yaitu;

1. Sektor pertanian,
2. Sektor industri pengolahan dan,
3. Sektor akomodasi dan makan minum dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta
4. dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah

1.5 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 ini didasarkan kepada:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.
12. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

1.6 MAKSUD DAN TUJUAN

1.6.1 MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan Visi dan Misi berdasarkan pencapaian dan tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan da program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

1.6.2 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan LAKIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan keparvayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten. Akhirnya penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.7 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2023

Berdasarkan surat dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/195 /AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, telah disusun tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	REKOMENDASI LHE 2023 /RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Melakukan reuiu dan perbaikan dokumen penjenjangan kinerja baik di level Pemda maupun PD untuk memastikan kualitas penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi hasil sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reuiu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah			
	akan dilakukan reuiu dan perbaikan dokumen perjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintahan	OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	Inspektur
2	Melakukan reuiu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap PD telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;			
	Pembentukan tim khusus yang terdiri dari anggota yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang perencanaan strategis, kebijakan publik, dan pengukuran kinerja. serta Penunjukan seorang koordinator untuk mengawasi semua aktivitas dan memastikan keselarasan dengan tujuan dan sasaran.	1 Tim yang terdiri dari BAPPPEDA, Inspektorat dan Sekretariat Daerah	2 bulan	BAPPPEDA dan Inspektorat
	Melakukan audit awal terhadap dokumen perencanaan yang ada di setiap PD, kelemahan dan	2 kali kegiatan	2 bulan	BAPPPEDA

	kekurangan dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang tercantum.			
	Merumuskan pedoman atau panduan yang jelas untuk merevisi dokumen perencanaan, termasuk kriteria SMART dan prinsip pengukuran kinerja yang efektif. Memastikan pedoman ini mencakup langkah-langkah praktis untuk memperbaiki dokumen perencanaan	1 Pedoman	1 bulan	Inspektorat
3	Mengoptimalkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;			
	mengadopsi aplikasi E-Sakip dari Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat	aplikasi E-Sakip dapat dioperasikan oleh seluruh OPD	2 bulan	Kepala Dinas
4	Mendorong pelaksanaan pemantauan atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada PD untuk bisa ditindaklanjuti langsung pada periode berjalan;			
	peningkatan kapasitas SDM yang memahami konsep sistem akuntabilitas kinerja melalui bimbingan teknis sehingga dapat memberikan rekomendasi serta saran yang mendorong penerapan SAKIP di Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	1 Kali Kegiatan	1 bulan	Inspektorat
5	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN);			
	1. Akan dilakukan sosialisasi regulasi tentang pengukuran kinerja	Seluruh ASN Di lingkup Kabupaten	12 Bulan	Kepala BKPSDM

Dharmasraya				
	2. Akan dilakukan penyusunan dokumen pengembangan kompetensi secara bertahap			
	3. Akan dilakukan Perencanaan dan Pelaksanaan mutasi dan rotasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
6	Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level Pemda maupun PD dalam 4 website kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;			
	aplikasi E-sakip dapat terintegrasi kedalam website kabupaten	terintegrasinya aplikasi E-sakip kedalam website kabupaten	2 bulan	Kepala Dinas
7	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;			
	Pembuatan format baru dengan menampilkan data dan analisa data yang lebih akuntabel, dapat dipertanggung jawabkan serta informasi yang disajikan lengkap dan menampilkan rekomendasi tindak lanjut evaluasi internal serta perbaikan yang akan dilakukan	2 format 1. Format Lakip Pemda 2. Format Lakip OPD	1 bulan	Bagian Organisasi
	Pendampingan intens dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, serta Penguatan peran TIM SAKIP Kabupaten dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1. 38 OPD 2. 3 Kegiatan	3 bulan	Bagian Organisasi
8	Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada Pemda dan perangkat daerah mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas			

	penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;			
	Penyusunan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	1 Peraturan Bupati	2 bulan	1. Bagian Organisasi 2. Bagian Hukum
9	Melakukan reviu kembali terhadap penetapan target yang diperjanjikan tiap tahunnya yang selaras dengan hasil capaian sehingga mampu menetapkan target kinerja yang tepat;			
	Pembentukan tim reviu oleh inspektorat yang memahami teknis penyelarasan kinerja dan melakukan reviu berkala	1 tim	12 bulan	Inspektorat
10	Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;			
	akan dilakukan pengembangan kompetensi evaluator AKIP	Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	Inspektorat
11	Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;			
	Pendokumentasian Rencana Tindak Lanjut Perangkat Daerah terhadap rekomendasi oleh Inspektorat	38 OPD	1 bulan	Bagian Organisasi

	Monitoring triwulan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi oleh inspektorat	4 kali	12 bulan	Bagian Organisasi
12	Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap PD untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP			
	Berdasarkan Rapat tim SAKIP Kabupaten pada tanggal 22 Januari 2024, direncanakan akan menyusun kebijakan berupa Peraturan Bupati atau SK Bupati terkait pemberian penambahan anggaran kepada Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP tertinggi berdasarkan hasil evaluasi internal oleh inspektorat dan akan disusun skema pemberian rewardnya, serta SK tentang pemberian teguran kepada OPD dengan nilai terendah terhadap LHE oleh Inspektorat	1 Kebijakan	12 Bulan	1. TIM SAKIP Kabupaten 2. TIM TAPD 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan relisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Serta menguraikan mengenai rencana strategis, prioritas Nasional dan rencana kerja tahun bersangkutan serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja Organisasi.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada BAB ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan dengan melakukan analisis yang memuat perbandingan antara target kinerja tahun -n dengan realisasi kinerja tahun -n, perbandingan antara capaian kinerja tahun -n dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir, perbandingan antara capaian kinerja sampai dengan tahun -n dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD, perbandingan antara capaian kinerja tahun -n dengan standar Nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan menampilkan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun bersangkutan.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran serta strategi yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

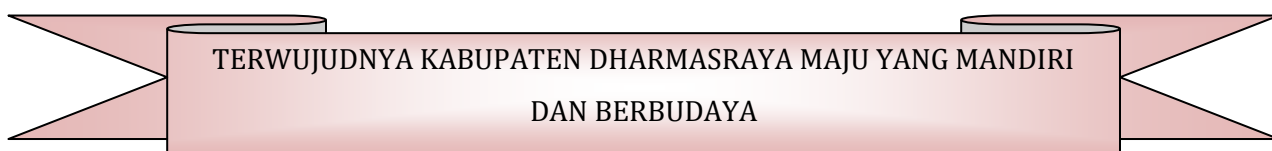
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

2.1.1 VISI

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021- 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun.



Definisi kalimat Visi RPJMD :

Maju: Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri: Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

2.1.3 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan kinerja menentukan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai alat ukur terhadap kinerja.

Ditinjau secara definisi, maka tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun masing-masing tujuan dan sasaran akan dikaitkan dengan misi Kepala Daerah, serta masing-masing tujuan dan sasaran tersebut memiliki indikator outcome yang digunakan sebagai target kinerjanya

Tahun 2023 merupakan tahun ke-3 (tiga) implementasi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, yang penyusunannya dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023. Dengan ditetapkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026, dilakukan penyempurnaan perencanaan tahunan dimaksud.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan yang disebut dengan astha utama kedua, dimana prioritas pembangunan ini menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah
8. Membangun berbasis nagari

2.2 PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Perjanjian kinerja Pemerintah Daerah tahun 2023 mengalami perubahan satu kali karena terdapat perubahan strategi dan refocusing terhadap program dan kegiatan sehingga perlu

dilakukan perubahan target kinerja, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
				AWAL	PERUBAHAN
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1 Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	60	60
		2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	70	89
		3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95	95
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	4 Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	43,04	43.04
		5 Rasio pemukiman layak huni	Persen	91,45	91.45
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber	6 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	69,75	76.37

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
				AWAL	PERUBAHAN
	daya air	7 Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	Persen	28,83	0
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8 Angka Harapan Hidup	Tahun	71,87	71,87
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	9 Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.49	8.56
		10 Harapan lama sekolah	Tahun	12.45	12.51
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	11 Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89.17	89.17
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	12 PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	44.79	44.79
		13 Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	3.4	3.4
8	Mengurangi pengangguran	14 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5.49	5.49
9	Mengurangi kemiskinan	15 Tingkat Kemiskinan	Persen	6.02	6.02
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	16 Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3.322	3.322
		17 Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP	WTP
		18 Hasil evaluasi AKIP	Bobot/ Indeks	BB (70)	BB (70)
		19 Nilai LPPD	Skor	3.7000	3.7000
11	Birokrasi yang berkualitas	20 Indeks Kelembagaan	Indeks		0
		21 Indeks SPBE	Indeks	2.175	2.41
		22 Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	68	71.7
12	Pelayanan publik yang prima	23 Publik service indeks	Indeks	3.12	3.12
		24 Indeks Kepuasan	Indeks	82	83.7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
				AWAL	PERUBAHAN
		Masyarakat			
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	25 Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0.8354	0.8354
		26 Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0.7127	0.7127
		27 Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0.6010	0.601
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	28 Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	10	10
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	29 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65.47	65.47
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	30 Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	125	125
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	31 Persentase peningkatan zakat	Persen	2	15
		32 Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	85	85
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	33 Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	6	4

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Dharmasraya. 2023

Perjanjian kinerja Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati Dharmasraya pada Januari 2023. kemudian dilakukan revisi pada November 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Adanya penyesuaian terhadap pencapaian kinerja anggaran. antara lain. perubahan alokasi anggaran. perubahan pelaksanaan kegiatan. dan perubahan pola kerja.
2. Beberapa Indikator Kinerja tidak dapat dilakukan penilaian capaian kinerja karena penilaian terhadap indikator tersebut tidak dilaksanakan setiap tahunnya.
3. Sudah ada indikator kinerja yang capaiannya jauh melebihi target sehingga perlu penyesuaian terhadap target kinerja

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 merupakan kewajiban Kepala Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Dharmasraya. Untuk mengukur pencapaian visi dan misi tersebut maka telah ditetapkan setiap tahunnya sasaran dan indikator kinerja Bupati kedalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah yang tertuang ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber dana lainnya.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja kepala dinas dengan Bupati. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada table berikut ini :

No	Klasifikasi Penilaian	Prediket
1	>100%	Memuaskan
2	85% - 99.9%	Sangat Baik
3	75% - 84.9%	Baik
4	55% - 74.9%	Cukup
5	<55%	Kurang Baik

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian atas target indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja terhadap target tahun Kinerja 2023 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1	Rasio kemantapan jalan kabupaten	60 %	58.16 %	96.93
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	89 %	89.07 %	100.08
		3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	95 %	92.5 %	97.36
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	4	Persentase lingkungan permukiman kumuh	43.04 %	68 %	157.99
		5	Rasio pemukiman layak huni	91.45 %	84.3 %	92.19
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	6	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	76.37 %	76.37 %	100.00
		7	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	0 %	-	-
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Angka Harapan Hidup	71.87 Tahun	72.24 Tahun	100.51
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	9	Angka rata-rata lama sekolah	8.56 Tahun	8.71 Tahun	101.75
		10	Harapan lama sekolah	12.51 Tahun	12.68 Tahun	101.36
6	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	11	Indeks Pembangunan Gender	89.17	88.56	99.32
7	Meningkatkan	12	PDRB Per Kapita	44.79	55.62 Juta	124.19

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
	pendapatan masyarakat dan daya saing daerah			Juta Rupiah	Rupiah	
		13	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	3.4 %	8.05 %	236.65
8	Mengurangi pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.49 %	6.22 %	86.70
9	Mengurangi kemiskinan	15	Tingkat Kemiskinan	6.02 %	5.56 %	107.6
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	16	Indeks perilaku antikorupsi	3.322	3.92	117.39
		17	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100.00
		18	Hasil evaluasi AKIP	BB (70)	(B) 64.65	92.35
		19	Nilai LPPD	3.7000	3.5036	94.69
11	Birokrasi yang berkualitas	20	Indeks Kelembagaan	-	-	-
		21	Indeks SPBE	2.41	2.83	117.43
		22	Indeks Profesionalisme ASN	71.7	71.7	100.00
12	Pelayanan publik yang prima	23	Publik service indeks	3.12	3.86	123.72
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.7%	84.35%	100.77
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	25	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0.8354	0.8464	101.32
		26	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0.7127	0.7436	104
		27	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0.6010	0.6667	111
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	28	Kesesuaian pemanfaatan ruang	10 %	7.74 %	77.41
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.47	63.48	96.96
16	Optimalisasi	30	Indeks Resiko Bencana	125	130.02	95.84

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
	penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Daerah			
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	31 Persentase peningkatan zakat	15 %	31.59 %	210.6
		32 Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	85 %	90.48 %	106.4
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	33 Jumlah nagari beradat dan berbudaya	4 Nagari	2 Nagari	50.00

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja persasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MISI 1. MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Tujuan 1.1 Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas

Untuk Pencapaian misi 1 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di tetapkan 1 tujuan yaitu “Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Secara Merata Dan Berkualitas” Tujuan misi 1 memiliki sasaran yang diukur dengan 7 Indikator Kinerja Utama, Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 1 dibahas berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1.1.1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR

1. RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN

RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN

$$= \frac{\text{Jumlah Jalan dalam keadaan mantap (Kecepatan kendaraan} \pm 40 \text{ km per jam)}}{\text{Seluruh Jumlah Jalan di Dharmasraya}} * 100\%$$

$$\text{RASIO KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN} = \frac{612.21}{1.052.66} * 100\% = 58.16 \%$$

1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Dibawah ini adalah tabel Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2023:

Tabel 1.1.1 Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	60	58.16	96.93	Sangat baik

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2023

Dari tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun target yang ditetapkan untuk Rasio Kemantapan Jalan adalah sebesar 60, realisasi yang tercatat hanya mencapai 58.16. Meskipun demikian, capaian kinerja sebesar 96.93% menunjukkan bahwa kinerja masih tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit perbedaan antara realisasi dan target yang ditetapkan, namun hasil yang dicapai masih dalam kategori yang sangat memuaskan, menunjukkan adanya upaya yang berhasil dilakukan dalam meningkatkan kemantapan jalan.

1.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Berikut adalah tabel yang mencantumkan realisasi kinerja dalam tiga tahun terakhir. Tabel ini memberikan gambaran tentang pencapaian yang telah dicapai dalam periode waktu tersebut, serta memungkinkan untuk mengevaluasi tren dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun

Tabel 1.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	53%	50.19%	94.7%
2022	57%	58.09%	101.9%
2023	60%	58.16%	96.93%

Sumber data : Dinas PUPR Dharmasraya. 2023

Melihat kinerja Rasio Kemantapan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, terdapat perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan sebesar 53% namun realisasinya hanya mencapai 50.19%. meskipun demikian capaian kinerja tetap mencapai 94.7%. Sementara pada tahun 2022, terdapat peningkatan yang cukup besar, dengan realisasi mencapai 58.09%, melampaui target sebesar 57%, dan capaian kinerja mencapai 101.9%. Namun demikian, pada tahun 2023, meskipun target yang ditetapkan adalah 60%, realisasi yang tercatat hanya sedikit di bawahnya, yaitu 58.16%, namun capaian kinerja tetap relatif tinggi, yakni 96.93%. Hal ini menunjukkan tren yang positif dalam upaya peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Dharmasraya selama periode yang diamati.

1.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi kinerja dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD memberikan gambaran tentang sejauh mana pencapaian kinerja pada tahun tersebut mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tabel 1.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	51.25 %	58.16%	68 %	85.53 %

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya 2023

Dari tabel yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023, Rasio Kemantapan Jalan di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan dari kondisi awal yang tercatat pada tahun 2020, yaitu sebesar 51.25% menjadi 58.16%. Meskipun demikian, realisasi tersebut masih di bawah target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2026, yaitu sebesar 68%. Meskipun demikian, persentase capaian terhadap target akhir RPJMD masih cukup signifikan, mencapai 85.53%, menunjukkan kemajuan yang positif dalam mencapai target tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lanjutan untuk memastikan pencapaian target akhir RPJMD dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

1.4 Perbandingan capaian Kinerja tahun 2023 dengan Provinsi dan Nasional

Tabel 1.4.1 Perbandingan Kinerja Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Dharmasraya	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
1	Rasio Kemantapan Jalan	58.16 %	66%	92.2 %

Sumber : Kementrian PUPR. 2023

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, rasio kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Dharmasraya masih jauh tertinggal, sehingga masih diperlukan prioritas untuk pembangunan jalan yang mantap.

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pada tahun 2023, jumlah jalan keadaan mantap di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 612.21 km dari total jalan sepanjang 1052.66 km, artinya sudah 58.17% jalan dalam Kondisi mantap dengan capaian kinerja sebesar 96.9% termasuk kategori sangat baik. Namun karena kondisi geografi Kabupaten Dharmasraya yang merupakan jalan lintas Sumatera yang dilewati oleh berbagai kendaraan dengan tonase dan volume kendaraan yang melebihi tonase yang diizinkan untuk kelas jalan serta karena pengaruh keadaan cuaca yang ekstrem sehingga masih banyak jalan yang berlubang dan belum dalam Kondisi mantap, hal ini membutuhkan anggaran yang lebih untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan.

Selain itu kondisi jembatan juga mempengaruhi capaian, namun di beberapa lokasi masih banyak yang memprihatinkan dibawah batas layan dan ada yang mencapai batas kritis sehingga dapat membahayakan bagi pengguna jalan yang melewatinya. Untuk mengembalikannya pada kondisi yang layak maka diperlukan perbaikan jembatan

Dalam mencapai keberhasilan kinerja indikator sasaran rasio kemantapan jalan didukung oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dengan indikator kinerja perangkat daerah yaitu Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Beberapa penyebab keberhasilan dakam pencapaian ini antara lain melakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. SDM Teknis yang memadai
2. Sarana Prasarana yang memadai
3. Ketersediaan anggaran yang mendukung

beberapa kendala yang dihadapi untuk mencapai kinerja rasio kemantapan jalan kabupaten adalah:

1. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan ruas jalan
2. Mutu dan kemantapan jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase juga masih terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan

Solusi atau faktor pendukung keberhasilan indikator ini adalah dengan adanya pemeliharaan jalan dengan mengadakan Tim URC (Unit Reaksi Cepat). Tim URC harus dibentuk. Untuk memperbaiki, rehabilitasi/ pemeliharaan infratraktur jalan raya yang meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*).

1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja indikator kinerja jalan dalam kondisi mantap tahun 2023 dengan capaian kinerja 96.9% %, dalam pencapaian kinerja ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan upaya efisiensi penggunaan SDM dan efisiensi anggaran sebesar 7.92 % dengan pagu Rp. 40.368.464.175.00 dengan realisasi Rp. 37.171.014.620.44 .- atau 92.08 %. namun kinerja yang dihasilkan telah sampai 96.9%. sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mampu mengefisienkan anggaran untuk pencapaian kinerja ini.

1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Indikator kinerja rasio kemantapan jalan kabupaten ini di capai dengan melaksanakan program penyelenggaraan jalan. dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran yang di alokasikan sebesar Rp. 40.368.464.175.00 untuk Pembangunan jalan. Dari dana yang dianggarkan tersebut ditargetkan dapat meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya. Sehingga batas layan kondisi jalan tersebut masih dapat diterima dan nilai konstruksi jalan berada diatas batas bawah kemantapan konstruksi jalan. Realisasi dari pelaksanaan kegiatan ini dilakukan menggunakan jasa pihak ketiga (kontrak). pada akhir tahun anggaran realisasi fisik pekerjaan ini mencapai 100%

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mencapai kinerja rasio kemantapan jalan kabupaten antara lain:

1. Pembangunan Jalan Spesifikasi : Aspal Hotmix :Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin. pemeliharaan berkala. peningkatan/rekonstruksi)Koto Besar - Lubuk Karya (R. 171) 3.34 Km
2. Pembangunan Jalan Spesifikasi : Aspal Hotmix :Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin. pemeliharaan berkala. peningkatan/rekonstruksi) [-] Simpang Kelapa - Simpang 3 Blok A Sitiung IV (R. 172) 3.67 Km.
3. Jalan Kabupaten Paket III (Kec.Sitiung. Kec.Timpeh & Kec.Koto Baru
4. Aspal Hotmix Jalan Lingkar Nagari Siguntur Kec.Sitiung 0.27 Km
5. Aspal Hotmix Jorong Piruko Selatan Menuju Jorong Piruko Timur nagari Sitiung
6. Kecamatan Sitiung 0.27 Km
7. Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Seberang Piruko Kec.Koto Baru 0.34 Km
8. Peningkatan jalan aur jaya ampan kurangi 0.34 Km
9. Peningkatan Jalan Lingkar Sitiung 0.34 Km
10. Jalan Kabupaten Paket II (Kec.Koto Besar & Kec.Asam Jujuhan)
11. Aspal Hotmix Jalan Lingkar Bonjol 0.34 Km
12. Aspal Hotmix Jalan Tanjung Alam Sungai Limau 0.34 Km
13. Pembangunan Jalan Sitiung IV Koto Ranah Kec. Koto Besar 0.27 Km

14. Pengaspalan jalan lingkar abai siat nagari abai siat 0.5 Km
15. Rehabilitasi Jalan Padang Bungur Kec. Koto Besar 0.4 Km
16. Jalan Kabupaten Paket I (Kec.Sungai Rumbai)
17. Aspal Hotmix Jorong Koto Ranah Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai 0.27 Km
18. DAM Jalan SDIT Sungai Rumbai 0.17 KM
19. Jalan Lingkar Sungai Rumbai Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai 0.34 Km
20. Pengerasan dan Pengaspalan jalan dibawah Tower Jorong Pasar Baru Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai 0.27 Km
21. Peningkatan Jalan Sungai Rumbai Timur 0.34 Km

2. PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN $= \frac{\text{jumlah rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan}}{\text{jumlah rumah tangga keseluruhan}} * 100$ $= \frac{52.131 \text{ Rumah Tangga}}{58.526 \text{ Rumah Tangga}} * 100\% = 89.07 \%$
--

2.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Dibawah ini adalah perbandingan capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. berdasarkan target yang ditetapkan untuk tahun 2023

Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan	89.00%	89.07%	100.08	Memuaskan

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2023

Berdasarkan tabel yang disajikan. capaian kinerja dalam Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Realisasi mencapai 89.07%. sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 89.00%. Capaian ini bahkan melebihi 100% dengan nilai 100.08%. menandakan bahwa layanan air minum layak telah mencakup lebih dari yang telah direncanakan. Dengan demikian. prestasi ini dapat dinyatakan sebagai "Memuaskan" sesuai dengan predikat yang diberikan.

2.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Dibawah ini adalah perbandingan antara capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan untuk tahun 2023 dengan capaian kinerja selama tiga tahun terakhir

Tabel 2.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	61.00%	60.82%	99.70%
2022	65%	88%	135.9%
2023	89.00%	89.07%	100.08%

Sumber Data : Dinas PUPR Dharmasraya. 2023

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel. dapat disimpulkan bahwa terjadi tren peningkatan yang signifikan dalam Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan selama periode tiga tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2021 realisasi sedikit di bawah target yang ditetapkan. namun capaian kinerja masih mencapai 99.70%. Pada tahun 2022. terjadi lonjakan yang luar biasa dalam realisasi. melebihi target sebesar 135.9%. menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan akses terhadap layanan air minum. Sedangkan pada tahun 2023. realisasi sudah mencapai target dengan capaian kinerja mencapai 100.08%. Dengan adanya kemajuan yang konsisten dalam memastikan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan semakin meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

2.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 2.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	59 %	89.07 %	100 %	89.07%

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2023

Dari analisis data yang disajikan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan dari kondisi awal pada tahun 2020 hingga realisasi pada tahun 2023. Realisasi pada tahun 2023 mencapai 89.07%, mendekati target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan progres yang positif dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dan berkelanjutan. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan upaya lanjutan untuk memastikan bahwa target akhir RPJMD dapat tercapai secara penuh. Oleh karena itu, perlu terus memantau dan mengevaluasi strategi serta kebijakan yang diterapkan guna memastikan tercapainya akses air minum yang layak bagi seluruh penduduk sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.4 Perbandingan capaian Kinerja tahun 2023 dengan Provinsi dan Nasional

Perbandingan kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan antara Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.1 Perbandingan Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Dharmasraya	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
1	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	89.1 %	85.59%	91.72 %

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2023

Kabupaten Dharmasraya mencatat Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 89.1%. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat memiliki persentase yang sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 85.59%. Di sisi lain, secara nasional, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan adalah 91.72%. Dengan demikian, Kabupaten Dharmasraya memiliki performa yang baik dalam menyediakan akses terhadap layanan air minum yang layak, meskipun sedikit di bawah tingkat nasional.

2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan didukung oleh sasaran kinerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang yaitu Sasaran

Meningkatnya layanan penyediaan air minum dengan indikator Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan antara lain:

1. Pada Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum POKJAPL/ POKJA Sanitasi kurang aktif sehingga koordinasi antar sektor tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara kegiatan dibidang AMPL berkaitan dengan tupoksi dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan. Pemberdayaan. Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPEDA sebagai coordinator
2. Belum adanya pendataan dan survey kelayakan air minum dan sanitasi
3. Kurangnya Anggaran APBD terhadap Program Air Minum
4. Masih kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap air minum dan penggunaan Tanki septic sesuai teknis
5. Masyarakat lebih mementingkan membangun sarana dan prasarana lainnya dibanding pembangunan sarana dan prasarana Air Minum.
6. Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola Air Minum berbasis masyarakat

Beberapa Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan dalam pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Peran aktif dari POKJAPL/ POKJA Sanitasi dan koordinasi antar sektor
2. Tersedianya Anggaran untuk pendataan dan survey kelayakan air minum
3. Penambahan Anggaran APBD terhadap Program Air Minum
4. Sosialisasi antar sektor pada Masyarakat terhadap air minum
5. Penambahan anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi dan Air Minum berbasis masyarakat

2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. untuk pencapaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja 89.07%. Dalam pencapaian kinerja ini. telah melaksanakan upaya efisiensi penggunaan SDM dan efisiensi anggaran sebesar 12.00 % dengan pagu Rp.1.403.747.000.- dengan realisasi Rp.1.231.841.484.- atau 88 %.

2.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Untuk mendukung indikator sasaran Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum didukung oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

3. PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN = $\frac{\text{jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.}}{\text{jumlah rumah tangga keseluruhan}} * 100\%$ $= \frac{54134}{58.526} * 100\% = 97.36\%$
--

3.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Dibawah ini adalah perbandingan capaian kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. berdasarkan target yang ditetapkan untuk tahun 2023

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	95%	92.50%	97.36%	Sangat Baik

Sumber Data: Dinas PUPR. 2023

Berdasarkan analisis tabel yang disajikan. terdapat indikasi positif terkait Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Meskipun target yang ditetapkan adalah sebesar 95%. realisasi yang tercatat mencapai 92.50%. Namun. capaian kinerja sebesar 97.36% menunjukkan bahwa kinerja masih tergolong sangat baik. Oleh karena itu. dapat disimpulkan bahwa upaya dalam menyediakan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan telah mencapai tingkat yang sangat memuaskan.

3.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Berikut adalah perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2023 dengan capaian kinerja selama tiga tahun terakhir.

Tabel 3.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	87.25%	80.00%	91.7%
2022	92%	91.73%	99.7%
2023	95%	92.50%	97.36%

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya 2023

Pada tahun 2021. realisasi sebesar 80.00%. namun capaian kinerja masih cukup baik dengan mencapai 91.7%. Pada tahun 2022. realisasi meningkat menjadi 91.73% yang hampir mencapai target yang ditetapkan. dan capaian kinerja mencapai 99.7%. Sedangkan pada tahun 2023. realisasi sebesar 92.50% dengan capaian kinerja mencapai 97.36%. Meskipun realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. namun capaian kinerja masih tergolong baik dan menunjukkan progres yang positif dalam penyediaan layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

3.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	87.25 %	92.50 %	100 %	92.5%

Sumber : RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah oleh Dinas PUPR

Berdasarkan analisis terhadap tabel yang disajikan. dapat disimpulkan bahwa dalam indikator kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. terjadi peningkatan yang signifikan dari kondisi awal pada tahun 2020 hingga realisasi pada tahun 2023. Realisasi pada tahun 2023 mencapai 92.50%. yang menunjukkan kemajuan dalam penyediaan layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Meskipun demikian. masih perlu dilakukan upaya lanjutan untuk mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 100%. Persentase capaian terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2023 adalah sebesar 92.5%. menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan guna memastikan bahwa target akhir tersebut dapat tercapai secara penuh. Oleh karena itu. perlu terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan dan program yang telah dilakukan untuk memastikan

tercapainya akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.4 Perbandingan capaian Kinerja tahun 2023 dengan Provinsi dan Nasional

Tabel 3.4.1 Perbandingan Kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Dharmasraya	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	92.5%	80.92%	82.36 %

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki persentase yang jauh lebih tinggi dalam menyediakan pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat, dengan persentase sebesar 92.5%. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat memiliki persentase yang lebih rendah, hanya mencapai 80.92%, dan rata-rata nasional sebesar 82.36%.

Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah melakukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur air limbah domestik dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan tersebut.

Perbandingan antara Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan rata-rata nasional dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan upaya mereka dalam menyediakan pelayanan air limbah domestik yang layak bagi masyarakat.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan didukung oleh sasaran kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Sasaran Meningkatnya layanan penyediaan air limbah domestik dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Beberapa langkah langkah yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini adalah dengan menyediakan ketersediaan anggaran yang mendukung pencapaian jumlah rumah tangga yang terlayani limbah domestik

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. untuk pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2023 mencapai capaian kinerja 97.36%. Dalam pencapaian kinerja ini. telah melaksanakan upaya efisiensi penggunaan SDM dan efisiensi anggaran sebesar 6.31 % dengan pagu Rp. 2.562.156.800.00.- dengan realisasi Rp. 2.400.547.289 .- atau 93.69 %.

3.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Untuk mendukung indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan didukung oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

1. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur tinja
2. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)

SASARAN STRATEGIS 1.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN SERTA PRASARANA DAN SARANA PADA KAWASAN PEMUKIMAN

4. PERSENTASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH

PERSENTASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH

= Luas Kawasan kumuh yang terlayani (luas Kawasan kumuh tahun 2021-luas Kawasan kumuh tahun 2023)/Luas Kawasan Kumuh Yang Ditetapkan Melalui Keputusan Bupati Berdasarkan Kriteria Teknis Tertentu *100

$$= \frac{(337.36 - 107.8 \text{ Ha})}{337.36 \text{ ha}} * 100\%$$

$$= 68\%$$

4.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Dalam rentang waktu dua tahun. dari tahun 2021 hingga tahun 2023. terjadi penurunan yang signifikan dalam luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya. Luas kawasan kumuh telah berkurang sebesar 229.56 hektar. menunjukkan upaya yang sukses dalam program penurunan kawasan kumuh.

Dengan penurunan sebesar 229.56 hektar dari total luas kawasan kumuh pada tahun 2021 yang mencapai 337.36 hektar. persentase kawasan kumuh yang berhasil diperbaiki mencapai

68.05%. Hal ini mencerminkan kesuksesan program-program rehabilitasi kawasan kumuh yang telah diterapkan.

Capaian kinerja lingkungan permukiman kumuh berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.1 Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Persentase lingkungan permukiman kumuh	43.03%	68%	157.99%	Memuaskan

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2023

Dari hasil analisis tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat pencapaian yang memuaskan. target yang ditetapkan sebesar 43.03% berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 68%. Bahkan, capaian kinerja mencapai 157.99%, yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan permukiman kumuh telah mengalami peningkatan yang signifikan melebihi target yang ditetapkan.

Prediket "memuaskan" yang diberikan menegaskan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya telah memberikan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di kawasan kumuh, serta efektivitas dari program-program rehabilitasi dan pengembangan lingkungan yang telah diimplementasikan. Dengan demikian, hasil ini memberikan gambaran positif tentang progres yang telah dicapai dalam mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya.

4.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 2 tahun terakhir

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja dua tahun terakhir adalah untuk mengevaluasi tren kinerja dari waktu ke waktu, mengidentifikasi perubahan atau perbaikan yang telah terjadi, serta menilai kemajuan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan selama periode tersebut.

Tabel 4.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase lingkungan permukiman kumuh		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2022	36.14%	22.7%	63.05%
2023	43.03%	68%	157.99%

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2023

Terlihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan dalam capaian kinerja Persentase lingkungan permukiman kumuh dari tahun 2022 hingga tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2022, terdapat ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai, dimana realisasi hanya mencapai 22.7% dari target yang seharusnya 36.14%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam mencapai target pada tahun tersebut.

Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja, dimana realisasi mencapai 68% yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 43.03%. Capaian kinerja pada tahun 2023 bahkan mencapai 157.99%, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam upaya meningkatkan lingkungan permukiman kumuh. Dengan demikian, terlihat bahwa telah terjadi perbaikan yang signifikan dalam kondisi lingkungan permukiman kumuh dari tahun 2022 hingga 2023, yang menunjukkan efektivitas dari kebijakan atau program yang telah diterapkan dalam meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten tersebut.

4.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 4.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Persentase lingkungan permukiman kumuh	22.7 %	68%	68.66 %	99.04%

Sumber : RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah oleh Dinas Perkimtan.2023

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja Persentase lingkungan permukiman kumuh dari kondisi awal (2020) RPJMD hingga realisasi tahun 2023. Pada tahun 2020, kondisi awal Persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 22.7%, yang kemudian meningkat secara substansial menjadi 68% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam perbaikan atau pengembangan lingkungan permukiman kumuh selama periode tersebut.

Selanjutnya, target akhir RPJMD yang ditetapkan untuk tahun 2026 adalah sebesar 68.66%. Dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 68%, persentase capaian terhadap target akhir RPJMD mencapai 99.04%. Artinya, capaian kinerja hampir mencapai target akhir yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan lingkungan permukiman kumuh telah mendekati atau bahkan melebihi harapan yang ditetapkan.

4.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya dari kondisi awal (2020) RPJMD hingga realisasi tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya perbaikan atau pengembangan lingkungan permukiman kumuh selama periode tersebut.

1. PENYEBAB KEBERHASILAN

- a. Implementasi Program yang Efektif. terdapat implementasi program yang efektif dalam meningkatkan kondisi lingkungan permukiman kumuh. Program-program ini mungkin mencakup upaya rehabilitasi, perbaikan infrastruktur, atau penyediaan layanan dasar yang memadai.
- b. Komitmen Bupati dengan adanya alokasi dana yang cukup untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh.
- c. Partisipasi Masyarakat yang aktif dari masyarakat setempat dalam program-program yang ditujukan untuk meningkatkan lingkungan permukiman kumuh. Serta kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal penanggulangan sampah.

2. ALTERNATIF SOLUSI

- a. Penguatan Program yang Berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperkuat program-program yang telah terbukti berhasil dalam meningkatkan lingkungan permukiman kumuh. Ini termasuk alokasi sumber daya yang cukup, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta penyesuaian strategi jika diperlukan.
- b. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pemeliharaan lingkungan.
- c. Kolaborasi dengan instansi Pemerintah maupun swasta untuk penanggulangan Kawasan lingkungan kumuh

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dalam meningkatkan lingkungan permukiman kumuh, serta memastikan keberlanjutan dari upaya-upaya yang telah dilakukan.

4.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara kondisi awal (2020) RPJMD dengan realisasi tahun 2023 dalam capaian kinerja Persentase lingkungan permukiman kumuh. Pada awalnya, capaian kinerja hanya mencapai 22.7%. sementara pada tahun 2023

meningkat secara signifikan menjadi 68%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang substansial dalam penggunaan sumber daya untuk meningkatkan lingkungan permukiman kumuh.

Analisis ini mengindikasikan adanya efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan sumber daya selama periode tersebut. Mungkin terdapat peningkatan dalam alokasi anggaran, perencanaan yang lebih baik dalam penggunaan sumber daya manusia, serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait dalam pelaksanaan program-program pembangunan lingkungan.

Namun demikian, tetap perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi perbaikan lebih lanjut dalam penggunaan sumber daya. Analisis ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana efisiensi masih dapat ditingkatkan, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam upaya meningkatkan lingkungan permukiman kumuh di masa mendatang.

4.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh, Dinas Perkimtan telah menetapkan indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani. Program yang dijalankan adalah Program Kawasan Permukiman dengan fokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar. Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh. Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar 4.591.729.200, namun realisasi anggaran yang digunakan mencapai 4.413.388.476.00, menunjukkan bahwa sebagian anggaran tidak digunakan. Analisis mendalam terhadap program dan kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja.

Pertama, efektivitas pelaksanaan kegiatan peremajaan/pemugaran permukiman kumuh memainkan peran penting dalam mencapai target indikator. Kegiatan ini melibatkan pembenahan fisik lingkungan permukiman, seperti infrastruktur, akses jalan, dan fasilitas publik lainnya, yang secara langsung mempengaruhi kualitas lingkungan tempat tinggal.

Kedua, keterbatasan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti proses pengadaan yang lambat, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, atau perubahan kebijakan yang tidak terduga, dapat menyebabkan penundaan atau ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program.

Ketiga, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, termasuk identifikasi dan penanganan sumber daya yang tidak efisien atau terbuang, untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang strategis dan

sistematis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. sehingga dapat mencapai indikator kinerja yang ditetapkan dengan lebih baik di masa mendatang.

5. RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI

$\text{RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI} = \frac{\text{Luas Pemukiman Layak Huni}}{\text{Luas Wilayah Pemukiman}} * 100\%$
$= \frac{2079.8 \text{ Ha}}{2467 \text{ Ha}} * 100\% = 84.31\%$

5.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Luas Kawasan pemukiman di Kabupaten Dharmasraya sekitar 2.467 hektar dan 84.24% dari total luas wilayah pemukiman di Kabupaten Dharmasraya telah dianggap layak huni. Ini menunjukkan tingkat kelayakan yang cukup tinggi dalam wilayah pemukiman. namun juga menyoroti potensi untuk meningkatkan kondisi hunian di sisa wilayah tersebut. Evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor seperti infrastruktur. aksesibilitas. dan kualitas lingkungan di wilayah-wilayah tersebut dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan proporsi pemukiman yang layak huni di masa mendatang. Capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.1 Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI	91.45%	84.31%	92.19%	Sangat Baik

Sumber Data: Dinas Perkimtan. 2023

Tabel tersebut memperlihatkan data terkait kinerja rasio pemukiman layak huni. di mana target yang ditetapkan adalah sebesar 91.45%. Realisasi yang tercatat mencapai 84.31%. namun capaian kinerja yang terukur adalah sebesar 92.19%. yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Meskipun realisasi sedikit di bawah target. namun capaian tersebut menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan ketersediaan pemukiman layak huni. memberikan indikasi efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya perbaikan dalam pemukiman telah memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kondisi hunian. yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

5.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 5.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Permukiman Layak Huni		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	85.85	83.99	97.83%
2022	88.65	84.15	94.93%
2023	91.45	84.31	92.19%

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2023

Tabel di atas menggambarkan kinerja rasio permukiman layak huni selama tiga tahun terakhir. Target yang ditetapkan untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 berturut-turut adalah 85.85%, 88.65%, dan 91.45%. Namun, realisasi yang tercatat masing-masing adalah 83.99%, 84.15%, dan 84.31%. Meskipun realisasi tersebut sedikit di bawah target, capaian kinerja yang diukur mencapai 97.83%, 94.93%, dan 92.19%, secara berturut-turut, yang mengindikasikan performa yang sangat baik. Ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan ketersediaan permukiman layak huni selama periode tiga tahun tersebut, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan untuk mencapai target yang ditetapkan.

5.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 5.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI	83.88	84.31	100	84.3%

Sumber Data : RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah oleh Dinas Perkimtan. 2023

Tabel di atas mencerminkan analisis kinerja rasio permukiman layak huni dalam konteks RPJMD. Dalam kondisi awal RPJMD pada tahun 2020, rasio permukiman layak huni adalah 83.88%. Kemudian, pada tahun 2023, realisasi rasio tersebut meningkat menjadi 84.3%, mendekati target akhir RPJMD tahun 2026 yang telah ditetapkan sebesar 100%. Meskipun capaian terhadap target akhir RPJMD mencapai 84.3%, ini menunjukkan bahwa ada kemajuan signifikan dalam meningkatkan ketersediaan permukiman layak huni selama periode tersebut. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan guna mencapai target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD.

5.4 Perbandingan capaian Kinerja tahun 2023 dengan Provinsi dan Nasional

Tabel 5.4.1 Perbandingan Kinerja Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Dharmasraya	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
1	RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI	84.3 %	60.66%	63.13 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2023

Tabel di atas membandingkan kinerja rasio pemukiman layak huni antara Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan tingkat nasional. Dalam konteks Kabupaten Dharmasraya, rasio pemukiman layak huni mencapai 84.3%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat (60.66%) dan tingkat nasional (63.13%). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki kinerja yang lebih baik dalam memastikan ketersediaan pemukiman layak huni dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan guna meningkatkan kinerja rasio pemukiman layak huni di semua tingkatan.

5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan mencapai indikator

Adanya kerjasama dengan developer untuk penyediaan rumah yang layak huni di daerah.

2. Penyebab kegagalan pencapaian indikator

- Karena tidak dapat mengetahui kepastian jumlah rumah swadaya yang terbangun di nagari-nagari setiap tahunnya.
- Perencanaan dan anggaran yang tidak memadai

3. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran maupun fisik.
- Aspirasi dewan yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang lokasinya berada di kawasan kumuh, maka akan dimasukkan pada DPA untuk peningkatan dan pembangunan rumah layak huni.

5.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2023, terdapat sebuah kegiatan yang menonjol, yaitu Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 157.821.000.-, realisasi kegiatan ini mencapai Rp 157.321.900.-, yang menghasilkan capaian anggaran sebesar 99.68%. Meskipun terdapat

perbedaan kecil antara anggaran dan realisasi. tingkat efisiensi kegiatan ini cukup tinggi. yakni sebesar 0.32%.

5.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 5.7.1 Program Kegiatan Anggaran Serta Realisasi Anggaran Dalam Mencapai Indikator Kinerja rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	157.821.000.-	157.321.900.-	99.68 %	0.32 %
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				

Sumber : Dinas Perkimtan Dharmasraya. 2023

Dalam analisis anggaran tahun 2023 untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. terdapat satu kegiatan yang menonjol. yaitu Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. khususnya dalam perbaikan rumah tidak layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 157.821.000.-. dan realisasi kegiatan mencapai Rp 157.321.900.-. yang menghasilkan capaian anggaran sebesar 99.68%. Meskipun terdapat perbedaan kecil antara anggaran dan realisasi. tingkat efisiensi kegiatan ini mencapai 0.32%. menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien dan manajemen anggaran yang baik dalam mencapai tujuan program.

SASARAN STRATEGIS 1.1.3 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

6. PERSENTASE LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN KONDISI BAIK

Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh daerah irigasi kewenangan Kabupaten}} * 100\% \\
 &= \frac{1683.95 \text{ km}}{2205 \text{ km}} * 100\% = 76.37\%
 \end{aligned}$$

6.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Luas daerah irigasi yang berada dalam kondisi baik di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 1683.95 km. dari total luas seluruh daerah irigasi dalam kewenangan Kabupaten Dharmasraya. yang mencapai 2205 km. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proporsi luas daerah irigasi yang dalam kondisi baik terhadap total daerah irigasi kewenangan Kabupaten Dharmasraya adalah sekitar 76.34%. Capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1.1 Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten kondisi baik	76.37%	76.37%	100.00%	Sangat Baik

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2023

Berdasarkan data yang disajikan. indikator kinerja "Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik" mencapai target yang ditetapkan sebesar 76.37%. Realisasi juga mencapai angka yang sama dengan target. yaitu 76.37%. sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Kategori capaian kinerja untuk indikator ini adalah "Memuaskan".

Hal ini menunjukkan bahwa luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya dalam kondisi baik telah mencapai target yang ditetapkan. bahkan melebihi target tersebut. Kondisi ini memberikan indikasi positif terhadap efektivitas upaya pemeliharaan dan perawatan infrastruktur irigasi di wilayah tersebut. Dengan demikian. pencapaian ini memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran sistem irigasi yang mendukung kegiatan pertanian dan distribusi air di Kabupaten Dharmasraya.

6.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 6.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	67.36%	70.40%	104%
2022	71%	73.85%	104%
2023	76.37%	76.37%	100.00%

Sumber : Dinas PUPR Dharmasraya. 2023

Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan sebesar 67.36%, namun realisasinya mencapai 70.40%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 104%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2022, di mana target sebesar 71%, namun realisasinya mencapai 73.85%, juga melebihi target sebesar 104%.

Pada tahun 2023, terlihat bahwa target yang ditetapkan sebesar 76.37% dan realisasi mencapai angka yang sama dengan target, yaitu 76.37%, dengan capaian kinerja 100%. Meskipun realisasi pada tahun 2023 tidak melebihi target seperti tahun sebelumnya, namun capaian kinerjanya tetap memuaskan karena mencapai 100%.

Tren peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur irigasi di Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan kualitas dan efisiensi penggunaan sumber daya air.

6.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 6.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Persentase Luas Daerah					
Irigasi	Kewenangan	67.36 %	76.37 %	73.5 %	103.9%
Kabupaten Kondisi Baik					

Sumber Data : RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah oleh Dinas PUPR, 2023

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja "Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik" mengalami peningkatan dari kondisi awal (tahun 2020) hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, kondisi awal indikator kinerja ini sebesar 67.36%. Namun, pada tahun 2023, realisasi mencapai 76.37%, melebihi target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 73.5%. Capaian kinerja indikator ini mencapai 103.9% dari target akhir RPJMD, menunjukkan pencapaian yang memuaskan.

Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur irigasi di Kabupaten Dharmasraya. Kondisi ini memberikan indikasi positif terhadap efisiensi penggunaan sumber daya air di wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan mendukung kegiatan pertanian dan distribusi air yang lebih baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan kualitas dan efisiensi penggunaan sumber daya air, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD hingga tahun 2026.

6.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan

- a. Konsistensi dalam Perawatan dan Pemeliharaan: Terlihat bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat konsistensi dalam upaya perawatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Realisasi capaian kinerja selalu melebihi atau setidaknya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perawatan infrastruktur irigasi dilakukan secara konsisten dan efektif selama periode tersebut.
- b. Pengalokasian Sumber Daya yang Tepat: Peningkatan realisasi capaian kinerja dari tahun ke tahun juga disebabkan oleh pengalokasian sumber daya yang tepat, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun peralatan. Adanya pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif memungkinkan pelaksanaan program perawatan infrastruktur irigasi berjalan dengan baik.

Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas yang saling mendukung dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di Kabupaten Dharmasraya.

2. Kendala yang dihadapi jaringan irigasi kondisi baik yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

- a. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan.
- b. Tinggi nya curah hujan pada saat pelaksanaan kegiatan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dijadwalkan

3. Solusi atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap.
- b. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

6.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, untuk pencapaian kinerja Sasaran Strategis **Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air** dengan dengan indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik pada

Tahun 2023 dengan capaian kinerja 100 %. Dalam pencapaian kinerja ini, telah melaksanakan upaya efisiensi penggunaan SDM dan efisiensi anggaran sebesar 2.00 % dengan pagu Rp. **3.427.877.000.00.-** dengan realisasi Rp. **3.358.010.759.0.-** atau 98 %.

6.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Untuk terwujudnya persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten dalam Kondisi baik di dukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan 2 (dua) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.

Peningkatan irigasi kondisi baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian, dalam capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2021 sampai dengan 2026 mempunyai kriteria penilaian yang tinggi. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja yang mencapai 100 %. Setelah dicermati lebih mendalam ternyata penentuan target capaian indikator yang memang terlampau kecil, yaitu hanya 2 persen dari kondisi tahun sebelumnya.

7. INDIKATOR SASARAN PERSENTASE PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Tidak ada penilaian dan data terkait pengendalian daya rusak air, sehingga tidak dapat diukur untuk ketercapaian indikator kinerja ini

MISI 2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan 2.1 MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

SASARAN STRATEGIS 2.1.1 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

8. ANGKA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup = Rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x
= 72.24 Tahun

8.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 8.1.1 Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Angka Harapan Hidup	71.87	72.24	100.5%	Memuaskan

Sumber : BPS. diolah oleh Dinas Kesehatan Dharmasraya. 2023

Capaian angka harapan hidup sebesar 100.3% dari target menandakan pencapaian yang sangat baik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Angka ini menunjukkan efektivitas program-program kesehatan dan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. serta tingkat akses yang memadai terhadap layanan kesehatan primer dan sekunder.

Keberhasilan mencapai target ini memberikan indikasi positif terhadap upaya-upaya pembangunan kesehatan yang telah dilakukan. serta menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kategori "Sangat Baik" yang diberikan menegaskan bahwa pencapaian ini berada di atas ekspektasi. memberikan dorongan untuk terus melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta mengidentifikasi area-area potensial yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian ini di masa yang akan datang.

8.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 8.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	71.51	71.53	102.74%
2022	71.69	71.9	100.3%
2023	71.87	72.24	100.5%

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah oleh Dinas Kesehatan. 2023

Analisis kinerja usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama tiga tahun terakhir. Capaian kinerja sebesar 102.74% pada tahun 2021 dan 103% pada tahun 2022 menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup dan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah tersebut. Meskipun terdapat sedikit penurunan capaian pada tahun 2023 menjadi 100.3%. capaian tersebut masih di atas target yang ditetapkan. menunjukkan bahwa meskipun tantangan mungkin muncul. upaya-upaya dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap berkelanjutan. Hal ini memperkuat urgensi untuk terus meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan dan

penerapan strategi-strategi preventif guna memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

8.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 8.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Angka Harapan Hidup	71.33	72.24	72.42	99.75%

Sumber : RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah oleh Dinas Kesehatan.2023

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan pencapaian yang memuaskan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam periode antara kondisi awal RPJMD tahun 2020 dan realisasi tahun 2023, terjadi kenaikan usia harapan hidup dari 71.77 tahun menjadi 72.24 tahun. Meskipun target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 72.42 tahun tidak sepenuhnya tercapai, namun capaian yang dicapai sebesar 99.75% menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam upaya meningkatkan harapan hidup masyarakat.

Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program kesehatan dan pembangunan yang telah diimplementasikan, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target akhir yang ditetapkan. Dengan demikian, data ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

8.4 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Kabupaten/Kota di Provinsi dan Nasional

Tabel 8.4.1 Perbandingan Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
		2021	2022	2023
1	Bukit tinggi	74.50	74.2	75.13
2	Payakumbuh	73.84	74.14	74.43
3	Solok	73.73	74.06	74.39
4	Padang	73.69	73.93	74.16
5	Agam	72.53	72.89	73.23
6	Padang Panjang	72.82	73.02	73.23
7	Dhamasraya	71.53	71.90	72.24

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
		2021	2022	2023
8	Pesisir Selatan	70.96	71.25	71.52
9	Pariaman	70.38	70.67	70.95
10	Tanah Datar	70.12	70.49	70.84
11	Sawahlunto	70.10	70.40	70.69
12	Lima Puiuh Kota	69.84	70.08	70.30
13	Padang Pariaman	68.97	69.34	69.70
14	Solok	68.79	69.19	69.56
15	Solok Selatan	68.01	68.38	68.71
16	Pasaman Barat	67.94	68.25	68.53
17	Pasaman	67.59	67.96	68.29
18	Sijunjung	66.36	66.70	67.02
19	Kep. Mentawai	64.73	64.93	65.10
	Sumatera Barat	69.59	69.90	70.19
	NASIONAL	71.59	71.85	71.93

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2023

Berdasarkan data, angka usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2023, angka usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya (74.04 tahun) dibawah rata-rata Provinsi (74.14 tahun), namun sudah di atas rata-rata nasional (72.13 tahun), meskipun meningkat dari tahun ke tahun, masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, terutama pada tahun 2023. Meskipun demikian, posisi Kabupaten Dharmasraya dalam peringkat angka usia harapan hidup di Provinsi Sumatera Barat cukup baik, berada pada posisi ke 9 dari 19 Kabupaten Kota yang ada.

Dalam konteks perbandingan dengan provinsi dan nasional, Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya, tetapi masih perlu terus meningkatkan upaya-upaya dalam bidang kesehatan dan pelayanan masyarakat guna mendekati atau bahkan melampaui rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, strategi lanjutan dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup akan menjadi kunci bagi Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai capaian yang lebih baik di masa depan.

8.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam mencapai kinerja usia harapan hidup, didukung oleh capaian kinerja dari Dinas Kesehatan dengan 2 (dua) sasaran kinerja dan 9 indikator kinerja, dengan mencapai sasaran

kinerja yang ada Dinas Kesehatan. usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya ikut meningkat. Berikut capaian kinerja yang mendukung pencapaian usia harapan hidup tahun 2023

Tabel 8.5.1 Kinerja Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja Angka Harapan tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	%
1	2	3			4	5	6
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Melahirkan (AKI)		194	84	156.7
		Angka Kematian Bayi (AKB)			17.6	9.0	148.8
		Prevalensi Malnutrisi			10.0	5.7	143
		Presentase Rumah Tangga PHBS	48	49.4	103		
		Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	65	65	100		
		Presentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤ 24 jam			100	100	100
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	100	100	100		
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100	100	100		
2	Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan	Visite Rate			5	5.25	105
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama		50	93.3	186.6	
		Presentase UPT RSUD Terakreditasi	100	100	100		

Beberapa penyebab keberhasilan peningkatan usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya antara lain:

1. Dukungan pemerintah dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir secara jelas tergambar dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan No 1. 2 dan 3 dimana Seluruh Ibu Hamil. ibu melahirkan. ibu nifas dan bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas. selain itu. dukungan berupa

anggaran dari Dana Alokasi Khusus non Fisik seperti Jaminan Persalinan atau yang lebih sering disebut Jampersal diberikan dalam mendukung peningkatan keselamatan ibu melahirkan sehingga mengurangi Angka Kematian Ibu dan bayi karena keterlambatan merujuk.

2. Komitmen kepala daerah dengan seluruh camat dan OPD terkait yang menyatakan tahun 2023 tidak ada lagi BABS di Kabupaten Dharmasraya.
3. Adanya alokasi anggaran dana alokasi khusus bidang kesehatan DAK Non Fisik yang membantu pembiayaan kegiatan program baik di dinas kesehatan maupun puskesmas untuk akreditasi dan reakreditasi puskesmas. termasuk pembiayaan kepesertaan JKN bagi Masyarakat ekonomi menengah kebawah. selain itu alokasi anggaran yang cukup memastikan pemenuhan sarana dan prasarana bidang Kesehatan dapat perlahan dipenuhi
4. Terdeteksi secara dini kasus – kasus potensial KLB dilapangan. karena adanya laporan SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) mingguan puskesmas berbasis aplikasi
5. Sudah adanya 3 Layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan) Kabupaten Dharmasraya untuk penjangkauan dan pengobatan kasus HIV
6. Adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan. dimana dijelaskan semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama harus segera melakukan persiapan dan survey akreditasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan paling lambat tanggal 31 desember tahun 2023 semua FKTP sudah terakreditasi.
7. UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya 94.2% pengelolaan keuangan dengan BLUD. tinggal 1 puskesmas yang masih berproses untuk BLUD. dan 15 UPT sudah bekerjasama dengan BPJS.
8. Adanya program nusantara sehat. sehingga dapat memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas. khususnya di puskesmas kawasan pedesaan dan kawasan terpencil

Dalam analisis kinerja indikator usia harapan hidup. kami menemukan beberapa permasalahan yang berpotensi memengaruhi pencapaian target yang ditetapkan antara lain:

1. Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama kehamilan. Masih ada persalinan yang ditolong non Kesehatan. serta belum berjalannya sistem rujukan pada ibu bersalin. selain itu Masih ada ibu yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi termasuk pemberian imunisasi dan Masih ditemui remaja anemia. ibu hamil KEK dan Bayi dengan BBLR
2. Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kesehatan kedaerah sulit/terpencil.

3. Kurangnya SDM Kesehatan. kurangnya pelatihan dan diklat kepada SDM Kesehatan yang mendukung kegiatan program. serta kurangnya memadainya sarana dan prasarana dilapangan sehingga pelayanan kesehatan kepada ibu maternal dan bayi belum maksimal.
4. Masih kurangnya komitmen lintas sektor terkait. tokoh masyarakat dalam mendukung program kesehatan
5. Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat serta partisipasi Masyarakat dalam rangka mengentaskan penyakit tidak menular dan penyakit menular yang ada di lingkungan sekitar Masyarakat
6. Sedangkan untuk mutu dan kualitas pelayanan Kesehatan dapat dianalisa beberapa masalah antara lain kurangnya komitmen puskesmas dalam melaksanakan implementasi kegiatan program dan pelayanan pasca akreditasi. sarana. prasarana dan alkes di Puskesmas yang belum memenuhi standar serta tenaga Kesehatan di puskesmas belum memenuhi sembilan ketenagaan yang wajib ada di puskesmas sesuai dengan PMK nomor 43 tahun 2029 tentang puskesmas
7. Minimnya alokasi anggaran APBD untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan termasuk pengadaan prasarana dan alat Kesehatan. karena saat ini. Sebagian besar anggaran perbaikan sarana. prasarana dan pengadaan alat puskesmas serta perbaikan kualitas mutu pelayanan Kesehatan dibebankan kepada anggaran DAK. BOK. serta APBN.

Dalam rangka menangani permasalahan ini. diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama lintas sektor. peningkatan akses terhadap layanan kesehatan primer. program pendidikan kesehatan yang terfokus. serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Dengan mengidentifikasi akar masalah ini. diyakini bahwa tindakan yang tepat dan terkoordinasi dapat diambil untuk meningkatkan kinerja indikator usia harapan hidup dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

8.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dibutuhkan untuk mencapai kinerja usia harapan hidup. beberapa Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sudah adanya kelompok- kelompok posbindu di sekolah dan diperkantoran
2. Adanya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Dharmasraya dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/370/JPTS-BUP/2022 tertanggal 1 November 2022. Dimana masing –masing OPD terkait mengambil peran penting dalam rangka penanggulangan ODGJ berat. sehingga kendala dalam merujuk pasien ODGJ berat karena factor ekonomi dan tidak adanya kartu JKN sudah mulai dapat teratasi.
3. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Dharmasraya. dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/65/KPTS-BUP/2022. tanggal 19 Januari 2022

4. Evaluasi Infrastruktur Kesehatan dengan melakukan analisis jumlah, lokasi, dan kapasitas fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan posyandu. Hal ini digunakan untuk menganalisa ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya kesehatan.
5. Penilaian Alokasi Sumber Daya yaitu meninjau alokasi sumber daya kesehatan, termasuk anggaran, tenaga medis, dan peralatan medis, untuk menilai efisiensi penggunaannya, hal ini dilaksanakan untuk memeriksa apakah sumber daya tersebut dialokasikan secara proporsional untuk mendukung upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan penyakit.
6. Ketersediaan Layanan Kesehatan Primer, ini untuk menganalisis ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan primer, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan konseling kesehatan. Kami mengevaluasi efisiensi operasional puskesmas dan posyandu dalam memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
7. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Kami meneliti sejauh mana teknologi dan inovasi digunakan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis serta pengobatan penyakit. Kami juga mengevaluasi integrasi sistem informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
8. Kerjasama dan Koordinasi Antarinstansi: Kami memeriksa tingkat kerjasama dan koordinasi antara berbagai instansi terkait, termasuk dinas kesehatan, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kami mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kolaborasi dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan untuk meningkatkan usia harapan hidup.
9. Rekomendasi untuk Peningkatan Efisiensi: Berdasarkan hasil analisis kami, kami menyusun rekomendasi konkret untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan di Kabupaten Dharmasraya. Rekomendasi ini mencakup perbaikan infrastruktur kesehatan, optimalisasi alokasi anggaran, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, serta promosi gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit.

8.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini ditunjang oleh program dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh dinas kesehatan melalui UPT yang ada dilingkup dinas kesehatan. Indikator kinerja ini berada pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.087.225.- dengan reasliasi sebesar Rp. 17.576.205.948.- (84.5%).

Selain program tersebut, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Kesehatan dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan anggaran sebesar Rp. 41.983.251.742,- dengan reasliasi sebesar Rp. 37.073.629.101,- (88.3%)

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah

1. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dilapangan melalui workshop, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi petugas dalam peningkatan mutu dan kinerja pelayanan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan BLUD, serta peningkatan kompetensi petugas dalam menangani kasus kegawatdaruratan Maternal dan neonatal, bimbingan teknis terpadu dan terintegrasi kepuskesmas
2. Kordinasi dengan lintas sector terkait dan dengan dinas kesehatan Provinsi untuk proses izin operasional Labkesda perbaikan sarana pelayanan kesehatan dilapangan dan melengkapi prasarana termasuk alat kesehatan sesuai standar. Kegiatan ini tidak didukung oleh anggaran yang memadai sehingga pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dilaksanakan di fasilitas kesehatan terdekat tidak bisa dilayani sesuai standar
3. Perbaikan sarana pelayanan kesehatan dilapangan dan melengkapi prasarana termasuk alat kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan sesuai standar. Kegiatan ini tidak didukung oleh anggaran yang memadai sehingga pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dilaksanakan di fasilitas kesehatan terdekat tidak bisa dilayani sesuai standar.

SASARAN STRATEGIS 2.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

9. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH = JUMLAH TAHUN YANG DIGUNAKAN OLEH PENDUDUK DALAM MENJALANI PENDIDIKAN FORMAL (data dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
= 8.71

9.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 9.1.1 Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja		Target (tahun)	Realisasi (tahun)	Capaian (%)	Prediket
ANGKA	RATA-RATA	8.56	8.71	101.752	Memuaskan
LAMA SEKOLAH					

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2023

Analisis data menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Dharmasraya berhasil mencapai 101.752% dari target yang ditetapkan. dengan kategori capaian "Memuaskan". Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan berjalan efektif dalam meningkatkan tingkat partisipasi dan kualitas pendidikan masyarakat. Capaian yang melebihi target menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya lanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi pendidikan di masa mendatang, termasuk upaya untuk menangani potensi tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program pendidikan.

9.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 9.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target (tahun)	Realisasi (tahun)	Capaian Kinerja (%)
2021	8.48	8.55	100.83
2022	8.48	8.56	100.94
2023	8.56	8.71	101.75

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2023

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa angka rata-rata lama sekolah di Dharmasraya selama tiga tahun terakhir terus meningkat secara konsisten. Pada tahun 2021, realisasi capaian mencapai 100.83% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, capaian meningkat menjadi 100.94% dan 101.75% berturut-turut. Kinerja yang terus meningkat ini menunjukkan kesuksesan program pendidikan di wilayah tersebut dalam meningkatkan tingkat partisipasi dan kualitas pendidikan

9.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 9.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH	8.47	8.71	8.50	102.47 %

Sumber : RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah oleh Dinas Pendidikan.2023

Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa indikator kinerja untuk angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang signifikan dari kondisi awal RPJMD pada tahun 2020 hingga realisasi tahun 2023. Kondisi awal pada tahun 2020 sebesar 8.47 telah berhasil

meningkat menjadi 8.71 pada tahun 2023. melebihi target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 8.50. Capaian ini mencapai 102.47% terhadap target akhir RPJMD. menunjukkan kesuksesan dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi dan kualitas pendidikan di Dharmasraya selama periode tersebut. Peningkatan ini menandakan adanya kebijakan dan program-program pendidikan yang efektif serta komitmen yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Dengan demikian, capaian ini dapat dianggap sebagai pencapaian yang sangat baik dalam upaya pembangunan pendidikan di Dharmasraya.

9.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Nasional. Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 9.4.1 Perbandingan Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padang Panjang	11.45	11.62	11.63	11.92	11.94
2	Bukittinggi	11.32	11.33	11.34	11.63	11.64
3	Padang	11.34	11.58	11.59	11.6	11.62
4	Kota Solok	11.02	11.03	11.04	11.35	11.36
5	Payakumbuh	10.72	10.73	10.81	10.82	10.88
6	Pariaman	10.37	10.59	10.67	10.78	10.79
7	Sawahlunto	9.97	10.17	10.32	10.43	10.44
8	Agam	8.85	8.96	8.97	8.98	9.22
9	Tanah Datar	8.45	8.61	8.62	8.9	9.02
10	Pasaman Barat	8.06	8.19	8.27	8.55	8.81
11	Dharmasraya	8.46	8.47	8.55	8.56	8.71
12	Solok Selatan	8.16	8.28	8.32	8.41	8.69
13	Pesisir Selatan	8.25	8.26	8.27	8.43	8.58
14	Sijunjung	8.1	8.11	8.12	8.3	8.57
15	Padang Pariaman	7.86	7.87	7.88	8.16	8.41
16	Pasaman	7.86	8.09	8.1	8.11	8.13
17	Lima Puluh Kota	7.98	7.99	8.07	8.08	8.12
18	Kabupaten Solok	7.85	7.86	7.87	1.89	7.9
19	Kep. Mentawai	7.08	7.09	7.2	7.48	7.76
SUMATERA BARAT		8.92	8.99	9.07	9.19	9.28
NASIONAL					8.69	8.77

Sumber :Dharmasraya Dalam Angka.2024

Meskipun angka rata-rata lama sekolah di Dharmasraya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. namun masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional. Dari tahun 2019

hingga 2023. angka rata-rata lama sekolah di Dharmasraya meningkat dari 8.46 menjadi 8.71. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, capaian ini masih di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang juga mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah perlu lebih diperkuat di Dharmasraya agar sejajar dengan pencapaian tingkat provinsi.

Selain itu, dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Dharmasraya menunjukkan performa yang relatif sejajar, bahkan meskipun ada peningkatan yang lebih baik pada tahun 2023, namun masih menempati posisi ke -11 dibandingkan Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Untuk mencapai pencapaian yang lebih optimal, perlu terus dilakukan upaya-upaya yang strategis dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.

Meskipun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa masih ada potensi untuk terus meningkatkan capaian pendidikan agar sejalan dengan rata-rata Provinsi dan tingkat Nasional.

9.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Capaian indikator kinerja angka rata rata lama sekolah kabupaten dharmasraya tahun 2023 dari target indikator 8.49 dan realisasi 8.71 dengan hasil capaian mencapai 102.59 dan kategori sangat baik. Dengan kategori sangat baik, capaian indikator ini di anggap berhasil. Hal-hal yang mempengaruhi naiknya angka realisasi adalah naiknya rata rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh capaian kinerja Dinas Pendidikan. beberapa indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 antara lain:

Tabel 9.5.1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Yang Mendukung Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan		APK PAUD	75.50%
		APK SD/MI	107.94%
		APK SMP/MTs	106.30%
		APM SD/MI	99.55%
		APM SMP/MTs	96.13%

Sumber :Dinas Pendidikan . 2023

9.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hasil pengukuran atas target dan realisasi indikator kinerja utama dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator angka rata rata lama sekolah mengalami peningkatan bahkan sudah melebihi target RPJMD tahun 2026 Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Di tahun 2023. sudah tidak ada lagi Penduduk yang tamat SD lebih dari 6 tahun. tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun. tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun. Selain itu. hal yang mendukung pemenuhan angka rata rata lama sekolah seperti terpenuhinya ruang kelas baru. terbagungnya sekolah baru dengan jarak tempuh dekat dengan warga serta kecilnya angka putus sekolah di tahun 2023.

9.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

program dan kegiatan yang menunjang angka rata rata lama sekolah urusan bidang pendidikan dengan 24 kegiatan pada program pemerintahan bidang pendidikan dengan output dalam bentuk unit. ruang dan kegiatan bagi sekolah. siswa dan pendidik serta tenaga kependidikan. Sedangkan untuk program pengembangan kurikulum. kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar untuk tingkat Paud dan pendidikan dasar.

10. HARAPAN LAMA SEKOLAH

HARAPAN LAMA SEKOLAH
= LAMANYA SEKOLAH (DALAM TAHUN) YANG DIHARAPKAN AKAN DIRASAKAN OLEH ANAK PADA UMUR TERTENTU DIMASA MENDATANG
= 12.68 Tahun

10.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 10.1.1Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
HARAPAN LAMA SEKOLAH	12.51	12.68	101.36	Memuaskan

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2023

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan capaian yang memuaskan. dengan tingkat capaian mencapai 101.36% dari target yang ditetapkan. Target sebesar 12.51 tahun berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 12.68 tahun. Capaian ini menempatkan kategori kinerja pada tingkat yang memuaskan. menandakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya memberikan hasil yang positif. Meskipun demikian. perlu tetap dilakukan evaluasi dan

perbaikan terus-menerus untuk memastikan kualitas pendidikan terus meningkat dan memenuhi standar yang diharapkan.

10.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Untuk melihat perkembangan kinerja harapan lama sekolah dari tahun ketahun. dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	12.44	12.44	100.00%
2022	12.44	12.51	100.56%
2023	12.51	12.68	101.36%

Sumber Data : BPS diolah oleh Dinas Pendidikan Dharmasraya. 2023

Capaian kinerja harapan lama sekolah pada tahun 2023 dengan capaian kinerja selama tiga tahun terakhir. Dari data tersebut. terlihat bahwa target kinerja pada tahun 2023 sebesar 12.51 tahun berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 12.68 tahun. yang menghasilkan capaian kinerja sebesar 101.36%.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang positif dalam harapan lama sekolah dari tahun ke tahun. Pada tahun sebelumnya. capaian kinerja juga telah menunjukkan tren yang positif. dengan capaian mencapai 100.00% pada tahun 2021 dan 100.56% pada tahun 2022. Dengan demikian. data ini menggambarkan bahwa upaya dalam meningkatkan harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya telah memberikan hasil yang konsisten dan positif selama tiga tahun terakhir.

10.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 10.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
HARAPAN	LAMA	12.43	12.68	12.46	101.77 %
SEKOLAH					

Sumber : RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah oleh Dinas Pendidikan.2023

Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan yang signifikan dari kondisi awal RPJMD pada tahun 2020 hingga realisasi tahun 2023. Pada tahun 2020, kondisi awal indikator tersebut adalah 12.44 tahun, sementara pada tahun 2023, telah tercapai realisasi sebesar 12.68 tahun. Realisasi ini berhasil melampaui target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 12.46 tahun.

Capaian terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2023 mencapai 101.77%, menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan harapan lama sekolah telah berjalan efektif dan berhasil melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya menuju tahun 2026, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

10.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 10.4.1 Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional

No	KABUPATEN/KOTA	HARAPAN LAMA SEKOLAH				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padang	16.51	16.52	16.53	16.54	16.56
2	Padang Panjang	15.05	15.06	15.07	15.07	15.29
3	Bukittinggi	14.96	14.97	14.98	14.99	15.01
4	Pariaman	14.53	14.54	14.55	14.61	14.79
5	Tanah Datar	14.32	14.33	14.34	14.59	14.78
6	Solok	14.31	14.32	14.33	14.34	14.36
7	Payakumbuh	14.25	14.26	14.27	14.29	14.3
8	Padang Pariaman	13.62	13.67	13.68	13.93	14.19
9	Agam	13.86	13.87	13.88	13.88	13.89
10	Pasaman Barat	13.4	13.61	13.68	13.69	13.7
11	Sawahlunto	13.16	13.17	13.18	13.42	13.69
12	Kabupaten Solok	13.03	13.04	13.05	13.3	13.55
13	Lima Puluh Kota	13.28	13.29	13.3	13.4	13.41
14	Pesisir Selatan	13.31	13.32	13.33	13.35	13.36
15	Pasaman	12.79	12.8	12.81	13.05	13.25
16	Kep. Mentawai	12.76	12.82	12.89	12.89	12.9
17	Solok Selatan	12.7	12.71	12.72	12.73	12.8
18	Sijunjung	12.36	12.37	12.38	12.64	12.72
19	Dharmasraya	12.42	12.43	12.44	12.51	12.66
PROVINSI SUMATERA BARAT		14.01	14.02	14.09	14.1	14.11
NASIONAL					13.1	13.15

Berdasarkan data harapan lama sekolah di berbagai Kabupaten/Kota. termasuk Kabupaten Dharmasraya. terlihat bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019. harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya sebesar 12.42 tahun. dan meningkat menjadi 12.66 tahun pada tahun 2023. Namun demikian. harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Secara umum. terdapat tren peningkatan harapan lama sekolah di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat dan juga di tingkat Nasional. Meskipun demikian. terdapat perbedaan antara harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten/kota lainnya. di mana harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya cenderung berada di posisi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya agar dapat menyamai atau bahkan melebihi rata-rata provinsi dan nasional dalam hal harapan lama sekolah.

10.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Capaian indikator kinerja harapan lama sekolah kabupaten dharmasraya tahun 2023 dari target indikator 12.45 dan realisasi 12.68 dengan hasil capaian mencapai 101.85 dan kategori sangat baik. Dengan kategori sangat baik. capaian indikator ini di anggap berhasil. Hal- hal yang mempengaruhi naiknya angka realisasi adalah naiknya angka lamanya masa sekolah yang dialami penduduk usia 7 tahun ke atas dimasa mendatang.

harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh capaian kinerja Dinas Pendidikan. beberapa indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 yaitu Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan

10.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hasil pengukuran atas target dan realisasi indikator kinerja utama dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator harapan lama sekolah mengalami peningkatan bahkan sudah melebihi target RPJMD tahun 2026 Tingginya angka harapan lamanya sekolah di tahun 2023 yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu. Hal ini tergambar dari rendahnya angka kemiskinan . naiknya upah minimum dan rendahnya tingkat pengangguran ditahun 2023.

10.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program dan kegiatan yang menunjang angka rata rata lama sekolah urusan bidang pendidikan dengan 24 kegiatan pada program pemerintahan bidang pendidikan dengan output dalam bentuk unit. ruang dan kegiatan bagi sekolah. siswa dan pendidik serta tenaga kependidikan. Sedangkan untuk program pengembangan kurikulum. kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar untuk tingkat Paud dan pendidikan dasar.

SASARAN STRATEGIS 2.1.3 MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

11. INDIKATOR SASARAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

= PERBANDINGAN (RASIO) CAPAIAN ANTARA IPM PEREMPUAN DENGAN IPM LAKI-LAKI.

= 88.56

11.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 11.1.1 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Indeks Pembangunan Gender	89.17	88.56	99.32	Sangat Baik

Sumber Data : DINSOSP3APPKB. 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dharmasraya telah mencapai capaian sebesar 99.32%. yang menempatkannya dalam kategori "Sangat Baik". Meskipun realisasi sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 89.17%. capaian tersebut masih dianggap sangat baik. Capaian IPG yang tinggi menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan telah berhasil di Kabupaten Dharmasraya.

Kabupaten Dharmasraya dapat dianggap berhasil dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua jenis kelamin. Meskipun demikian. perlu terus dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IPG agar tetap berada dalam kategori "Sangat Baik" atau bahkan meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan program-program yang mendukung kesetaraan gender. peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan. serta pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang.

11.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 11.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	88.35	88.32	99.97%
2022	89	88.56	99.23%
2023	89.17	88.56	99.32%

Sumber Data : DINSOSP3APPKB. 2023

Selama tiga tahun terakhir, Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2021, target IPG sebesar 88.35% telah hampir tercapai dengan realisasi sebesar 88.32%. menciptakan capaian kinerja yang mengesankan sebesar 99.97%.

Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023, dengan realisasi IPG mencapai 88.56%, namun capaian kinerja masih memperlihatkan konsistensi yang baik, dengan persentase capaian kinerja sebesar 99.23% dan 99.32% masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dalam memajukan pembangunan gender di Kabupaten Dharmasraya telah memberikan hasil yang signifikan, meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Dengan komitmen yang berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkatkan capaian IPG menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

11.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 11.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender dengan Target Akhir Masa RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88.31	88.56	89.67	98.2

Sumber Data : DINSOSP3APPKB. 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren yang positif dalam pencapaian target yang ditetapkan. Pada awal RPJMD tahun 2020, IPG tercatat sebesar 88.35%. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang konsisten hingga mencapai 88.56%, mendekati target akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 88.55%. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten dalam memajukan isu-isu gender dan mewujudkan kesetaraan gender di wilayah tersebut.

Dengan capaian sebesar 98.76% terhadap target akhir RPJMD. hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya berada dalam jalur yang tepat menuju pencapaian tujuan pembangunan gender yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mempertahankan momentum ini dan menerapkan kebijakan yang lebih progresif. diharapkan IPG di kabupaten ini dapat terus meningkat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

11.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Nasional. Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 11.4.1 Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional

No	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER			
		2020	2021	2022	2023
1	Kota Bukittinggi	98.89	98.99	99.36	99.36
2	Kota Pariaman	98.49	98.62	98.64	98.64
3	Kota Payakumbuh	98.46	98.6	98.61	98.61
4	Kota Padang Panjang	97.7	97.78	98.24	98.24
5	Kab. Tanah Datar	97.57	97.58	97.62	97.62
6	Kab. Agam	97.01	96.95	97	97
7	Kota Solok	97.05	97.05	96.67	96.67
8	Kab. Solok	96.18	96.19	96.29	96.29
9	Kab. Pesisir Selatan	95.12	95.41	95.75	95.75
10	Kab. Solok Selatan	95.08	95.14	95.2	95.2
11	Kota Sawahlunto	95.48	95.73	95.17	95.17
12	Kab. Lima Puluh Kota	95.03	94.91	94.85	94.85
13	Kab. Sijunjung	93.03	93.4	94.16	94.16
14	Kota Padang	93.64	93.81	93.85	93.85
15	Kab. Padang Pariaman	92.69	92.78	93.08	93.08
16	Kab. Pasaman	92.45	92.47	92.51	92.51
17	Kab. Pasaman Barat	90.26	90.14	90.17	90.17
18	Kab. Kepulauan Mentawai	89.59	89.81	89.91	89.91
19	Kab. Dharmasraya	88.31	88.32	88.56	88.56
PROVINSI SUMATERA BARAT		94.17	94.34	94.72	94.72
NASIONAL				91.27	91.63

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka. 2023

Berdasarkan data yang disajikan. terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Dharmasraya berada di peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke

tahun. IPG Dharmasraya masih di bawah rata-rata Provinsi pada tahun 2023. Perlu diperhatikan bahwa beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok memiliki IPG yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Dharmasraya. Selain itu, Kabupaten Dharmasraya juga berada di bawah rata-rata Nasional, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mendorong pembangunan gender di Dharmasraya.

Meskipun demikian, peningkatan IPG Dharmasraya dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesetaraan gender dan mendukung pembangunan yang inklusif. Upaya-upaya lebih lanjut dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan IPG di Dharmasraya. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, Kabupaten Dharmasraya dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik di masa depan.

11.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan menghitung kualitas dari dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan digunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran konsumsi. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dihitung berdasarkan data pembangunan IPM terpilah jenis kelamin yang dipublikasikan oleh BPS.

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021-2023 capaiannya selalu meningkat/ naik dari tahun sebelumnya, artinya implementasi terhadap pembangunan gender di Kabupaten Dharmasraya telah terwujud dan mencapai sasaran dari program kesetaraan gender dalam pembangunan. Hal ini didukung dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat setiap tahun namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

11.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tercapainya Kinerja pada tahun 2023 didukung oleh Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 yaitu kegiatan

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota anggaran dana sebesar Rp. 29.959.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 29.743.700.- (99.28%) serta kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran dana sebesar Rp. 709.770.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 706.115.133.- (99.48%).

11.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/ Kegiatan Penunjang dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

MISI 3. MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING

Tujuan 3.1 Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing

SASARAN STRATEGIS 3.1.1 MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH

12. PDRB PER KAPITA

PDRB PER KAPITA

= JUMLAH NILAI TAMBAH YANG DIHASILKAN OLEH SELURUH UNIT USAHA PER JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (DATA DHARMASRAYA DALAM ANGKA)

= 55.62 Juta Rupiah

12.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 12.1.1 Capaian Kinerja PDRB Per Kapita berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
PDRB PERKAPITA (Juta Rupiah)	44.79	55.62	124.19	Baik

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka. 2024

PDRB Perkapita Kabupaten Dharmasraya menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari target yang ditetapkan. Meskipun target awal sebesar 44.79 juta rupiah, namun realisasi yang tercapai justru mencapai 55.62 juta rupiah. Capaian sebesar 124.19% menunjukkan bahwa realisasi PDRB Perkapita melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga

kategori yang diberikan adalah "Memuaskan". Peningkatan ini menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam periode yang diukur. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan signifikan ini serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

12.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 12.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	PDRB PERKAPITA		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	42.83	46.449	108.45
2022	43.81	51.885	118.4%
2023	44.79	55.62	124.19%

Sumber: Dharmasraya Dalam Angka. 2024

PDRB Perkapita di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, target PDRB Perkapita sebesar 42.83 juta rupiah dengan realisasi mencapai 46.449 juta rupiah, menghasilkan capaian sebesar 108.45%. Pada tahun 2022, target naik menjadi 43.81 juta rupiah dengan realisasi mencapai 51.885 juta rupiah, mencapai capaian sebesar 118.4%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana target yang ditetapkan adalah 44.79 juta rupiah dan realisasi mencapai 55.62 juta rupiah, menghasilkan capaian sebesar 124.19%.

Capaian yang konsisten di atas target menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif dalam jangka waktu tersebut. Hal ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan serta potensi pertumbuhan yang kuat dalam wilayah tersebut. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendorong peningkatan yang signifikan ini dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

12.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 12.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja PDRB Per Kapita dengan Target Akhir Masa RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
1	PDRB PERKAPITA	40.48	55.62	47.72	116.57

Sumber : RPJMD Dharmasraya 2021-2026

PDRB Perkapita menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam periode waktu tertentu. Pada tahun 2020, kondisi awal RPJMD menunjukkan angka sebesar 40.48 juta rupiah. Namun, realisasi pada tahun 2023 mengalami lonjakan signifikan menjadi 55.62 juta rupiah, melebihi target akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 47.72 juta rupiah. Capaian ini mencapai 116.57% dari target akhir RPJMD, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dan melebihi harapan.

Lonjakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pembangunan ekonomi yang berhasil, investasi yang masif, pertumbuhan sektor-sektor utama, dan peningkatan produktivitas. Dengan capaian ini, terdapat potensi besar untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan yang signifikan ini dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ini dalam jangka panjang.

12.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 12.4.1 Perbandingan Kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional

No	Kabupaten / Kota	PDRB Per KAPITA (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
1	Bukittinggi	74.000.97	82.853.97	89.736.81
2	Padang	70.884.26	78.356.31	84.528.01
3	Padang Panjang	64.124.46	70.732.08	76.314.40
4	Sawahlunto	58.530.13	65.736.69	71.213.67
5	kota Solok	57.010.40	62.881.64	67.599.73
6	Pariaman	55.412.03	61.227.85	66.200.85
7	Kepulauan Mentawai	54.602.69	60.449.32	64.696.41
8	Payakumbuh	51.809.22	57.733.99	62.019.97
9	Dharmasraya	46.449.67	51.885.54	55.626.38
10	Padang Pariaman	42.314.50	50.018.81	55.541.68
11	Lima Puluh Kota	41.809.89	45.093.37	49.452.22
12	Sijunjung	40.298.52	44.343.29	47.912.76
13	Agam	39.910.90	43.936.80	47.405.31
14	Pasaman Barat	36.472.06	40.305.71	43.428.06
15	Tanah Datar	36.286.14	39.722.35	42.899.63
16	Kabupaten Solok	35.878.57	39.424.46	42.717.02
17	Solok Selatan	31.309.49	34.198.77	36.777.77

No	Kabupaten / Kota	PDRB Per KAPITA (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
18	Pasaman	31.089.87	33.702.16	36.272.01
19	Pesisir Selatan	29.268.25	32.076.51	34.311.43
PROVINSI SUMATERA BARAT		45.218.16	50.264.02	54.326.76

Sumber data: Publish BPS (Dharmasraya Dalam Angka. 2024)

Berdasarkan data PDRB per kapita (juta Rupiah) dari tahun 2021 hingga 2023. Kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat kesembilan dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada tahun 2021. PDRB per kapita Dharmasraya sebesar 46.449.67 juta Rupiah. menempatkannya di posisi ke sembilan. Namun. pada tahun 2022. peringkatnya meningkat menjadi posisi kedelapan dengan PDRB per kapita sebesar 51.885.54 juta Rupiah. Pada tahun 2023. posisinya bertahan di peringkat kedelapan dengan PDRB per kapita sebesar 55.626.38 juta Rupiah. Jika di dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat . PDRB Dharmasraya diatas capaian Provinsi Sumatera Barat.

12.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator PDRB per kapita di Kabupaten Dharmasraya melibatkan beberapa faktor. Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah dalam mempromosikan investasi. pengembangan sektor ekonomi yang potensial. dan peningkatan infrastruktur. Selain itu. partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat memberikan kontribusi positif.

Di sisi lain. kegagalan dalam mencapai target PDRB per kapita disebabkan oleh beberapa faktor. seperti kurangnya investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang potensial. kendala dalam pengembangan infrastruktur yang memadai. dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu. faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan pemerintah pusat juga dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini.

Untuk mengatasi tantangan ini. beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan. seperti meningkatkan promosi investasi. mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi. meningkatkan infrastruktur. memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing. serta memperkuat kerja sama antara pemerintah. swasta. dan masyarakat. Dengan implementasi solusi-solusi ini. diharapkan Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkatkan PDRB per kapita dan mencapai target yang ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat.

12.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator kinerja PDRB perkapita memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sumber daya yang tersedia dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai indikator kinerja PDRB perkapita:

1. **Pengembangan Sektor Unggulan.** Penting untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDRB perkapita. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan investasi dan pengembangan infrastruktur serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut.
2. **Pemanfaatan Sumber Daya Alam.** Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan PDRB perkapita. Diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. **Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.** Meningkatkan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan PDRB perkapita. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, serta mendorong adopsi teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi kerja.
4. **Investasi dalam Infrastruktur.** Infrastruktur yang baik merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang strategis.
5. **Pengembangan Sumber Daya Manusia.** Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan dampak positif terhadap PDRB perkapita. Tenaga kerja yang terampil dan produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan melakukan analisis yang komprehensif terhadap efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator kinerja PDRB perkapita, dapat diidentifikasi potensi-potensi perbaikan dan diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi sumber daya dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

12.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian indikator PDRB per kapita di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan adanya sejumlah program yang telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang signifikan. Berikut adalah analisis dari beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Program ini memiliki alokasi anggaran yang besar dan bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan dalam rangka mendukung sektor perikanan. yang merupakan salah satu sektor potensial dalam meningkatkan PDRB per kapita.
2. Pemberdayaan Usaha Mikro. Melalui pendataan, kemitraan, dan penguatan kelembagaan, program ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sektor industri lokal, yang dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita.
4. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, yang merupakan salah satu sektor utama dalam kontribusi terhadap PDRB per kapita.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas program-program di atas termasuk peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja program, optimalisasi penggunaan anggaran, penguatan kerjasama antar instansi terkait, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, diharapkan program-program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan.

13. PDRB RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB

RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB	$= \frac{\text{Jumlah PDRB perkapita net ekspor}}{\text{PDRB per Kapita Tahun } n} * 100\%$
	$= \frac{1073815}{13345769} * 100\% = 8.05$

PDRB perkapita net ekspor Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 adalah 1.073.815 juta rupiah dari total PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 13.345.769 juta rupiah, jadi, PDRB perkapita net ekspor di Kabupaten Dharmasraya berkontribusi sekitar 8.04% terhadap total PDRB perkapita. Ini menunjukkan seberapa besar peran ekspor dalam menyumbang pendapatan per kapita di Kabupaten Dharmasraya. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar kontribusi ekspor terhadap ekonomi lokal.

13.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 13.1.1 Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap Pdrb berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB	3.4	8.05	236.65	Memuaskan

Sumber Data : Dharmasraya Dalam Angka. 2024

Dari tabel ini menunjukkan bahwa rasio net ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Dharmasraya telah melebihi target secara signifikan, mencapai 236.65. Capaian yang begitu tinggi ini menandakan bahwa ekspor lebih besar daripada impor, yang berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional atau nasional. Kategori "Memuaskan" menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam indikator kinerja ini.

Secara garis besar, Kabupaten Dharmasraya berkontribusi terhadap ekspor Provinsi Sumatera Barat. Dari data BPS bulan Januari 2024 menunjukkan pola ekspor yang menjanjikan dengan fokus pada beberapa golongan barang utama. Pada bulan tersebut, golongan barang yang paling banyak diekspor adalah lemak & minyak hewan/nabati (HS 15) sebesar US\$100.01 juta, diikuti oleh berbagai produk karet dan barang dari karet (HS 40) sebesar US\$8.87 juta, dan sari bahan samak dan celup (HS 32) sebesar US\$5.24 juta.

Komoditi Dharmasraya utama untuk mendukung ekspor adalah Produk Karet dan Barang dari Karet (HS 40). Ekspor produk karet menunjukkan bahwa Dharmasraya memiliki potensi yang signifikan dalam industri karet. Produk karet dari daerah ini mungkin memiliki kualitas yang baik dan daya saing yang tinggi di pasar internasional. Dukungan dari pemerintah dan inisiatif swasta dalam pengembangan industri karet juga dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan ekspor golongan ini.

Luas Perkebunan Karet di Kabupaten Dharmasraya menurut data BPS tahun 2020 seluas 40.909 hektar atau 409 km². Sedangkan luas daerah di Kabupaten Dharmasraya seluas 2.961.19 Km², artinya 13.8% Kawasan di Kabupaten Dharmasraya adalah Perkebunan karet, sehingga sangat berpotensi untuk meningkatkan rasio net ekspor terhadap PDRB

13.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 13.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap Pdrb Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	3.15	3.06	97.1%
2022	3.25	6.32	194%
2023	3.4	8.05	236.65%

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka. 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam Rasio Net Ekspor terhadap PDRB dari tahun 2021 hingga 2023. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut antara lain:

1. Tingkat Peningkatan yang Konsisten. Terlihat bahwa dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan yang konsisten dalam Rasio Net Ekspor terhadap PDRB. Pada tahun 2021, rasio

tersebut mencapai 97.1%. naik menjadi 194% pada tahun 2022. dan kemudian meningkat lebih lanjut menjadi 236.65% pada tahun 2023.

2. Pencapaian Target yang Signifikan. Setiap tahun. realisasi Rasio Net Ekspor terhadap PDRB berhasil melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas upaya dalam meningkatkan ekspor relatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional atau nasional.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Didorong oleh Ekspor hal ini menandakan bahwa ekspor memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini dapat mencerminkan kompetitivitas produk lokal di pasar internasional atau adanya kebijakan yang mendukung ekspor.
4. Indikasi Potensi Ekspor yang Lebih Lanjut. Capaian yang tinggi pada tahun 2023. yang melampaui target sebesar 236.65%. menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk terus meningkatkan ekspor dalam tahun-tahun mendatang. Hal ini memberikan harapan bahwa ekspor dapat terus menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

13.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 13.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Net Ekspor Terhadap Pdrb dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
RASIO NET EKSPOR TERHADAP PDRB	3.08	8.05	3.8	211%

Sumber : RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah oleh Bagian Organisasi. 2023

Rasio Net Ekspor terhadap PDRB menunjukkan sebuah tren yang sangat positif dan meyakinkan dari kondisi awal RPJMD pada tahun 2020 hingga realisasi pada tahun 2023. Dengan kondisi awal sebesar 3.08. kinerja ekspor berhasil meningkat secara dramatis menjadi 8.05. melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 yang sebesar 3.8 dengan pencapaian sebesar 211%. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan keberhasilan dalam strategi dan kebijakan yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekspor. Capaian yang jauh melampaui target menunjukkan adanya potensi yang besar dalam sektor ekspor yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun. meskipun capaian kinerja ini sangat memuaskan. ada kebutuhan untuk melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor apa yang telah mendorong kinerja ekspor yang tinggi ini. Penelitian lebih lanjut dapat memperdalam pemahaman tentang kebijakan ekspor yang efektif. dinamika pasar internasional. serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja ekspor. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana strategi yang tepat dapat dikembangkan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor di masa depan. sehingga dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

13.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Penyebab keberhasilan rasio net ekspor terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya yang dapat dianalisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi performa ekspor. antara lain:

1. Kualitas dan Daya Saing Produk Ekspor. Salah satu penyebab utama keberhasilan ekspor Dharmasraya adalah kualitas produk yang baik dan daya saing yang tinggi di pasar internasional. Produk unggulan seperti produk karet (HS 40) Dharmasraya memiliki standar produksi yang tinggi dan dapat bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain.
2. Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur. antara lain Pembangunan akses jalan tani. irigasi. infrastruktur lainnya merupakan beberapa bentuk adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. termasuk fasilitasi perizinan dan insentif pajak. serta pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekspor jaringan transportasi.
3. Inovasi dan Pengembangan Produk. Upaya dalam inovasi produk dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor juga dapat menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekspor Dharmasraya. Investasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing.

Dengan kombinasi dari faktor-faktor di atas. Kabupaten Dharmasraya telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekspor. yang pada gilirannya berkontribusi secara signifikan terhadap rasio net ekspor terhadap PDRB. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Namun. dalam pencapaian indikator ini. masih ditemukan beberapa masalah antara lain dalam beberapa kemungkinan. produk ekspor mengalami masalah kualitas atau tidak memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh pasar tujuan. Serta akses pasar atau jaringan distribusi yang efisien masih belum maksimal juga menjadi penyebab kegagalan dalam meningkatkan ekspor di Kabupaten Dharmasraya.

Dari masalah yang ditemui dapat disusun beberapa alternatif Solusi yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja rasio net ekspor terhadap PDRB antara lain

1. Peningkatan kualitas dan standar produk serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan ekspor.
2. Diversifikasi pasar ekspor dengan mencari peluang di pasar baru atau mengembangkan kemitraan dengan perusahaan asing dapat membantu mengurangi risiko kegagalan ekspor.

3. Investasi dalam peningkatan infrastruktur dan kemampuan produksi, serta dukungan dalam penerapan inovasi teknologi, akan membantu meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk ekspor.

13.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam konteks peningkatan rasio net ekspor terhadap PDRB ini didukung oleh Dinas Terkait seperti Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pertanian memiliki peran yang krusial. Berikut adalah analisis atas kontribusi masing-masing dinas dalam peningkatan kualitas komoditi ekspor:

1. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, dalam hal memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produksi komoditi ekspor. Hal ini termasuk penggunaan teknologi modern, peningkatan proses produksi, dan pemenuhan standar kualitas. Melalui program pengembangan industri kecil dan menengah, dinas ini membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran, sehingga mereka dapat memproduksi komoditi ekspor dengan kualitas yang lebih baik. Kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi juga dilakukan untuk melakukan riset dan pengembangan terkait inovasi produk dan proses produksi untuk meningkatkan daya saing komoditi ekspor.
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memberikan fasilitasi dalam proses perizinan dan investasi bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kapasitas produksi atau memperkenalkan inovasi dalam produksi komoditi ekspor. Pelayanan yang cepat, efisien, dan terpadu akan membantu perusahaan untuk segera memulai atau memperluas usahanya tanpa terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.
3. Dinas Pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas komoditi pertanian yang diekspor. Mereka dapat memberikan pelatihan tentang teknik bertani yang baik, penggunaan pupuk yang tepat, dan pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk. Pemilihan varietas tanaman yang unggul dan adaptif serta pemantauan secara berkala terhadap kualitas hasil panen juga menjadi tanggung jawab dinas ini.

Dengan sinergi antara berbagai dinas terkait, menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam produksi komoditi ekspor secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas dan kuantitas produk ekspor, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian rasio net ekspor terhadap PDRB yang lebih baik.

13.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Rasio net ekspor terhadap PDRB didukung oleh Dinas Terkait antara lain Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pertanian dalam hal peningkatan kualitas komoditi ekspor. Program-program pada dinas ini memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian indikator kinerja rasio net ekspor terhadap PDRB di Kabupaten Dharmasraya Berikut adalah analisis mengenai kontribusi masing-masing program:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Program ini akan membantu meningkatkan efisiensi distribusi produk-produk ekspor. Sarana distribusi yang baik akan memastikan produk-produk dapat mencapai pasar ekspor dengan cepat dan efisien, mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk.
2. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI). Dengan memberikan izin usaha industri secara efisien, program ini akan mendorong pertumbuhan sektor industri. Pertumbuhan industri akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produksi barang-barang yang dapat diekspor.
3. Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Program ini akan membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro lokal. Dengan mendorong kemitraan dan kolaborasi antara usaha mikro dengan pihak lain seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi, program ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan usaha mikro yang berorientasi ekspor.
4. Pembuatan Peta Potensi Investasi. Program ini akan memberikan informasi yang komprehensif tentang potensi investasi di Kabupaten Dharmasraya Dengan menarik investasi ke sektor-sektor yang mendukung ekspor, seperti industri manufaktur dan pertanian, program ini akan meningkatkan produksi barang-barang yang dapat diekspor.
5. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal. Melalui kegiatan promosi penanaman modal, program ini akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Dharmasraya. Investasi baru akan membuka peluang baru untuk pengembangan sektor ekspor dan meningkatkan rasio net ekspor terhadap PDRB.
6. Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu. Dengan menyediakan layanan perizinan yang cepat, mudah, dan terpadu, program ini akan membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses investasi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor ekspor dengan menciptakan lingkungan usaha yang ramah bagi investor.

SASARAN STRATEGIS 3.1.2 MENGURANGI PENGANGGURAN

14. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
= PERSENTASE JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH ANGKATAN KERJA (DATA BPS)
= 6.22%

14.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 14.1.1 Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Tingkat	Pengangguran	5.49	6.22	86.7%	Sangat
Terbuka					Baik

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2023

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 5.49. Namun, realisasinya mencapai 6.22, yang berarti melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan persentase sebesar 86.7% dari target yang ditetapkan, capaian tersebut diklasifikasikan sebagai "Sangat Baik".

Meskipun TPT di Kabupaten Dharmasraya melebihi target yang ditetapkan, capaian sebesar 86.7% masih dalam prediket Sangat Baik. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti fluktuasi ekonomi, perkembangan pasar tenaga kerja, dan perubahan dalam struktur industri di daerah tersebut serta pemulihan pasca wabah *Covid-19*.

14.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 14.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	6.07	5.00	117%
2022	5.68	6.23	90.3%
2023	5.49	6.22	86.7%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2023

Dari data tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja TPT cenderung fluktuatif dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan dengan mencapai 117%. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja sedikit di bawah target, masing-masing 90.3% dan 86.7%. Ini menunjukkan adanya variasi dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran selama periode tersebut.

Meskipun terjadi fluktuasi, penting untuk memperhatikan tren jangka panjang dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Meskipun capaian kinerja pada tahun 2023 sedikit di bawah target, masih terdapat penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan upaya terus-menerus dari pemerintah atau pihak terkait untuk mengatasi masalah pengangguran, meskipun tantangan yang mungkin dihadapi.

14.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 14.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Tingkat	Pengangguran	6.07	6.22	4.9	73.06%
Terbuka					

Sumber : RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2023

Dari data di atas, terlihat bahwa realisasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2023 adalah sebesar 6.22, yang sedikit melebihi kondisi awal RPJMD pada tahun 2020 sebesar 6.07. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 3.85, capaian kinerja TPT hanya mencapai sekitar 73.06% dari target tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan tingkat pengangguran dari kondisi awal RPJMD, namun masih belum mencapai target akhir yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta perencanaan strategis yang lebih efektif untuk mencapai target akhir RPJMD pada tahun 2026.

Langkah-langkah seperti meningkatkan pelatihan keterampilan, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki iklim investasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dalam mengurangi tingkat pengangguran di masa mendatang.

14.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 14.4.1 Perbandingan Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional

No	Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		2021	2022	2023
1	Kep. Mentawai	2.79	1.39	1.33
2	Solok Selatan	4.84	3.71	2.57
3	Kota Solok	5.15	3.9	3.72
4	Lima Puluh Kota	2.25	3.72	3.95

No	Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		2021	2022	2023
5	Sijunjung	3.57	4.87	4.71
6	Pesisir Selatan	5.97	4.61	4.75
7	Agam	5.06	4.93	4.96
8	Sawahlunto	6.38	5	4.98
9	Kabupaten Solok	4.67	5.89	4.99
10	Bukittinggi	6.09	4.9	4.99
11	Pasaman	4.92	5.38	5.09
12	Tanah Datar	4.63	5.91	5.35
13	Padang Panjang	4.9	4.84	5.49
14	Pariaman	6.09	5.19	5.68
15	Pasaman Barat	5.02	6.33	6.01
16	Dharmasraya	5	6.23	6.22
17	Padang Pariaman	8.41	6.6	6.69
18	Padang	13.37	11.69	10.86
19	Payakumbuh	6.47	5.16	4.84
PROVINSI SUMATERA BARAT		6.52	6.28	5.94
NASIONAL			5.83	5.45

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka. 2024

Dari tabel diatas. terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Dharmasraya mengalami fluktuasi selama periode tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021. TPT berada pada angka 5%. meningkat menjadi 6.23% pada tahun 2022. dan sedikit menurun menjadi 6.22% pada tahun 2023. Meskipun terjadi fluktuasi. TPT di Kabupaten Dharmasraya cenderung berada di atas tingkat provinsi Sumatera Barat dan tingkat nasional.

Berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya menduduki peringkat ke-16 dari total 19 kabupaten/kota dalam hal TPT pada tahun 2023. Meskipun demikian. peringkat ini dapat berubah dari tahun ke tahun. tergantung pada dinamika tingkat pengangguran di setiap daerah.

Secara umum. Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi Sumatera Barat dan tingkat nasional. Oleh karena itu. perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Dharmasraya. seperti meningkatkan peluang kerja melalui pembangunan infrastruktur. pelatihan keterampilan. dan pembangunan sektor ekonomi yang berpotensi. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

14.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator tingkat pengangguran di Dharmasraya dapat melibatkan berbagai faktor. termasuk faktor ekonomi. sosial. dan kebijakan. Berikut adalah beberapa penyebab dan alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Penyebab Kegagalan yaitu Dampak Covid-19 yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang Gulung Tikar
2. Terbatasnya Lowongan Kerja dan Tingginya kebutuhan kerja. salah satu penyebab utama Tingkat Pengangguran yaitu ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Persaingan yang ketat antara para fresh graduate dan tenaga kerja yang berpengalaman juga semakin kuat.
3. Rendahnya kualitas dan ketidaksesuaiannya kualitas pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai seringkali menyebabkan sebagian besar individu hanya memiliki keterampilan terbatas. membatasi kesempatan mereka untuk mengejar pekerjaan yang lebih kompetitif

Dari permasalahan yang ditemui. dapat disusun beberapa alternatif Solusi untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata. pertanian. dan industri lokal dapat membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja.
2. Maksimalisasi pelatihan pada Balai Latihan Kerja di kabupaten Dharmasraya sehingga meningkatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja dapat meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.
3. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro. kecil. dan menengah (UMKM) melalui bantuan teknis. akses ke pasar. dan sumber daya finansial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru.
4. Pembangunan infrastruktur yang memadai. termasuk transportasi dan teknologi informasi. dapat membuka akses ke wilayah yang terpencil dan meningkatkan konektivitas ekonomi. yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru.
5. Pemerintah setempat perlu merancang kebijakan yang mendukung investasi. pertumbuhan ekonomi. dan penciptaan lapangan kerja. serta memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Melalui implementasi solusi-solusi ini. diharapkan tingkat pengangguran di Dharmasraya dapat dikurangi secara signifikan. menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

14.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Untuk Sumber daya manusia. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan organisasi yang bertipe C dengan jumlah personil ASN 33 orang dan Non ASN 28 Orang merupakan sumber daya yang mendukung keberhasilan Capaian Kinerja yang jika di Analisa terjadi tingkat Efisiensi hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten lain misalnya Jumlah SDM pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tercatat lebih dari 100 orang personil yang meliputi ASN dan Non ASN
2. Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik. tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk pelaksanaan program kegiatan dibedakan menjadi 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan).

14.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

1. Mengadakan kegiatan Skill Development Center (SDC) yaitu lembaga rujukan untuk keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program pengembangan SDM kompetensi. cipta kerja dan potensi tenaga kerja di daerah. dalam rangka penanggulangan pengangguran peningkatan produktivitas dan daya saing serta pertumbuhan ekonomi daerah. SDC memiliki peran dan fungsi sebagai penggerak. promotor dan fasilitator peningkatan kerjasama.koordinasi. keterpaduan dan sinergitas program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan program penciptaan kesempatan kerja.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan persentase angkatan kerja dan pencari kerja dalam mengasah keterampilan dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing. Untuk pelatihan BLK pada Tahun 2023 mendapat 18 Paket Pelatihan dengan sumber dana dari APBN dan 4 Paket Pelatihan sumber dana APBD.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online. dengan indikator jumlah pencari kerja yang terdaftar di SISNAKER ada sebanyak 726 orang

SASARAN STRATEGIS 3.1.3 MENGURANGI KEMISKINAN

15. TINGKAT KEMISKINAN

TINGKAT KEMISKINAN = JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH
BADAN PUSAT STATISTIK
= 5.56

Tingkat kemiskinan menjadi indikator kinerja yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks pembangunan, penurunan tingkat kemiskinan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Hal ini karena kemiskinan tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan memantau tingkat kemiskinan, pemerintah daerah dapat menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan dalam upaya mengurangi kemiskinan, serta merencanakan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, tingkat kemiskinan juga menjadi indikator kinerja yang penting karena mencerminkan tingkat keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah daerah tidak hanya menciptakan kondisi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat, tetapi juga mengurangi disparitas sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan pemerintah daerah, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan stabilitas sosial di wilayah tersebut.

15.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 15.1.1 Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Tingkat Kemiskinan	6.02	5.56	107.6%	Memuaskan

Sumber Data : DINSOSP3APPKB. 2023

Dari data yang disajikan dalam Tabel 15.1.1, terlihat bahwa target tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2023 adalah sebesar 6.02. Namun, realisasinya lebih rendah dari target, yaitu sebesar 5.56. Dengan demikian, capaian kinerjanya mencapai 107.6% yang mengindikasikan pencapaian yang memuaskan.

Pencapaian tingkat kemiskinan sebesar 107.6% menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan dan program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait mampu memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses terhadap pekerjaan dan pendapatan, serta berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan sosial dan ekonomi mungkin menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini.

15.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 15.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	6.14	6.57	92.99%
2022	6.08	5.56	108.6%
2023	6.02	5.56	107.6%

Sumber Data : DINSOSP3APPKB. 2023

Dalam periode tiga tahun terakhir, terjadi fluktuasi dalam capaian kinerja tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan memiliki realisasi yang sedikit di atas target yang ditetapkan, mencapai 92.99%. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan, dimana capaian kinerja justru lebih rendah dari target, hanya mencapai 108.6%. Meskipun demikian, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja, dengan tingkat kemiskinan mencapai 107.6% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

15.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 15.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Tingkat Kemiskinan	6.21	5.56	5.87	105.28%

Sumber Data: RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah oleh DINSOSP3APPKB. 2023

Dari Tabel 15.3.1, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan dari kondisi awal RPJMD pada tahun 2020 sebesar 6.14 menjadi 5.56 pada tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 5.87, capaian kinerja tingkat kemiskinan sudah mencapai sekitar 105.28% dari target yang ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa upaya pengurangan kemiskinan berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan serta identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merancang strategi yang lebih efektif dan terukur untuk mencapai target akhir RPJMD dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Dharmasraya.

15.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Nasional. Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 15.4.1 Perbandingan Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat dan Nasional

No	Kabupaten / Kota	Tingkat Kemiskinan	
		2021	2022
1	Sawahlunto	2.28	2.27
2	Solok	3.02	3.05
3	Bukittinggi	4.46	4.11
4	Tanah Datar	4.26	4.16
5	Padang	4.26	4.17
6	Pariaman	4.13	4.2
7	Padang Panjang	5.14	5.24
8	Payakumbuh	5.66	5.44
9	Dharmasraya	5.56	5.56
10	Sijunjung	6	5.88
11	Padang Pariaman	6.25	6.34
12	Solok Selatan	6.51	6.45
13	Agam	6.22	6.6
14	Lima Puluh Kota	6.59	6.8
15	Pasaman	6.85	6.8
16	Pasaman Barat	6.93	6.92
17	Solok	7.12	7.13
18	Pesisir Selatan	7.11	7.34
19	Kep. Mentawai	13.97	13.72
PROVINSI SUMATERA BARAT		5.92	5.95
NASIONAL		9.57	9.36

Sumber Data: Dharmasraya Dalam Angka. 2024

Dari data perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat dan tingkat nasional. terlihat bahwa Dharmasraya memiliki tingkat kemiskinan yang relatif stabil dari tahun 2021 hingga 2022. dan masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu. tingkat kemiskinan Dharmasraya lebih rendah daripada tingkat nasional. yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Dharmasraya relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Meskipun tingkat kemiskinan Dharmasraya berada di bawah rata-rata Nasional. namun masih ada beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang memiliki tingkat kemiskinan yang

lebih rendah. Sehingga Potensi untuk mempelajari dan menerapkan strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dapat diambil dari Kabupaten atau Kota di Sumatera Barat yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

15.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati Dharmasraya. Dengan adanya Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya ada beberapa Hal yang telah dilakukan diantaranya:

1. Melakukan verifikasi dan validasi data;
2. Saling berkoordinasi melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing Tim;
3. Melakukan advokasi dan kerja sama dengan perusahaan serta lembaga dan perbankan yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan penanganan kemiskinan melalui CSR.

Semakin rendah angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya membuktikan semakin baik penanganan yang sudah dilakukan.

15.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tercapainya Kinerja pada tahun 2023 didukung oleh Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada tahun 2023 yaitu kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota anggaran dana sebesar Rp.129.104.000.- dengan realisasi sebesar Rp.128.863.328.- (99.81)

15.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/ Kegiatan Penunjang dalam pencapaian indikator kinerja tingkat Kemiskinan adalah Program Program Pemberdayaan Sosial. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota

MISI 4. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien
--

Tujuan 4.1 Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik

SASARAN STRATEGIS 4.1.1 BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
--

16. INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI

INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI	= PENILAIAN YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN (BPK)
	= 3.92

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat perilaku dan kebijakan anti-korupsi di suatu negara atau wilayah tertentu. IPAK mengukur sejauh mana tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak korupsi.

Penggunaan IPAK memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi anti-korupsi suatu daerah, memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan serta merancang strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi.

16.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 16.1.1 Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Indeks	Perilaku	Anti Korupsi	3.322	3.92	117.39%	Memuaskan

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 78/11/Th. XXVI. 6 November 2023

Capaian kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan nilai realisasi sebesar 3.92, melampaui target awal sebesar 3.322 sebesar 117.39%. Ini menunjukkan adanya upaya yang efektif dalam memerangi korupsi serta kesadaran yang tinggi dalam menjaga integritas dan etika dalam berbagai aktivitas. Capaian ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menanggulangi korupsi, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Peningkatan signifikan dalam Indeks Perilaku Antikorupsi juga bisa dianggap sebagai hasil dari implementasi kebijakan yang tepat, pemantauan yang ketat, serta pendidikan dan pelatihan yang terus menerus terkait dengan etika dan integritas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan keputusan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran juga berperan dalam mencapai capaian yang memuaskan ini.

16.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 16.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	3.066	3.38	92.99%
2022	3.02	3.9	128.7%
2023	3.322	3.92	117.39%

Sumber :Badan Pusat Statistik. 2023

Berdasarkan Tabel 16.2.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, capaian kinerja mencapai 92.99%. sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu 2022, capaian kinerja meningkat tajam menjadi 128.7%. Kemudian, pada tahun 2023, capaian kinerja terus mengalami peningkatan dengan mencapai 117.39%. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah atau organisasi Kabupaten Dharmasraya dalam memerangi korupsi serta peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas dan aktivitas.

Tingginya capaian kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi selama tiga tahun terakhir ini mencerminkan efektivitas dari berbagai kebijakan dan program yang diterapkan dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Dharmasraya. Upaya-upaya seperti peningkatan pemahaman akan hukum dan regulasi terkait korupsi, pengawasan yang ketat terhadap proses pengelolaan dana publik, serta promosi nilai-nilai integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi faktor utama dalam pencapaian ini.

16.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 16.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI	2.9	3.92	3.6	108.3%

Sumber Data: BPS Dharmasraya diolah oleh Bagian Organisasi. 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2023, capaian kinerja mencapai nilai 3.9, yang mengindikasikan peningkatan dari kondisi awal RPJMD pada tahun 2020 sebesar 2.9. Sementara itu, target akhir RPJMD yang ditetapkan untuk tahun 2026 adalah 3.6. Dengan demikian, capaian kinerja Indeks Perilaku Antikorupsi pada tahun 2023 telah mencapai 108.3% dari target akhir

RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah berhasil melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD terkait dengan peningkatan perilaku anti-korupsi.

Capaian yang melampaui target akhir RPJMD ini dapat diinterpretasikan sebagai bukti keseriusan dan efektivitas dari kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memerangi korupsi serta meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Capaian yang positif ini juga dapat menjadi landasan untuk terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan korupsi di masa yang akan datang, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

16.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Kebijakan dan langkah-langkah yang diimplementasikan oleh Kabupaten Dharmasraya telah membawa kesuksesan dalam meningkatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi. Berikut adalah analisis beberapa penyebab keberhasilan:

1. Pelaporan LHKPN secara menyeluruh oleh seluruh pejabat tinggi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan integritas individu, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Publikasi data melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah), data publik di Kabupaten Dharmasraya dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Transparansi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memantau penggunaan dana publik, sehingga meminimalkan potensi praktik korupsi.
3. Pengawasan oleh inspektorat. Peran aktif inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek pemerintahan menjadi penopang penting dalam mencegah dan menindak potensi tindak korupsi. Pengawasan yang efektif dapat memberikan sinyal jelas bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi.
4. Tingkatkan level Aparat Pengawas Instansi Pemerintah di Dharmasraya sudah mencapai level 3, hal ini menunjukkan kapasitas dan kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan. Ini memastikan bahwa penegakan aturan dan standar integritas tinggi dijalankan secara konsisten.
5. Penanganan laporan temuan secara efektif. Penanganan laporan temuan dengan cepat dan tepat menunjukkan responsifnya pemerintah terhadap masalah korupsi. Tindakan yang transparan dan tegas memberikan sinyal bahwa pelanggaran etika dan hukum tidak akan ditoleransi.
6. Pengawasan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring pelaksanaan kinerja. Pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah memastikan akuntabilitas dan

efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Dengan demikian, potensi kecurangan dan korupsi dapat diminimalkan.

Dengan implementasi berbagai langkah ini secara komprehensif, Kabupaten Dharmasraya telah berhasil membangun lingkungan yang tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

16.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan indeks perilaku anti-korupsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk implementasi kebijakan dan penggunaan sumber daya yang tepat. Berikut adalah analisisnya:

1. Peningkatan Transparansi melalui Website PPID. Ketersediaan website PPID Dharmasraya (<https://ppid.dharmasrayakab.go.id>) memberikan aksesibilitas yang lebih luas kepada publik untuk mengakses informasi terkait dengan kebijakan, anggaran, dan program pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi penggunaan sumber daya publik, yang dapat mengurangi peluang praktik korupsi.
2. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3. Keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3 menandakan adanya sistem pengawasan yang matang dan berkualitas di Kabupaten Dharmasraya. Dengan memiliki jabatan fungsional seperti auditor dan pengawas Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap setiap aktivitas pemerintah, termasuk penggunaan sumber daya, sehingga meminimalkan risiko penyelewengan atau korupsi.
3. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi di pemerintahan. Dengan mengelola website PPID, informasi yang terkait dengan kegiatan pemerintah menjadi lebih mudah diakses oleh publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan sumber daya publik.

Dengan adanya implementasi kebijakan dan penggunaan sumber daya yang efisien, Kabupaten Dharmasraya dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahannya. Dengan demikian, indeks perilaku anti-korupsi dapat terus meningkat, menciptakan pemerintahan yang lebih berintegritas dan berkelanjutan.

16.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang disebutkan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi di Kabupaten Dharmasraya. Berikut adalah analisisnya:

1. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Program ini memberikan fokus pada pengawasan terhadap area-area yang dianggap memiliki risiko tinggi terkait dengan praktik korupsi. Dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan area-area tersebut, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencegah dan menanggulangi potensi praktik korupsi. Langkah ini membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Program ini menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pengawasan internal dan eksternal di Kabupaten Dharmasraya. Dengan merumuskan kebijakan teknis yang jelas dan terarah, pemerintah dapat memberikan panduan yang diperlukan bagi para pelaksana pengawasan. Langkah ini membantu memastikan konsistensi dan standar yang tinggi dalam pelaksanaan pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.
3. Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Melalui program ini, pemerintah dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah di Kabupaten Dharmasraya memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif. Pengawasan internal yang kuat dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi di tingkat operasional, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Langkah ini memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas.

Dengan menggabungkan program-program ini dan kegiatan-kegiatan lain yang sejalan, Kabupaten Dharmasraya dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Langkah-langkah ini membantu membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahannya.

17. OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

= HASIL EVALUASI/OPINI BPK RI PADA TAHUN -N TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN -1N

= WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada pemerintah daerah menandakan bahwa entitas tersebut telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola keuangan publik. Hal ini mencerminkan tingkat kedisiplinan dan transparansi yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan. serta menunjukkan bahwa entitas tersebut telah mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku. Opini WTP menjadi prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah. karena menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan dengan integritas. akuntabilitas. dan efisiensi yang tinggi. serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik.

Prestasi ini juga menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah telah berhasil menjalankan tugasnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. serta membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Opini WTP juga menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari pemangku kepentingan. seperti investor. kreditor. dan masyarakat umum. terhadap kinerja dan integritas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Dengan demikian. pemerintah daerah dapat menggunakan opini WTP sebagai landasan untuk terus meningkatkan praktik pengelolaan keuangan yang baik. serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

17.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 17.1.1 Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian	Prediket
OPINI	BPK	TERHADAP	WTP	WTP	100%	Sangat Baik
LAPORAN KEUANGAN						

Sumber Data :Badan Keuangan Dharmasraya (BPK).2023

Dari tabel yang disajikan. dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam indikator kinerja terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangannya. Capaian 100% opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya telah dianggap memadai. transparan. dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Keputusan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya yang diberikan melalui surat dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat No 62/S-HP/XVIII.PDG/04/2023 menegaskan bahwa tidak ditemukan ketidakpatuhan atau kekurangan yang signifikan dalam laporan keuangan tersebut. Opini WTP dari BPK mengindikasikan bahwa proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mencapai tingkat memuaskan dalam mempertahankan kualitas dan transparansi laporan keuangannya. yang tercermin dari opini

WTP yang diberikan oleh BPK RI. Hal ini menjadi pencapaian yang penting dan membanggakan bagi Kabupaten Dharmasraya, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan public.

17.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 17.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	WTP	WTP	100%
2022	WTP	WTP	100%
2023	WTP	WTP	100%

Sumber : Badan Keuangan Dharmasraya Dharmasraya. 2023

Dari Tabel 17.2.1, terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Capaian kinerja ini menunjukkan konsistensi dan keunggulan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan selama tiga tahun terakhir.

Dengan mencapai opini WTP sebanyak 100% setiap tahunnya, Kabupaten Dharmasraya menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Capaian ini juga mencerminkan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan publik, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, kesimpulan dari tabel tersebut adalah Kabupaten Dharmasraya telah mempertahankan kualitas dan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, yang tercermin dari capaian opini WTP yang mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola keuangan publik.

17.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 17.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 17.3.1 menunjukkan perbandingan capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Dharmasraya dengan target akhir masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari data tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Dharmasraya telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang juga merupakan target akhir RPJMD untuk tahun 2026. Capaian ini menunjukkan kesesuaian yang langsung antara capaian aktual dan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kesimpulan dari tabel ini adalah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mencapai target akhir RPJMD terkait dengan opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2023, yang menunjukkan konsistensi dan kesuksesan dalam pengelolaan keuangan publik sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

17.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Penyebab keberhasilan laporan keuangan mendapat prediket wajar tanpa pengecualian karena Kabupaten Dharmasraya telah melaporkan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Dharmasraya tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

17.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadi kunci penting dalam memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Berikut adalah analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut:

1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk menyusun laporan keuangan yang tepat dan akurat. Proses ini melibatkan penyiapan data, analisis, dan dokumentasi yang cermat, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Internal dalam rangka pengawasan internal yang efektif dan peningkatan kapasitas staf keuangan telah membantu memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan memiliki tim yang terlatih dan kompeten, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengurangi biaya overhead dan meningkatkan produktivitas dalam proses persiapan laporan keuangan.

3. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan menerima dan menerapkan rekomendasi BPK secara tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat meminimalkan risiko penundaan atau ketidaksempurnaan dalam proses audit, sehingga menghemat sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian laporan keuangan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan telah membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengadopsi sistem yang terintegrasi dan otomatis. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengolahan data, serta meminimalkan kesalahan manusia dalam proses tersebut.

Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencerminkan komitmen yang kuat dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan publik yang baik dan berkelanjutan.

17.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program-program yang dialokasikan seperti Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran yang krusial dalam mendukung pencapaian indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah memberikan landasan yang kuat untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data keuangan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diajukan kepada BPK.

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah serta Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah membantu dalam menjamin bahwa anggaran pemerintah daerah dialokasikan dengan tepat sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengelolaan perbendaharaan yang baik juga memastikan kelancaran dalam pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah, yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi.

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan menjalankan proses akuntansi yang tepat dan tepat waktu. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat memastikan bahwa laporan keuangannya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah juga memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya keuangan daerah dengan baik. Dengan mengatur pengelolaan aset dan keuangan dengan efisien. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat meningkatkan transparansi, meminimalkan risiko penyelewengan, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

18. HASIL EVALUASI AKIP

HASIL EVALUASI AKIP	=	NILAI YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN PAN RB
		BERDASARKAN HASIL PENILAIAN EVALUASI SISTEM
		AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
		= B (64.65)

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah proses yang dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi AKIP pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk efektivitas program dan kebijakan yang dilaksanakan, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, serta tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi dan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, pemerintah daerah dapat meraih hasil yang memuaskan jika terbukti berhasil mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Di sisi lain, jika terdapat kekurangan atau hambatan dalam mencapai target kinerja, evaluasi AKIP juga dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

18.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 18.1.1 Perbandingan antara target kinerja Hasil Evaluasi AKIP dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
1	Hasil Evaluasi AKIP	BB (70)	B (64.65)	92.35%	Sangat Baik

Sumber data : Bagian Organisasi. 2023

Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Dharmasraya pada angka 64.65 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 70 dengan capaian 92.53% dengan kategori **Sangat Baik**. Meski demikian, pencapaian tersebut

mencerminkan komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya secara efektif. Dengan memperhatikan capaian ini, diharapkan adanya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam waktu yang akan datang. Perkembangan capaian hasil penilaian akuntabilitas kinerja Kabupaten Dharmasraya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 18.1.2 Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen yang dinilai	bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	22.20	22.28
2	Pengukuran Kinerja	30	18.19	18.64
3	Pelaporan Kinerja	15	10.78	10.81
4	Evaluasi Internal	25	12.90	12.92
Nilai Hasil Evaluasi		100	64.07	64.65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sumber Data : Kementrian PAN-RB. 2023

Kesimpulan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah (PD). Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja antara lain indikator kinerja yang belum berorientasi hasil, dan Terdapat indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup.
2. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh PD. Selain itu, telah memiliki aplikasi e-sakip untuk melakukan monitoring kinerja. Namun demikian, Kabupaten Dharmasraya Belum memiliki pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja, sebagian dokumen IKU PD belum menyajikan rumusan indikator dan sumber data yang jelas. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Aplikasi e-sakip belum optimal digunakan oleh unit/satuan kerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja, sehingga belum ada feedback perbaikan dari pimpinan unit/satuan kerja terkait kinerja yang tidak tercapai.

3. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyusun laporan kinerja tahun 2022 baik tingkat Pemda maupun tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut. Laporan Kinerja sebagian PD belum dipublikasi secara luas untuk dapat diakses oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk akuntabilitas public. Kualitas pengungkapan informasi kinerja dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya.
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi yang disesuaikan dengan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam evaluasi internal di antaranya sebagai berikut. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada indikator jumlah nagari beradat dan berbudaya. Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

18.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 18.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Akip Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	70	63.98	91.4%
2022	70	64.07	91.53%
2023	70	64.65	92.35%

Sumber : Bagian Organisasi. 2023

Dari Tabel 18.2.1. terlihat bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang konsisten. Meskipun target yang ditetapkan tetap sama sebesar 70, capaian kinerja meningkat dari 91.4% pada tahun 2021, menjadi 91.53% pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai 92.53% pada tahun 2023.

Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam berbagai aspek yang dinilai dalam evaluasi AKIP. Meskipun peningkatan tersebut mungkin terlihat kecil, namun konsistensi dalam

meningkatkan kinerja merupakan indikasi positif dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan.

18.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 18.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Akip dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
HASIL EVALUASI AKIP	B 63.44	64.65	A	80.81

Sumber Data : RPJMD Dharmasraya 2021-2026 diolah Oleh Bagian Organisasi. 2023

18.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Dharmasraya antara lain Capaian Nilai AKIP OPD yang dinilai oleh Inspektorat. Capaian kinerja Nilai AKIP OPD mendapatkan nilai diatas B, artinya nilai sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang mendapatkan nilai besar sama dengan 70 poin. penilaian terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan oleh inspektorat. hasil penilaian di tuangkan dalam laporan inspektorat nomor : 700/02-038/Ev/Inspektorat-2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

Tabel 18.4.1 Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP diatas B

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	Prediket
1	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	83.71	A
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	82.81	A
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	78.9	BB
4	Kecamatan Koto Baru	77.39	BB
5	Inspektorat	76.73	BB
6	Dinas Kesehatan	76.34	BB
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	76.07	BB
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	75.88	BB
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	75.85	BB
10	Dinas Lingkungan Hidup	75	BB

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	Prediket
11	Dinas Pendidikan	73.85	BB
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	73.22	BB
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	73.04	BB
14	Kecamatan Koto Besar	72.45	BB
15	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	72.44	BB
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	72.41	BB
17	Kecamatan Sungai Rumbai	72.37	BB
18	Kecamatan Pulau Punjung	71.57	BB
19	RSUD Sungai Dareh	70.84	BB
20	Dinas Pertanian	70.61	BB

Sumber : Inspektorat Dharmasraya. 2023

Dari 38 OPD.masing-masing sudah seluruh OPD memiliki tim evaluasi kinerja internal. tim penyusun laporan kinerja. dan tim implementasi SAKIP perangkat daerah. dan dari tim yang telah dibentuk. seluruh OPD sudah memiliki Rencana Strategis tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama perangkat daerah. Rencana Aksi Kinerja tahun 2023. pohon kinerja. cascading dan dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas kinerja lainnya.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja. Dari Analisa terhadap penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. dapat dirumuskan beberapa alternatif solusi yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan antara lain:

1. *Basic dimension* dalam penerapan SAKIP adalah komitmen pimpinan. dalam rangka peningkatan komitmen pimpinan serta meningkatkan rasa kepemilikan pimpinan OPD terhadap kinerja yang telah diperjanjikan di awal tahun. maka dilaksanakan Penandatanganan komitmen kinerja yang telah ditandatangani oleh seluruh kepala OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebagai bentuk komitmen kepala perangkat daerah dalam melaksanakan penyusunan strategi berdasarkan laporan kinerja tahun sebelumnya.
2. Integrasi dari Sekretariat Daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam penggunaan e-SAKIP dharmasraya. pada bulan Desember 2022 telah dilaksanakan penandatanganan hak guna pakai aplikasi e-sakip dharmasraya guna meningkatkan nilai publikasi serta pendokumentasian dokumen kinerja.
3. Pembentukan dua tim inti dalam percepatan pelaksanaan SAKIP antara lain Tim Implementasi SAKIP Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dalam SK Bupati Dharmasraya No 188.45/ /KPTS-BUP/2023 tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. dimana anggota nya terdiri dari BAPPPEDA. INSPEKTORAT dan SEKRETARIAT DAERAH.

18.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam memastikan implementasi SAKIP di Kabupaten Dharmasraya, salah satu Upaya yang dilakukan adalah Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan melalui SK Bupati Dharmasraya No 188.45/69/KPTS-BUP/2023. Dengan melibatkan anggota-anggota dari BAPPPEDA, INSPEKTORAT, dan SEKRETARIAT DAERAH, tim ini memiliki cakupan yang luas dalam memastikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di Kabupaten Dharmasraya berjalan dengan baik dan efektif.

Melalui kerja tim yang terkoordinasi, berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, BAPPPEDA dapat memberikan masukan terkait perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, sementara INSPEKTORAT dapat melakukan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, SEKRETARIAT DAERAH dapat memberikan dukungan administratif dan koordinasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tim.

Dengan adanya sinergi antara berbagai instansi yang terlibat, diharapkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan, sementara sistem akuntabilitas kinerja dapat diperkuat. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan transparansi, integritas, dan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

18.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/kegiatan penunjang yang difokuskan pada pengembangan kinerja reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan daerah, dan peningkatan pengawasan di Kabupaten Dharmasraya memiliki peran yang krusial dalam mencapai indikator sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pertama, pengembangan kinerja reformasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan memperkenalkan inovasi dan perbaikan dalam struktur organisasi, proses kerja, dan sistem manajemen, pemerintah daerah dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, peningkatan kualitas perencanaan daerah juga merupakan faktor kunci dalam mencapai sistem akuntabilitas kinerja yang baik. Dengan melakukan perencanaan yang matang, berbasis data, dan partisipatif, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan yang jelas, mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, dan mengukur kinerja secara lebih akurat. Selain itu, perencanaan yang baik juga membantu dalam meminimalkan risiko ketidakpastian dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.

Terakhir, peningkatan pengawasan merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi risiko dan penyimpangan secara dini, serta mengambil tindakan korektif yang tepat. Pengawasan yang efektif juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, program/kegiatan penunjang yang difokuskan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Dharmasraya adalah langkah-langkah strategis dalam mencapai sistem akuntabilitas kinerja yang baik. Dengan melaksanakan program-program ini dengan efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka.

19. NILAI LPPD

NILAI LPPD	= SKOR EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DI KELUARKAN OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH
	= 3.5036

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan laporan yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya tentang pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya dan keuangan daerah. Nilai LPPD pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kualitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik.

Secara umum, semakin tinggi nilai LPPD suatu pemerintah daerah, semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, nilai LPPD merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

19.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 19.1.1 Capaian Kinerja LPPD berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Nilai LPPD	3.7000	3.5036	94.69%	Sangat Baik

Sumber Data : Bagian Pemerintahan, 2023

Untuk menganalisis target kinerja LPPD tahun 2023, sudah adanya peningkatan evaluasi data dari OPD yang sudah mulai tertata rapi dan juga sudah mulai relevan dengan kebutuhan dan tujuan pemerintah daerah dari tahun sebelumnya. Selain itu target tersebut juga harus realistis dengan data yang ada.

Pada tahun 2023, target untuk nilai LPPD adalah 3.7, sedangkan realisasinya adalah 3.50 sehingga capaian untuk nilai LPPD ini pada tahun 2023 adalah 94.7%. capaian ini masuk dalam kategori sangat baik. Nilai LPPD merupakan salah satu nilai yang membentuk Pemerintahan lebih maju dan tertata dengan baik. Nilai LPPD Kabupaten pada tahun 2023 menduduki peringkat 1 di Tingkat Provinsi dan Peringkat 9 di Tingkat Nasional.

19.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 19.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Nilai LPPD		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	3.6000	3.5100	97.2%
2022	3.6500	3.5100	96.2%
2023	3.7000	3.5036	94.69%

Sumber Data : Bagian Pemerintahan, 2023

Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya telah melaporkan nilai LPPD yang cukup stabil selama tiga tahun terakhir. Meskipun terdapat sedikit penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, capaian kinerja masih tetap berada pada kisaran yang tinggi, menunjukkan konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2021, target nilai LPPD Kabupaten Dharmasraya adalah 3.6 dan realisasinya mencapai 3.51, yang menghasilkan capaian kinerja sebesar 97.2%. Kemudian, pada tahun 2022, meskipun target sedikit meningkat menjadi 3.65, realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja turun sedikit menjadi 96.2%. Sementara pada tahun 2023, terjadi penurunan lebih lanjut baik pada target maupun realisasi, dengan capaian kinerja sebesar 94.7%.

Meskipun terdapat penurunan dalam capaian kinerja dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan target yang ditetapkan dalam RPJMD terlalu tinggi, sedangkan capaian saat ini sudah mencapai peringkat ke 1 (satu) di tingkat Provinsi dan tingkat ke 9 pada tingkat Nasional.

19.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 19.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks SPBE dengan Target Akhir Masa RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
1	Nilai LPPD	3.5138	3.5036	3.90	89.84

Sumber Data : Bagian Pemerintahan. 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, terlihat bahwa nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 adalah 3.5000. Ini menunjukkan adanya sedikit penurunan dari kondisi awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada tahun 2020 yang mencapai 3.5138. Meskipun demikian, target akhir RPJMD untuk tahun 2026 adalah 3.90, yang menandakan adanya harapan untuk meningkatkan nilai LPPD di masa depan.

Dengan capaian sebesar 89.84% terhadap target akhir RPJMD, nilai LPPD pada tahun 2023 dapat dikatakan berada di bawah harapan yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperbaiki atau meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun terjadi penurunan nilai LPPD dari kondisi awal RPJMD, tetapi capaiannya masih cukup tinggi, menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil dalam sebagian besar aspek penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi yang cermat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai LPPD serta langkah-langkah perbaikan yang tepat akan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah menuju target akhir RPJMD.

19.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi dan Kabupaten Nilai Tertinggi tahun 2023

Tabel 19.4.1 Perbandingan capaian kinerja LPPD Dharmasraya dengan Kabupaten Kota Lain dan Provinsi Sumatera Barat

No	Pemerintah Daerah	LPPD	
		NILAI	PERINGKAT NASIONAL
1	Kabupaten Banyuwangi	3.8118	1/414
2	Kabupaten Dharmasraya	3.5036	9/414
3	Kabupaten Pasaman	3.4923	20/414
4	Provinsi Sumatera Barat	2.7333	25/34

Sumber :Kepmendagri No.100.2.1.7.6646 tahun 2023

Kabupaten Dharmasraya menempati peringkat ke-9 dari total 414 pemerintah daerah yang dievaluasi. Dengan nilai LPPD sebesar 3.5036, Kabupaten Dharmasraya menunjukkan kinerja

yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia. Peringkat ini mencerminkan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, terus ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan dalam upaya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan peringkat ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat terus mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan memastikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik serta terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi mereka.

19.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan dalam mencapai nilai LPPD yang tinggi di Kabupaten Dharmasraya dapat diatribusikan kepada dukungan dan kerjasama yang solid antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Kerjasama yang kuat antar-OPD memungkinkan terciptanya sinergi dalam pengumpulan data, analisis informasi, dan penyusunan laporan. Dengan demikian, setiap OPD dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap kualitas dan keakuratan informasi yang disajikan dalam LPPD, sehingga menciptakan capaian kinerja yang memuaskan.

Meskipun terdapat keberhasilan dalam pencapaian nilai LPPD, masih terdapat masalah yang perlu diatasi, yaitu seringnya terlambatnya pengiriman data dari OPD ke Bagian Pemerintahan sebagai penyusun LPPD di tingkat kabupaten. Keterlambatan ini dapat menghambat proses penyusunan laporan dan mengganggu ketepatan waktu dalam penyampaian informasi kepada publik. Penyebab terlambatnya pengiriman data dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kesibukan, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya koordinasi antar-OPD.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Bagian Pemerintahan dan OPD-OPD terkait dalam hal pengumpulan dan pengiriman data. Langkah-langkah ini dapat meliputi penyelenggaraan rapat rutin, pelatihan tentang pentingnya keteraturan pengiriman data, dan pembentukan tim kerja lintas-OPD untuk memantau dan memastikan kelancaran prosesnya.
2. Menerapkan sistem informasi atau aplikasi yang memungkinkan OPD untuk secara langsung mengirimkan data secara real-time kepada Bagian Pemerintahan. Dengan adopsi teknologi yang tepat, proses pengumpulan dan pengolahan data dapat dipercepat, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dalam penyusunan laporan.

3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keteraturan pengiriman data. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada staf OPD tentang pentingnya keteraturan dan kecepatan dalam pengiriman data untuk penyusunan LPPD. Menekankan pada konsekuensi dari keterlambatan pengiriman data dan manfaat dari keteraturan pengiriman data dapat membantu meningkatkan kesadaran dan komitmen dari setiap OPD.

Dengan menerapkan alternatif solusi di atas, diharapkan dapat mengatasi masalah keterlambatan pengiriman data dari OPD ke Bagian Pemerintahan serta meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan LPPD di tingkat kabupaten. Dengan demikian, Kabupaten Dharmasraya dapat terus mempertahankan capaian kinerja yang baik dalam hal LPPD serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

19.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan capaian nilai LPPD sebesar 94.7%, yang masuk dalam kategori "Sangat Baik", dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Capaian ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki, karena pemerintah berhasil mencapai kualitas yang sangat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan anggaran yang telah dialokasikan.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa realisasi anggaran untuk indikator kinerja LPPD mencapai 99.43% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 127.503.800.-. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan telah dilakukan dengan efisien, dimana hampir seluruhnya telah dimanfaatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun sumber daya lainnya, telah menjadi faktor penting dalam mencapai capaian nilai LPPD yang sangat baik oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dengan baik demi mencapai kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.

19.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator LPPD. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 127.503.800.- yang dialokasikan untuk sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, kegiatan yang dilakukan, yaitu update data melalui aplikasi SI ELPPD oleh Operator SI ELPPD di Bagian Pemerintahan, memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan update data melalui aplikasi SI ELPPD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam LPPD adalah akurat, terkini, dan relevan.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan secara lebih efisien dan cepat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, kegiatan ini juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan memiliki data yang terdokumentasi dengan baik, pemerintah daerah dapat memperkuat pertanggungjawaban mereka terhadap penggunaan sumber daya publik, serta memfasilitasi proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Dengan demikian, program/kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah ini memiliki peran yang strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja LPPD. Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 4.1.2 BIROKRASI YANG BERKUALITAS

20. INDEKS KELEMBAGAAN

TIDAK ADA PENILAIAN INDEKS KELEMBAGAAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DILAKUKAN ANALISA LEBIH LANJUT

21. INDEKS SPBE

INDEKS SPBE = NILAI INDEKS YANG MEREPRESENTASIKAN TINGKAT PELAKSANAAN SPBE SECARA KESELURUHAN. = 2.83

21.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 21.1.1 Capaian Kinerja Indeks SPBE berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
INDEKS SPBE	2.41	2.83	117.43%	Memuaskan

Sumber Data : Dinas Komunikasi Informatika.2023

Dengan capaian kinerja Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 117.43%, dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Dharmasraya telah berjalan dengan sangat baik dan mencapai hasil yang memuaskan. Target yang ditetapkan sebesar 2.4 berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar 2.83, menunjukkan efektivitas dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Melalui evaluasi SPBE yang sukses, dapat diidentifikasi bahwa penerapan

teknologi telah memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. seperti percepatan proses administrasi. peningkatan aksesibilitas layanan publik. dan peningkatan efektivitas pengambilan keputusan.

21.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 21.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	INDEKS SPBE		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	1.625	1.09	67.08%
2022	1.9	2.41	127.89%
2023	2.41	2.83	117.43

Sumber Data : Dinas Komunikasi Informatika.2023

Dalam tiga tahun terakhir. Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam capaian kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2021. capaian kinerja SPBE berada di tingkat yang lebih rendah dengan hanya mencapai 67.08% dari target yang ditetapkan sebesar 1.625. Namun. pada tahun berikutnya. terjadi lonjakan yang signifikan dimana capaian kinerja mencapai 127.89% dari target yang ditetapkan sebesar 1.9 pada tahun 2022. Lonjakan ini menandakan adanya perbaikan yang besar dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Dharmasraya.

Pada tahun 2023. capaian kinerja SPBE terus menunjukkan peningkatan yang positif dengan mencapai 117.43% dari target yang ditetapkan sebesar 2.41. Meskipun tidak sebesar lonjakan pada tahun sebelumnya. capaian kinerja ini tetap menunjukkan komitmen dan kemajuan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Dengan demikian. perbandingan capaian kinerja SPBE selama tiga tahun terakhir mencerminkan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

21.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 21.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks SPBE dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Indeks SPBE	1.09	2.83	3	94.33

Sumber Data : Dinas Komunikasi Informatika.2023

Pada kondisi awal RPJMD tahun 2020, nilai Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya adalah 1.09, mencerminkan tingkat keterbatasan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada saat itu. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan di mana nilai Indeks SPBE mencapai 2.83. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam pengembangan dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Dharmasraya.

Sementara itu, target akhir masa RPJMD tahun 2026 untuk Indeks SPBE adalah sebesar 3. Dengan capaian sebesar 94.33% terhadap target akhir RPJMD tersebut, Kabupaten Dharmasraya menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mencapai tujuan jangka panjang dalam penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

21.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Tabel 21.4.1 Perbandingan Kinerja Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat tahun 2023

No	Nama Instansi	Indeks	Prediket
1	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4.17	Sangat Baik
2	Pemerintah Kota Padang	3.54	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Solok	3.49	Baik
4	Pemerintah Kota Solok	3.37	Baik
5	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	3.29	Baik
6	Pemerintah Kab. Tanah Datar	3.22	Baik
7	Pemerintah Kota Payakumbu	3.17	Baik
8	Pemerintah Kota Sawahlunto	3.09	Baik
9	Pemerintah Kab. Solok Selatan	2.98	Baik
10	Pemerintah Kota Padang Panjang	2.92	Baik
11	Pemerintah Kab. Dharmasraya	2.83	Baik
12	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2.82	Baik
13	Pemerintah Kota Pariaman	2.65	Baik
14	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2.62	Baik
15	Pemerintah Kab. Agam	2.55	Cukup
16	Pemerintah Kota Bukittinggi	2.49	Cukup
17	Pemerintah Kab. Pasaman	2.38	Cukup
18	Pemerintah Kab. Sijunjung	2.18	Cukup
19	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	1.53	Kurang
	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3.75	Sangat Baik

Sumber Data : Kepmenpan RB No.13/2024

Berdasarkan data perbandingan kinerja Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya dengan instansi pemerintah di Sumatera Barat dan tingkat nasional pada tahun 2023. Kabupaten Dharmasraya menempati peringkat ke-11 dari total 19 instansi yang dievaluasi. Dengan nilai indeks sebesar 2.83. Kabupaten Dharmasraya termasuk dalam kategori "Baik" berdasarkan predikat yang diberikan.

Jika dibandingkan di tingkat Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya memiliki capaian yang relatif baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa instansi pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat tertinggi dengan predikat "Sangat Baik" dan nilai indeks sebesar 3.75. sedangkan beberapa kabupaten/kota seperti Pesisir Selatan, Padang, dan Solok menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai indeks di atas 3.5.

Namun demikian, peringkat ke-11 Kabupaten Dharmasraya menandakan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan kinerja dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab perbedaan kinerja antara Kabupaten Dharmasraya dengan instansi pemerintah lainnya dapat menjadi landasan untuk pengembangan strategi dan program yang lebih efektif guna meningkatkan capaian Indeks SPBE di masa yang akan datang.

21.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dari tahun 2021. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Dharmasraya berada di angka 1.09 (kurang) dan menduduki peringkat kedua terendah di Propinsi Sumatera Barat. pada tahun 2022 sudah mulai mengalami peningkatan berada pada indeks 2.41 (kurang). dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup significant yaitu diangka 2.83 (baik). Adapun usaha yang dilakukan dalam upaya menaikkan angka indeks SPBE yang telah dilakukan adalah dengan melengkapi Data dan Dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan dokumen evaluasi SPBE dari Kemenpan RB. seperti Dokumen Regulasi SPBE. Kebijakan yang telah dimiliki. sistem Manajemen SPBE serta Layanan SPBE yang telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

21.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kabupaten Dharmasraya telah membentuk tim yang berperan penting dalam penilaian indeks SPBE. pada tahun 2022. belum ada Peraturan Daerah terkait SPBE. namun di tahun 2023 telah terbit peraturan Daerah terkait SPBE. tim terdiri dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Sekeratariat Daerah. Inspektorat. serta OPD lainnya yang terkait dalam mendukung peningkatan SPBE di Kabupaten Dharmasraya. selain itu Perlu keseriusan serta kerjasama

seluruh Perangkat Daerah yang terkait dalam Evaluasi SPBE untuk mewujudkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik.

21.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program atau kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks SPBE di Kabupaten Dharmasraya adalah adopsi aplikasi dan layanan berbasis elektronik di seluruh perangkat daerah. Melalui penerapan teknologi informasi, Kabupaten Dharmasraya dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Beberapa program dan kegiatan yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini meliputi:

1. Implementasi Aplikasi Administrasi Publik: Penggunaan aplikasi administrasi publik memungkinkan perangkat daerah untuk mengelola data, proses administrasi, dan layanan publik secara lebih efisien. Contohnya adalah penggunaan aplikasi untuk pengelolaan kepegawaian, keuangan, perizinan, dan layanan publik lainnya.
2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan adopsi dan pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik. Melalui pelatihan yang tepat, pegawai di berbagai perangkat daerah dapat memahami dan menggunakan aplikasi tersebut secara efektif.
3. Penyediaan Infrastruktur TIK: Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai menjadi prasyarat penting dalam mendukung penggunaan aplikasi dan layanan berbasis elektronik. Ini termasuk penyediaan jaringan internet yang cepat dan stabil serta perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.
4. Monitoring dan Evaluasi: Pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi aplikasi dan layanan berbasis elektronik tidak bisa diabaikan. Dengan melakukan evaluasi, Kabupaten Dharmasraya dapat mengidentifikasi kendala, masalah, dan area yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi tersebut.

22. INDEKS PROFESIONALISME ASN

INDEKS PROFESIONALISME ASN

= PENILAIAN KUALITAS ASN BERDASARKAN KESESUAIAN KUALIFIKASI, KOMPETENSI, KINERJA DAN KEDISIPLINAN PEGAWAI ASN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL

= 71.7

Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat profesionalisme dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Indeks ini mencakup berbagai aspek, termasuk

kompetensi. integritas. etika kerja. kedisiplinan. serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan lingkungan kerja.

Tingkat profesionalisme ASN pemerintah daerah menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan memiliki ASN yang profesional. pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan. meningkatkan kepercayaan masyarakat. serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Oleh karena itu. monitoring dan evaluasi terhadap Indeks Profesionalisme ASN merupakan bagian yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

22.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 22.1.1 Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Indeks Profesionalisme ASN	71.7	71.7	100%	Sangat Baik

Sumber : BKPSDM Dharmasraya. 2023
*Ket *) Data Sementara*

Dari data yang diberikan. terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya mencapai capaian yang memuaskan dalam Indeks Profesionalisme ASN pada tahun yang bersangkutan. Realisasi capaian mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 71.7. Hal ini menunjukkan bahwa ASN di Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Capaian ini menggambarkan komitmen dan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah. yang merupakan faktor kunci dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat. Dengan mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian ini di masa mendatang. Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkatkan efisiensi. integritas. dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

22.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 22.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	62	62.86	101.4 %
2022	65	71.7	110.3 %

2023	71.7	71.7	100 %
-------------	------	------	-------

Sumber : BKPSDM Dharmasraya. 2023
Ket *) Data Sementara

22.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 22.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesionalisme ASN dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Indeks	Profesionalisme ASN	58.04	71.7*	77	93.12

Ket *) Data Sementara

Selama tiga tahun terakhir, Kabupaten Dharmasraya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja Indeks Profesionalisme ASN. Pada tahun 2021, capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan, mencapai 101.4% dari target sebesar 62.86. Pada tahun berikutnya, capaian kinerja meningkat secara substansial, mencapai 110.3% dari target yang ditetapkan sebesar 65. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam profesionalisme dan kualitas kerja aparatur sipil negara di Kabupaten Dharmasraya.

Pada tahun 2023, capaian kinerja tetap mempertahankan tingkat yang baik dengan mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 71.7. Capaian ini menandakan konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan profesionalisme ASN, yang menjadi landasan penting dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat. Dengan demikian, capaian kinerja yang terus meningkat ini mencerminkan upaya berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya dalam mengembangkan dan memperkuat sumber daya manusia di sektor pemerintahan.

22.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 22.4.1 Perbandingan Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten/Kota/Provinsi di Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	IP ASN	
		2021	2022
1	Pemerintah Kota Bukittinggi	54.53	88.5
2	Pemerintah Kota Pariaman	45.85	85.96
3	Pemerintah Kab. Sijunjung	58.83	83.12
4	Pemerintah Kab. Tanah Datar	73.37	79.8
5	Pemerintah Kota Padang Panjang	76.51	77.3

NO	KABUPATEN/KOTA	IP ASN	
		2021	2022
6	Pemerintah Kab. Dharmasraya	62.86	71.7
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	49.93	66.04
8	Pemerintah Kab. Agam	51.8	65.46
9	Pemerintah Kota Solok	51.87	64.58
10	Pemerintah Kota Payakumbuh	63.17	64.14
11	Pemerintah Kab. Pasaman	65.33	63.11
12	Pemerintah Kota Padang	52.35	62.3
13	Pemerintah Kab. Solok	45.8	61.61
14	Pemerintah Kota Sawahlunto	51.99	61.27
15	Pemerintah Kab. Solok Selatan	46.97	60.41
16	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	52.84	59.39
17	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	50.22	59.03
18	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	46.38	56.67
19	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	33.95	35.52
20	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	52.99	62

Sumber Data: BKN Regional .2023

22.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam mencapai indikator kinerja indeks profesionalitas ASN. dapat di simpulkan penyebab Keberhasilan Pencapaian Indikator antara lain

1. Kualifikasi ASN sudah bertambah
2. Kompetensi ASN sudah meningkat
3. Kinerja ASN sudah Profesional
4. Kedisiplinan ASN sudah patuh dan taat

Selain keberhasilan pencapaian. terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja ini antara lain keterbatasan Anggaran untuk meningkatkan Kualitas. Kompetensi. Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai ASN. Dari masalah yang teridentifikasi. dapat disusun solusi antara lain Meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menambah Alokasi Anggaran untuk meningkatkan Kualifikasi.Kompetensi. Kinerja dan Kedisiplinan Pegawai ASN.

22.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di BKPSDM Kabupaten Dharmasraya menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Dengan memanfaatkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya berhasil mencapai efisiensi sebesar 93% dari anggaran yang diberikan. Hal ini menunjukkan komitmen dan kemampuan manajerial yang kuat dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat guna dan efektif. Dengan demikian, pencapaian kinerja indeks profesionalisme ASN dapat ditingkatkan secara signifikan karena efisiensi dalam penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi..

22.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Penunjang pencapaian indikator ini terdiri dari 2 Program dan 5 Kegiatan melalui Program Sumber Daya Manusia dan Program Kepegawaian Daerah dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan, Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dan Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

SASARAN STRATEGIS 4.1.3 PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

23. PUBLIK SERVICE INDEKS

PUBLIK SERVICE INDEKS

= PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA
=3.860

Indeks Publik Service Indeks merupakan indikator yang penting dalam mengevaluasi kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan seberapa baik pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indeks ini dapat diukur melalui berbagai parameter, seperti ketersediaan layanan, waktu respons, kepuasan pelanggan, dan efisiensi biaya.

Dengan mengamati dan menganalisis Indeks Publik Service Indeks, pemerintah dan lembaga publik dapat mengidentifikasi area-area di mana layanan publik dapat ditingkatkan, serta membuat kebijakan dan program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Indeks Publik Service Indeks merupakan alat penting dalam pengukuran dan peningkatan kualitas layanan publik yang memainkan peran krusial dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

23.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 23.1.1 Capaian Publik Servis Indeks berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Publik Service Indeks	3.12	3.860	123.7	Memuaskan

Sumber Data : Kepmenpan RB No.795/2023 diolah oleh Bagian Organisasi.2023

Dalam tabel 23.1.1. tergambar capaian Publik Service Indeks berdasarkan target tahun 2023. Target yang ditetapkan sebesar 3.12. namun realisasi mencapai 3.860. yang mencerminkan capaian sebesar 123.7%. Capaian ini dikelompokkan dalam kategori "Memuaskan". Capaian yang melebihi target menunjukkan peningkatan kualitas layanan publik yang signifikan pada tahun tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai pencapaian yang positif. yang menunjukkan komitmen pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan capaian yang memuaskan ini. diharapkan dapat terus ditingkatkan agar layanan publik yang berkualitas dapat terus dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

23.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 23.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Publik Service Indeks Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	2.94	2.94	100 %
2022	3.02	3.93	129.7 %
2023	3.12	3.86	123.7%

Sumber Data : Bagian Organisasi. 2023

Dari tabel tersebut. terlihat bahwa target kinerja Publik Service Indeks meningkat dari tahun ke tahun. yaitu dari 2.94 pada tahun 2021. menjadi 3.12 pada tahun 2023. Capaian kinerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 129.7%. Meskipun pada tahun 2023 capaian kinerja sedikit turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. namun masih tetap tinggi. mencapai 123.7%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan. kinerja Publik Service Indeks mengalami peningkatan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

23.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 23.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Publik Service Indeks dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Public Service Indeks	2.85	3.86	3.4	113.53

Sumber Data : Bagian Organisasi. 2023

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Publik Service Indeks pada kondisi awal RPJMD tahun 2020 sebesar 2.85. Namun, pada tahun 2023, realisasi Publik Service Indeks meningkat menjadi 3.86, melebihi target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 3.4. Persentase capaian terhadap target akhir RPJMD mencapai 113.53%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja Publik Service Indeks selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan visi dan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan capaian yang positif ini, diharapkan peningkatan kualitas layanan publik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

23.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan capaian ini karena komitmen pimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Dharmasraya, sehingga seluruh OPD dan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik dibimbing langsung untuk memenuhi kepatuhan standar pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik.

Pemenuhan standar pelayanan public pada perangkat daerah, meningkatkan ekspektasi dan realita yang dirasakan oleh Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah. Penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan public Kabupaten Dharmasraya tahun 2023, mendapatkan nilai 93.77, dan merupakan urutan ke-2 se Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Solok, nilai tersebut adalah hasil penilaian oleh Ombudsman terhadap 6 Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, hasil penilaian terhadap penilaian Ombudsman tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 23.4.1 Rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan public tahun 2023

No	Unit Layanan	Nilai
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.5
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.58
3	Dinas Pendidikan	93.11

4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93.12
5	Puskesmas Sialang	95.10
6	Puskesmas Sungai Rumbai	96.20
TOTAL NILAI DAN AKHIR ZONA		93.77
KATEGORI		A
OPINI		KUALITAS TERTINGGI

Sumber : Dokumen Terbatas OMBUDSMAN RI

23.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2023 capaian kinerja ini telah mencapai 123.7%. menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja yang sangat baik. selain itu. capaian kinerja yang jauh melebihi target yang ditetapkan menunjukkan bahwa program dan kegiatan serta Upaya yang dilakukan telah sangat efektif telah memberikan hasil yang optimal dalam mencapai standar pelayanan publik.

Dari analisis tersebut. dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien. kinerja sangat efektif. dan efisiensi kerja meningkat. Capaian kategori "memuaskan" menegaskan kesuksesan dalam mencapai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Oleh karena itu. penting untuk menjaga dan meningkatkan standar kinerja yang telah dicapai serta terus mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk pencapaian yang lebih baik di masa depan.

23.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 23.6.1 Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Kinerja Public Service Indeks Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi anggaran	%
1	Penataan Organisasi	267.885.00	267.384.89	99.81
a	Pengelolaan Kelembagaan	84.612.00	84.490.40	99.86
.	dan Analisis Jabatan	0	0	
b	Fasilitasi Pelayanan Publik	86.255.00	86.021.60	99.73
.	dan Tata Laksana	0	0	
c	Peningkatan Kinerja dan	97.018.00	96.872.89	99.85
.	Reformasi Birokrasi	0	8	

Dalam mencapai kinerja public index service. anggaran yang dialokasikan sangat minim dan sangat jauh dari yang direncanakan di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. sehingga.

Sekretariat Daerah khususnya bagian organisasi tidak dapat mendapatkan hasil yang maksimal. dari gambaran program dan kegiatan yang telah dijabarkan. disarankan untuk penambahan anggaran untuk peningkatan capaian kinerja ini.

24. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT = Hasil dari Survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terkait kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya
IKM Konversi = IKM Unit Pelayanan x 21
= 84.35

24.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai Indeks Kinerja terkait Kepuasan Masyarakat. Data ini mencerminkan evaluasi kinerja suatu pemerintahan atau organisasi dalam memenuhi harapan dan kebutuhan Masyarakat

Tabel 24.1.1 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Indeks Kepuasan Masyarakat	83.7	84.35	100.77	Memuaskan

Sumber: Hasil pengolahan data primer. IKM Tahun 2023 oleh BAPPERIDA

Tabel di atas menyajikan evaluasi kinerja terkait Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023, target yang telah ditetapkan adalah sebesar 83.7. Namun, realisasi kinerja yang dicapai mencapai angka 84.35, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian yang telah terjadi adalah sebesar 100.77, yang menunjukkan bahwa kinerja dalam memenuhi kepuasan masyarakat jauh melebihi harapan yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang sangat positif ini, prediket yang diberikan adalah "Memuaskan", yang menegaskan bahwa masyarakat memberikan respons yang sangat positif terhadap pelayanan atau kinerja yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi terkait.

Hasil dari evaluasi ini mencerminkan upaya yang kuat dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Tabel 24.1.2 Rekapitulasi Skor IKM Kab. Dharmasraya Tahun 2023

NO	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN	IKM Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	Dinas Pendidikan	85.43	B	Baik
2	DPMPTSP	88.80	A	Sangat Baik

NO	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN	IKM Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
3	Dinas Dukcapil	83.03	B	Baik
4	Dinas Perhubungan	83.23	B	Baik
5	DINSOSP3PKB	88.37	A	Sangat Baik
6	Dinas Pertanian	84.13	B	Baik
7	Dinas Pangan dan Perikanan	80.77	B	Baik
8	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh	79.01	B	Baik
9	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Rumbai	83.43	B	Baik
10	Kantor Camat Koto Baru	85.89	B	Baik
11	Kantor Camat Pulau Punjung	86.41	B	Baik
12	Kantor Camat Sitiung	81.48	B	Baik
13	Kantor Camat Sungai Rumbai	88.56	A	Sangat Baik
14	UPT Puskesmas Sitiung 1	84.21	B	Baik
15	UPT Puskesmas Koto Baru	83.31	B	Baik
16	UPT Puskesmas Sungai Rumbai	86.52	B	Baik
17	UPT Puskesmas Sungai Dareh	89.69	A	Sangat Baik
18	Kantor Wali Nagari Koto Padang	82.12	B	Baik
19	Kantor Wali Nagari Sikabau	88.07	B	Baik
20	Kantor Wali Nagari Sitiung	81.35	B	Baik
21	Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai	83.02	B	Baik
TOTAL		84.35	B	Baik

Sumber: Hasil pengolahan data primer. IKM Tahun 2023 oleh BAPPERIDA

24.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 24.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	80	81	101.25
2022	81	83.70	103.33
2023	83.7	84.35	102.77

Sumber: Hasil pengolahan data primer. IKM Tahun 2023 oleh BAPPERIDA

Pada tahun 2021, target Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 80, namun realisasi kinerja mencapai angka 81, menghasilkan capaian kinerja sebesar 101.25. Di tahun berikutnya, yaitu 2022, target sedikit meningkat menjadi 81, dengan realisasi yang melampaui target, mencapai 83.70, dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 103.33.

Sementara pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 83.7, dan realisasi kinerja mencapai 84.35, dengan capaian kinerja sebesar 102.77. Perlu diperhatikan bahwa capaian kinerja ini, meskipun sedikit di bawah capaian tahun 2022, masih menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, meskipun terdapat fluktuasi dalam capaian kinerja dari tahun ke tahun, trend keseluruhan menunjukkan peningkatan secara bertahap dalam Indeks Kepuasan Masyarakat selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat oleh pemerintah atau organisasi terkait.

24.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 24.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Indeks	Kepuasan	79	84.35	85	100.7
Masyarakat					

Sumber: Hasil pengolahan data primer. IKM Tahun 2023 oleh BAPPERIDA

Pada tahun 2020, IKM awal yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebesar 79. Pada tahun 2023, realisasi IKM telah meningkat menjadi 84.35, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kepuasan masyarakat. Sementara itu, target akhir IKM dalam RPJMD yang ditetapkan untuk tahun 2026 adalah sebesar 85. Dengan demikian, capaian IKM pada tahun 2023 telah mencapai sekitar 100.7% dari target akhir RPJMD.

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja dalam memenuhi kepuasan masyarakat telah sangat baik, mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini menandakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat telah memberikan hasil yang positif. Dengan mempertahankan atau meningkatkan tren ini, diharapkan akan terus tercipta pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

24.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat adalah :

1. Transformasi pelayanan publik menuju SPBE
2. Pemanfaatan media sosial dan media pajang luar sekitar UPP dalam sosialisasi dan diseminasi informasi pelayanan publik
3. Pembentukan Tim Satsus (Satuan Khusus) yang bertugas menjawab dan menjelaskan pengaduan, saran dan masukan yang diberikan dan dipublikasikan kembali di media sosial UPP atau media pajang luar ruang yang ada di UPP sehingga masyarakat tahu bagaimana perkembangan pengaduan, saran dan masukan yang mereka sampaikan ke UPP
4. Kebijakan pengaturan angkutan umum dalam menjangkau UPP
5. Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2019 yang menjadi panduan bagi Bappeda dalam membangun kinerja maupun kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi pedoman publik untuk melakukan pemantauan, evaluasi, serta penilaian.
6. Reviu secara periodik dilakukan untuk mengidentifikasi komponen yang berkinerja rendah dan hasil reviu dimanfaatkan sebagai input perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Penyelenggaraan layanan oleh UPP telah dilengkapi dengan Standar Pelayanan

Hambatan yang mempengaruhi capaian nilai indeks kepuasan Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 :

1. Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelayanan publik, terutama pelayanan publik yang banyak dikunjungi masyarakat seperti Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Dinas PMPTSP dan layanan di Puskesmas
2. Informasi pelayanan publik yang diselenggarakan Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) belum sepenuhnya dipahami masyarakat
3. Kualitas sarana dan prasarana di UPP belum memadai
4. Kualitas SDM UPP publik masih ada yang kurang responsif, kurang kompeten, kurang ramah serta terlalu lambat dalam melakukan pelayanan.
5. Umpan balik atau penanganan pengaduan, saran, masukan Masyarakat penggunaan layanan belum terkelola sebagaimana mestinya
6. Akses lokasi UPP susah dijangkau kendaraan umum

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki kinerja antara lain:

1. Sosialisasi dan diseminasi informasi pelayanan publik dengan memanfaatkan media sosial dan media pajang luar sekitar UPP seperti pemberitahuan informasi layanan melalui web UPP, facebook, dan WA pada layanan RSUD Sei. Dareh
2. Upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana dengan pengadaan sarana parasana, serta optimalisasi pemeliharaan secara berkala.
3. Peningkatan kompetensi pegawai (SDM) UPP secara periodik melalui pendidikan ataupun pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi UPP.
4. Melengkapi seluruh kegiatan UPP dengan Standar Operation Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan
5. Melakukan perbaikan layanan sesuai hasil evaluasi dari hasil capaian IKM tahun sebelumnya

24.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari segi analisis pencapaian kinerja terhadap penggunaan sumber daya manusia terhadap IKM ini, bidang litbang bersinergi melakukan wawancara langsung dengan responden melalui surveyor dari masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Hal ini dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia dan guna efisiensi waktu dalam mengumpulkan data kuisioner dari seluruh responden masing-masing UPP.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Pencapaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya menyoroti efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memanfaatkan penelitian yang mendalam, evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah sumber daya yang tersedia telah dioptimalkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang jelas tentang faktor-faktor yang memengaruhi indeks kepuasan masyarakat, serta rekomendasi untuk perbaikan dalam penggunaan sumber daya yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya-upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya akan menjadi kunci dalam mencapai pencapaian yang lebih baik dalam indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

24.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 84.35 Program yang ditetapkan dalam dokumen

perencanaan adalah Program penelitian dan pengembangan daerah fokus pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan dengan anggaran sebesar 313.509.100. Realisasi anggaran yang dicapai mencapai 280.141.860. atau sebesar 89.36% dari anggaran yang dialokasikan. Ini menunjukkan bahwa tersebut tersebut berhasil menggunakan sebagian besar anggaran yang tersedia.

Tujuan 4.2 Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari

SASARAN STRATEGIS 4.2.1 MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN NAGARI

25. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN SOSIAL

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN SOSIAL
 = NILAI KETAHANAN SOSIAL YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA
 =0.8464

25.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 25.1.1 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Rata-rata	Indeks	0.8354	0.8464	101.32%	Memuaskan
Ketahanan Sosial					

Sumber : KEMENDES DPTT diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2023

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks. yakni **Indeks Ketahanan Sosial. Indeks Ketahanan Ekonomi** dan **Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan**. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial. ekonomi. dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Pada tahun 2023. target untuk indikator kinerja Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial adalah 0.8354. sedangkan untuk realiasinya adalah 0.8464 sehingga capaian untuk indikator ini pada tahun 2023 adalah 101.3% dan masuk dalam kategori sangat berhasil.

Indeks Ketahanan Sosial merupakan salah satu indeks yang membentuk Indeks Desa Membangun. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial. memiliki toleransi. rasa aman penduduk. kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan

(indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Dengan capaian kinerja pada indikator ini dan dua indikator lainnya, nilai IDM kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 adalah 0.7522 sehingga masuk dalam kategori Kabupaten **MAJU**.

25.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 25.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	0.8189	0.8280	101 %
2022	0.8195	0.8474	103 %
2023	0.8354	0.8464	101.32%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2023

Capaian kinerja indikator ini dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik diatas. Pada tahun 2021 target yang ditetapkan adalah 0.8189 dan realisasinya adalah 0.8280 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 101% kemudian naik menjadi 103% pada tahun 2022 dengan target 0.8195 dan realisasi 0.8474. Pada tahun 2023 target kinerjanya adalah 0.8354 dengan realisasi 0.8464 sehingga capaian kinerja menjadi 101.3%.

25.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 25.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Sosial dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Rata-rata	Indeks	0.8108	0.8464	0.8607	98.34
Ketahanan Sosial					

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2023

Target Akhir RPJMD untuk indikator ini adalah 0.8607 sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2023 adalah 0.8464 sehingga capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD adalah 99.25% yang berarti masih ada 0.75% lagi capaian kinerja yang harus dicapai agar target akhir RPJMD bisa dipenuhi. Diharapkan dengan adanya dukungan dari anggaran yang memadai.

kerjasama lintas sector dan kebijakan-kebijakan yang dibuat. capaian dari indikator ini bisa terpenuhi pada masa akhir RPJMD.

25.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah berkat kerjasama sama lintas sector SKPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya. keterlibatan Pendamping Desa (PD) bersama pihak kecamatan. Pendamping Lokal Desa (PLD) beserta perangkat nagari. Selain itu juga karena adanya kebijakan yang dibuat melalui Dinas PMD tentang Penalokasian dan Penyaluran Dana Desa/Nagari.

Masalah yang ditemukan adalah seringnya penggantian operator yang menginput data IDM di nagari sehingga perlu diadakan pelatihan bagi operator-operator yang baru. Kurang baiknya koneksi jaringan internet di beberapa nagari juga menjadi kendala dalam proses penginputan data IDM.

25.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator kinerja Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial adalah 102% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Pagu anggaran untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 70.149.400. dengan realisasi anggaran Rp. 69.459.100. persentase realisasi anggaran pada indikator kinerja ini adalah 99.02%.

25.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Pada Dinas PMD. Indikator ini menjadi tanggungjawab bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan (PKP) dan dibantu bidang Pemerintahan Nagari (PN) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.149.400 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan update data lewat aplikasi IDM yang dilakukan oleh Operator IDM pada Nagari masing-masing yang didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD). kemudian verifikasi inputan pada IDM di tingkat kecamatan yang didampingi oleh Pendamping Desa (PD). kemudian verifikasi data IDM oleh Dinas PMD dan Bappeda yang didampingi oleh Tenaga Ahli Kabupaten

26. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKONOMI

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKONOMI

= NILAI INDEKS KETAHANAN EKONOMI YANG DI KELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA
= 0.7436

26.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 26.1.1 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Rata-Rata	Indeks	0.7127	0.7436	104 %	Memuaskan
Ketahanan Ekonomi					

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2023

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks. yakni **Indeks Ketahanan Sosial**, **Indeks Ketahanan Ekonomi** dan **Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan**. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Pada tahun 2023, target untuk indikator kinerja Rata-rata Indeks Ketahanan Ekonomi adalah 0.7127, sedangkan untuk realisasinya adalah 0.7436 sehingga capaian untuk indikator ini pada tahun 2023 adalah 104% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). Dengan capaian kinerja pada indikator ini dan dua indikator lainnya, nilai IDM kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 adalah 0.7522 sehingga masuk dalam kategori Kabupaten **MAJU**.

26.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 26.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	0.6986	0.7087	101%
2022	0.7056	0.7221	102%
2023	0.7127	0.7436	104%

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2023

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Capaian kinerja ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2021 capaian kinerja adalah 101% kemudian naik menjadi 102% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 104%.

26.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 26.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekonomi dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Rata-Rata	Indeks	0.6917	0.7436	0.7343	101.27
Ketahanan Ekonomi					

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2023

Target Akhir RPJMD untuk indikator ini adalah 0.7343 sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2023 adalah 0.7436 sehingga capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD adalah 101.27% yang berarti target akhir RPJMD sudah tercapai. Diharapkan dengan adanya dukungan dari anggaran yang memadai, kerjasama lintas sector dan kebijakan-kebijakan yang dibuat, capaian dari indikator ini bisa terus naik.

26.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah berkat kerjasama sama lintas sector SKPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya, keterlibatan Pendamping Desa (PD) bersama pihak kecamatan, Pendamping Lokal Desa (PLD) beserta perangkat nagari. Selain itu juga karena adanya kebijakan yang dibuat melalui Dinas PMD tentang Penalokasian dan Penyaluran Dana Desa/Nagari.

Masalah yang ditemukan adalah seringnya penggantian operator yang menginput data IDM di nagari sehingga perlu diadakan pelatihan bagi operator-operator yang baru. Kurang baiknya koneksi jaringan internet di beberapa nagari juga menjadi kendala dalam proses penginputan data IDM

26.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator kinerja Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial adalah 102% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Pagu anggaran untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 70.149.400, dengan realisasi anggaran Rp. 69.459.100, persentase realisasi anggaran pada indikator kinerja ini adalah 99.02%

26.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Pada Dinas PMD, Indikator ini menjadi tanggungjawab bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan (PKP) dan dibantu bidang Pemerintahan Nagari (PN) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.149.400 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan update data lewat aplikasi IDM yang dilakukan oleh Operator

IDM pada Nagari masing-masing yang didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD). kemudian verifikasi inputan pada IDM di tingkat kecamatan yang didampingi oleh Pendamping Desa (PD). kemudian verifikasi data IDM oleh Dinas PMD dan Bappeda yang didampingi oleh Tenaga Ahli Kabupaten.

27. RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKOLOGI / LINGKUNGAN

RATA-RATA INDEKS KETAHANAN EKOLOGI / LINGKUNGAN
 = NILAI INDEKS KETAHANAN EKOLOGI YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTRIAN DESA
 =0.6667

27.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 27.1.1 Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Rata-Rata	Indeks	0.6010	0.6667	111%	Memuaskan
Ketahanan Ekologi / Lingkungan					

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2023

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks. yakni **Indeks Ketahanan Sosial**, **Indeks Ketahanan Ekonomi** dan **Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan**. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Pada tahun 2023, target untuk indikator kinerja Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan adalah 0.6010, sedangkan untuk realisasinya adalah 0.6667 sehingga capaian untuk indikator ini pada tahun 2023 adalah 111% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan terdiri dari terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Dengan capaian kinerja pada indikator ini dan dua indikator lainnya, nilai IDM kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 adalah 0.7522 sehingga masuk dalam kategori Kabupaten **MAJU**

27.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 27.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	0.5891	0.6039	103%
2022	0.5950	0.6282	106%
2023	0.6010	0.6667	111%

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2023

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Capaian kinerja ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. pada tahun 2021 capaian kinerja adalah 101% kemudian naik menjadi 102% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 104%.

27.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 27.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Rata-Rata	Indeks				
Ketahanan Ekologi / Lingkungan		0,5833	0.6667	0.6192	107.67

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2023

Target Akhir RPJMD untuk indikator ini adalah 0.6192 sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2023 adalah 0.6667 sehingga capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD adalah 107.67% yang berarti target akhir RPJMD sudah tercapai. Diharapkan dengan adanya dukungan dari anggaran yang memadai. kerjasama lintas sector dan kebijakan-kebijakan yang dibuat. capaian dari indikator ini bisa terus naik

27.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah berkat kerjasama sama lintas sector SKPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya. keterlibatan Pendamping Desa (PD) bersama pihak kecamatan. Pendamping Lokal Desa (PLD) beserta perangkat nagari. Selain itu juga karena adanya kebijakan yang dibuat melalui Dinas PMD tentang Penalokasian dan Penyaluran Dana Desa/Nagari.

Masalah yang ditemukan adalah seringnya penggantian operator yang menginput data IDM di nagari sehingga perlu diadakan pelatihan bagi operator-operator yang baru. Kurang baiknya koneksi jaringan internet di beberapa nagari juga menjadi kendala dalam proses penginputan data IDM

27.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator kinerja Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial adalah 102% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Pagu anggaran untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 70.149.400. dengan realisasi anggaran Rp. 69.459.100. persentase realisasi anggaran pada indikator kinerja ini adalah 99.02%

27.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Pada Dinas PMD. Indikator ini menjadi tanggungjawab bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan (PKP) dan dibantu bidang Pemerintahan Nagari (PN) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.149.400 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan update data lewat aplikasi IDM yang dilakukan oleh Operator IDM pada Nagari masing-masing yang didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD). kemudian verifikasi inputan pada IDM di tingkat kecamatan yang didampingi oleh Pendamping Desa (PD). kemudian verifikasi data IDM oleh Dinas PMD dan Bappeda yang didampingi oleh Tenaga Ahli Kabupaten.

MISI 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan 5.1 Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)

SASARAN STRATEGIS 5.1.1 OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

28. KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

$$= \frac{\text{Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan (ha)}}{\text{Jumlah sisa ruang yang dapat dimanfaatkan}} * 100\%$$

$$= \frac{20937.29 \text{ Ha}}{270465 \text{ Ha}} * 100\% = 7.74\%$$

28.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Dharmasraya dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah luas rekomendasi perijinan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan dengan jumlah sisa ruang yang dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini. jumlah luas

rekomendasi perijinan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan adalah 20.937.29 hektar. sementara jumlah sisa ruang yang dapat dimanfaatkan adalah 270.465 hektar.

Artinya, kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Dharmasraya saat ini mencapai sekitar 7.74%. Ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi ruang yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut sesuai dengan peruntukan yang direkomendasikan. Evaluasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan rekomendasi dan kebutuhan wilayah tersebut.

Tabel 28.1.1 Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Kesesuaian Ruang	Pemanfaatan	10 %	7.74 %	77.41 %	Baik

Dinas PUPR Dharmasraya. 2023

Capaian kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik. meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah peningkatan sebesar 10%. namun realisasi yang dicapai hanya sebesar 7.74%. Meskipun demikian, capaian sebesar 77.41% masih dinilai baik dalam kategori penilaian. Analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah melakukan upaya yang signifikan dalam meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. meskipun mungkin terdapat beberapa kendala atau hambatan yang menghambat pencapaian target yang diinginkan.

28.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 28.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	5%	6.40%	128%
2022	10 %	7.45 %	74.50 %
2023	10 %	7.74 %	77.41 %

Dinas PUPR Dharmasraya. 2023

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang tetap sebesar 10% selama tiga tahun terakhir. Capaian kinerja pada tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 128%. Namun, pada tahun 2022, capaian kinerja menurun menjadi 74.50%. diikuti dengan peningkatan ke 77.41% pada tahun 2023. Meskipun capaian kinerja pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, masih belum mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi dalam capaian kinerja tersebut dan mengidentifikasi langkah-

langkah perbaikan yang perlu diambil untuk mencapai target yang ditetapkan di masa mendatang.

28.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 28.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020) RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	0	7.74 %	35 %	21.29%

Dinas PUPR Dharmasraya. 2023

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kondisi awal RPJMD pada tahun 2020 memiliki target kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 5%. Namun, pada tahun 2023, realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat menjadi 7.74%, yang masih di bawah target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 35%. Persentase capaian terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 21.29%, menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan signifikan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan pemahaman akan capaian ini, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk mengatasi tantangan dan mencapai target yang ambisius di masa mendatang.

28.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja Sasaran Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator kesesuaian rencana Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dengan melakukan langkah langkah seperti Ketersediaan anggaran yang mendukung.

Rekomendasi tata ruang adalah keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rencana pemanfaatan ruang di suatu lokasi/kawasan untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.rekomendasi penataan ruang merupakan wujud dari upaya pengendalian ruang.

Tujuannya untuk menjamin setiap tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang (yang telah diperdakan) dapat tercapai.setiap kegiatan pelanggaran tata ruang dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, sehingga setiap kegiatan alih fungsi lahan harus dibarengi dengan rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Berdasarkan Permendagri 116 tahun 2007 tentang koordinasi penyelenggaraan ruang. Tugas pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya adalah :

1. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

2. Memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.
3. Hal diatas merupakan dasar dalam setiap penerbitan rekomendasi penataan ruang.

masalah atau kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang adalah :

1. Bangunan yang belum berizin dan tidak mengajukan izin. serta tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
2. Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB

Solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.

28.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. untuk pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 77.41 %. Dalam pencapaian kinerja ini. telah melaksanakan upaya efisiensi penggunaan SDM dan efisiensi anggaran sebesar 2 % dengan pagu Rp.142.540.400.00 - dengan realisasi Rp. 138.992.850 .- atau 98 %.

28.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Untuk mewujudkan indikator sasaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan program penyelenggaraan penataan ruang dengan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya 2011 – 2031 ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kabupaten Dharmasraya yang bersifat umum dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

RTRW juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan ketentuan umum zonasi peruntukan. Penetapan ketentuan umum zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang Perda RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011-2031, sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain.

1. berupa keringanan pajak.
2. pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur).
3. pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
4. Disinsentif dimaksudkan kepada perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
5. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya. Rekomendasi Tata Ruang adalah keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rencana pemanfaatan ruang di suatu lokasi/kawasan untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Rekomendasi penataan ruang merupakan wujud dari upaya pengendalian ruang.

SASARAN STRATEGIS 5.1.2 MENINGKATNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

29. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

$$\begin{aligned} &= (0.376 * \text{INDEKS_KUALITAS_AIR}) + (0.405 * \text{INDEKS_KUALITAS_UDARA}) + (0.219 * \\ &\text{INDEKS_KUALITAS_TUTUPAN_LAHAN}) \\ &= (0.376 * 54) + (0.405 * 83.28) + (0.219 * 43.14) \\ &= (20.304) + (33.7154) + (9.44566) \\ &= 63.48 \end{aligned}$$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pemerintah daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah yang dikelola oleh pemerintah daerah. IKLH ini mencakup berbagai aspek lingkungan hidup, seperti kualitas udara, air, tanah, keberlanjutan sumber daya alam, biodiversitas, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

29.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 29.1.1 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.47	63.48	96.96	Sangat Baik

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya, 2023

Dalam tahun 2023, Kabupaten Dharmasraya berhasil mencapai capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 96.96%, yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Meskipun target yang ditetapkan adalah sebesar 65.47, realisasi IKLH sedikit di bawah target dengan nilai 63.48. Namun, meskipun demikian, capaian kinerja yang sangat baik ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya.

Kinerja ini didukung oleh nilai indeks kualitas air sebesar 54, indeks kualitas udara sebesar 83.28, dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 43.14. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terlihat bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengambil langkah-langkah yang efektif dalam menjaga berbagai aspek lingkungan hidup, seperti kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem di Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, perlu untuk terus melakukan upaya-upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup di masa yang akan datang.

29.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 29.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	64.45	61.12	94.83
2022	64.93	63.23	97.38
2023	65.47	63.48	96.96

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya. 2023

Dalam rentang tiga tahun terakhir, terjadi perkembangan yang menarik dalam capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2021, IKLH memiliki target sebesar 64.45, dengan realisasi sebesar 61.12, mencapai capaian kinerja sebesar 94.83%. Tahun berikutnya, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dengan target 64.93 dan realisasi 63.23, yang menghasilkan capaian kinerja sebesar 97.38%. Namun, pada tahun 2023, meskipun terjadi peningkatan target menjadi 65.47, realisasi sedikit di bawah target dengan nilai 63.48, namun capaian kinerjanya masih cukup tinggi, yakni 96.96%. Secara keseluruhan, terlihat adanya tren peningkatan secara konsisten dalam capaian kinerja IKLH dari tahun ke tahun, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut.

29.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 29.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Indeks	Kualitas Lingkungan Hidup	67.94	63.48	66.55	95.39%

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya. 2023

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 adalah sebesar 63.48, yang menunjukkan peningkatan dari kondisi awal RPJMD pada tahun 2020 sebesar 61.12. Namun, meskipun telah terjadi peningkatan, realisasi tahun 2023 masih sedikit di bawah target akhir masa RPJMD (2026) yang ditetapkan sebesar 66.55. Meskipun demikian, persentase capaian terhadap target akhir RPJMD menunjukkan angka yang cukup positif, mencapai 95.39%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun belum mencapai target akhir, progres dalam mencapai Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup dalam RPJMD menuju tahun 2026 cukup baik. dan perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mendekati atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

29.4 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dengan Nasional. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Tabel 29.4.1 Perbandingan Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

Indikator Kinerja	Kabupaten Dharmasraya	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.48	74.98	72.42

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya. 2023

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki nilai IKLH yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan juga dibandingkan dengan tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya agar dapat mendekati atau bahkan melebihi kinerja Provinsi Sumatera Barat dan tingkat nasional.

29.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Target pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kab. Dharmasraya sesuai dengan target yang diberikan oleh KLHK yang setiap tahunnya meningkat 1 poin. sedangkan kondisi di lapangan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu pencapaian target IKLH tidak tercapai. salah satunya disebabkan oleh Indeks Kualitas Air sungai di kabupaten dharmasraya yang keruh.

Air sungai yang keruh ini disebabkan oleh tingginya curah hujan dan endapan lumpur yang terbawa aliran sungai dari hulu sungai. Sedangkan pencapaian IKLH Kabupaten secara tahunan terus meningkat disebabkan oleh semakin tingginya perhitungan Indeks Kualitas Lahan. disebabkan karena kondisi air sungai.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk perhitungan IKLH dapat ditingkatkan dengan cara pemeriksaan secara berkala dengan cara penyediaan sarana dan prasarana Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup yang menunjang kegiatan tersebut serta ketersediaan dana yang memadai.

29.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan ini dilakukan dengan efisiensi penggunaan dana seefektif mungkin seperti pelaksanaan pemantauan Indeks Kualitas Air Sungai yang hanya dilakukan 2 kali setahun dari target minimal 3 kali setahun. sedangkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara Kab.

Dharmasraya masih mengandalkan dari KLHK yang dilakukan 2 kali setahun karena ketiadaan alat uji dan terbatasnya sumber dana yang tersedia.

29.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Kegiatan penunjang yang dilakukan adalah peningkatan penyuluhan dan peningkatan sarana laboratorium agar dapat dilakukan pemeriksaan kualitas air sungai dan kualitas udara secara berkesinambungan

SASARAN STRATEGIS 5.1.3 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

30. INDEKS RESIKO BENCANA DAERAH

INDEKS RESIKO BENCANA DAERAH
= INDEKS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG MENGAMBARKAN TENTANG TINGKAT RESIKO KEJADIAN BENCANA DI SUATU DAERAH
=130.02

Indeks Resiko Bencana Daerah (IRBD) adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai faktor seperti geografis, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan yang memengaruhi potensi terjadinya bencana serta dampak yang mungkin timbul.

30.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 30.1.1 Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
INDEKS RESIKO BENCANA DAERAH	125	130.02	95.84%	Memuaskan

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmasraya. 2023

Pada indikator kinerja IRBD, target yang telah ditetapkan adalah sebesar 125. Namun, realisasi yang terjadi melebihi target tersebut, mencapai angka 130.02. Meskipun demikian, capaian aktual dari IRBD pada tahun tersebut adalah 95.84%. Berdasarkan capaian tersebut, IRBD tersebut dinilai dalam kategori "Sangat Baik". Meskipun realisasinya melebihi target, capaian aktualnya berada di bawah nilai yang diharapkan, namun tetap dianggap sangat baik dalam konteks evaluasi yang diberikan.

30.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 30.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	135	137.2	98.37%
2022	130	137.69	94.09%
2023	125	130.02	95.84%

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmasraya. 2023

Dalam mengawasi dan mengevaluasi capaian kinerja terkait Indeks Resiko Bencana Daerah (IRBD), kami telah menganalisis data dari tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Data ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara target yang ditetapkan, realisasi yang tercapai, dan capaian kinerja sebenarnya.

Pada tahun 2021, target IRBD yang ditetapkan adalah sebesar 135, namun realisasi yang terjadi melebihi target tersebut, mencapai angka 137.2. Capaian kinerja pada tahun tersebut mencapai 98.37%. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya mitigasi dan manajemen risiko bencana di daerah kita.

Namun demikian, pada tahun 2022, terdapat sedikit penurunan kinerja. Meskipun target yang ditetapkan adalah 130, realisasi yang terjadi adalah 137.69, namun capaian kinerja hanya mencapai 94.09%. Meskipun realisasinya melebihi target, namun terdapat penurunan dalam capaian kinerja, yang memerlukan perhatian khusus untuk identifikasi faktor penyebabnya.

Pada tahun 2023, terdapat penurunan lebih lanjut dalam capaian kinerja IRBD. Meskipun target yang ditetapkan adalah 125, realisasi yang terjadi mencapai 130.02. Namun, capaian kinerja pada tahun tersebut hanya mencapai 95.84%. Meskipun capaian aktual masih di atas target, penurunan dari tahun sebelumnya menandakan adanya tantangan yang harus diatasi untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di daerah kita.

Dari analisis ini, kami dapat direkomendasikan perlunya melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan kinerja, serta menyusun strategi yang lebih efektif dalam menghadapi risiko bencana di masa yang akan datang.

30.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 30.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Daerah dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
INDEKS BENCANA DAERAH	RESIKO	143.2	130.02	110	81.82

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmasraya. 2023

Dalam mengevaluasi kinerja terkait mitigasi risiko bencana, perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi nilai Indeks Resiko Bencana Daerah (IRBD), semakin buruk kinerjanya dalam konteks upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana. Data yang dianalisis mencakup kondisi awal RPJMD tahun 2020, realisasi tahun 2023, serta target akhir masa RPJMD tahun 2026 terkait IRBD.

Pada kondisi awal RPJMD tahun 2020, IRBD memiliki nilai tinggi sebesar 143.2, menandakan tingkat risiko bencana yang signifikan di daerah tersebut. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup besar dalam realisasi IRBD, dengan nilai mencapai 130.02. Meskipun penurunan ini merupakan langkah positif dalam mengurangi risiko bencana, namun persentase capaian terhadap target akhir masa RPJMD tahun 2026 hanya mencapai 81.82%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari analisis ini, dapat direkomendasikan perlunya penguatan upaya mitigasi bencana yang lebih proaktif dan berkelanjutan, serta penyusunan program-program prioritas yang dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana di masa yang akan datang.

30.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Indeks Resiko Bencana Daerah (IRBD) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab keberhasilan adalah upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Jika terdapat peningkatan IRBD, ini bisa disebabkan oleh implementasi strategi mitigasi bencana yang efektif, seperti penyuluhan tentang kesadaran bencana, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana juga dapat berkontribusi pada penurunan IRBD.

Di sisi lain, kegagalan dalam mencapai target IRBD bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi mitigasi bencana, seperti dana, tenaga kerja, dan teknologi. Kurangnya kesadaran dan

partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana juga dapat menjadi faktor yang menghambat. Faktor-faktor lingkungan seperti perubahan iklim juga dapat memperburuk situasi dan membuat pencapaian target IRBD menjadi lebih sulit.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai alternatif solusi telah dilakukan. Misalnya, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program mitigasi bencana, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi. Program penyuluhan dan pelatihan tentang penanganan bencana juga dapat diperluas untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi geografis (SIG) dapat ditingkatkan untuk memperbaiki pemetaan risiko bencana dan memperkuat sistem peringatan dini.

Dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian IRBD serta menerapkan alternatif solusi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya mitigasi bencana dan mengurangi risiko bencana di daerah Kabupaten Dharmasraya

30.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Dharmasraya melibatkan berbagai sumber daya yang dapat berperan dalam proses pencapaian kinerja. Berikut ini beberapa sumber daya yang penting dalam pencapaian penurunan indeks risiko bencana daerah:

1. Keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana sangat penting. Pelatihan kesiapsiagaan, edukasi tentang tindakan mitigasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dapat memainkan peran kunci dalam menurunkan risiko bencana.
2. Alokasi anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan program-program pengurangan risiko bencana seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, dan rehabilitasi pasca-bencana sangat penting. Dana ini dapat berasal dari pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan sumbangan masyarakat.
3. Penggunaan teknologi seperti sistem peringatan dini, pemetaan risiko bencana, dan sistem informasi geografis (SIG) dapat membantu dalam memprediksi, memantau, dan mengurangi dampak bencana. Teknologi juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih tahan bencana, seperti bangunan yang dirancang untuk menahan gempa atau banjir.
4. Kerjasama antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga riset, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting dalam mengurangi risiko bencana. Jaringan ini dapat memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman terkait pengurangan risiko bencana.

5. Kebijakan yang kuat dan peraturan yang diterapkan secara efektif dapat mempromosikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, manajemen lahan, penggunaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur.

Kombinasi yang efektif dari sumber daya-sumber daya ini dapat membantu dalam mencapai penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Dharmasraya, serta meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

30.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Indeks Resiko Bencana Daerah:

1. Langkah-langkah untuk menegakkan peraturan daerah terkait pengurangan risiko bencana bisa mencakup pengawasan terhadap pembangunan yang sesuai dengan standar tahan bencana, pelaksanaan zonasi risiko bencana, dan penegakan aturan terkait penggunaan lahan yang aman dari risiko bencana.
2. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bisa mencakup pembentukan tim pemadam kebakaran, pelatihan untuk masyarakat tentang tindakan pencegahan kebakaran, peningkatan infrastruktur pemadam kebakaran, dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai.
3. Inspeksi berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran seperti hydrant, alat pemadam api, dan alarm kebakaran untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan.
4. Melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
5. Melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan kebakaran, cara menggunakan peralatan pemadam kebakaran, serta mengorganisir komunitas untuk saling membantu dalam situasi kebakaran.
6. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Program ini mencakup upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum di daerah, termasuk pencegahan terhadap tindak kriminal yang dapat menyebabkan kebakaran atau situasi bencana lainnya.
7. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Menyediakan informasi tentang potensi risiko bencana di daerah, tanda-tanda peringatan dini, dan langkah-langkah kesiapsiagaan yang harus diambil oleh masyarakat.

8. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Menyelenggarakan program pencegahan bencana seperti pelatihan evakuasi, simulasi tanggap darurat, dan kampanye kesadaran bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
9. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Memiliki rencana dan tim yang siap untuk melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan cepat dan efisien saat terjadi bencana.

Melalui program-program ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan, dan respon terhadap risiko bencana, serta pengurangan dampak yang ditimbulkan oleh bencana di tingkat daerah Kabupaten/Kota.

MISI 6. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Daerah
Tujuan 6.1 Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya

SASARAN STRATEGIS 6.1.1 MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

31. PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT

$$\text{PERSENTASE PENINGKATAN ZAKAT} = \frac{(\text{Jumlah Zakat Tahun } n - \text{jumlah zakat tahun sebelumnya})}{\text{Jumlah Zakat tahun sebelumnya}} * 100\%$$

$$= \frac{6.878.409.654}{5.227.268.269} * 100\% = 31.59\%$$

31.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 31.1.1 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Persentase	Peningkatan Zakat	15	31.59	210.6 %	Memuaskan

Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 2023

Dalam tahun 2023, terjadi capaian kinerja yang signifikan dalam persentase peningkatan zakat di Dharmasraya, sebagaimana tercermin dalam tabel yang diberikan. Target yang ditetapkan adalah 115%, namun realisasi yang terjadi adalah sebesar 31.59%, yang menunjukkan adanya pencapaian yang sangat tinggi hingga mencapai 210.6%. Capaian ini dikategorikan sebagai "Memuaskan" menurut kriteria yang ditetapkan. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan yang luar biasa dalam partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Kabupaten Dharmasraya.

Terdapat beberapa faktor yang mungkin mendukung pencapaian ini. Pertama, upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua, adanya program-program edukasi dan promosi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga-lembaga terkait, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat.

Meskipun capaian ini sangat memuaskan, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat di masa mendatang. Ini termasuk upaya untuk terus meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan kepercayaan masyarakat, serta memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat untuk manfaat yang maksimal bagi kaum dhuafa dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

31.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 31.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2022	12	12.37	103.5 %
2023	15	31.59	210.6 %

Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 2023

Dari perbandingan tersebut, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam capaian kinerja persentase peningkatan zakat pada tahun 2023 dibandingkan dengan tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, capaian kinerja mencapai 103.5% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2023, capaian kinerja melonjak drastis menjadi 210.6%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 15%.

Tren peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang luar biasa dalam partisipasi masyarakat dalam membayar zakat di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, efektivitas program-program edukasi, dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait seperti Badan Amil Zakat Nasional Dharmasraya.

31.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 31.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Zakat dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja		Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Persentase	Penerima Zakat	2	31.59	2	1579%

Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 2023

Tabel perbandingan capaian kinerja persentase peningkatan zakat dengan target akhir masa RPJMD mengindikasikan adanya perubahan target kinerja dari 2% menjadi 31.6% pada tahun 2023. Perubahan ini dilakukan karena capaian kinerja yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan target awal yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Realisasi peningkatan zakat pada tahun 2023 mencapai 31.6%. sementara target akhir RPJMD yang telah direvisi adalah sebesar 2%. Persentase capaian terhadap target akhir RPJMD menunjukkan angka yang sangat tinggi. yaitu sekitar 1579%. mengindikasikan bahwa realisasi peningkatan zakat jauh melampaui target yang ditetapkan. Perubahan target kinerja ini menunjukkan respons yang tepat dari pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi yang berubah dan menyesuaikan target agar lebih realistis dengan kondisi aktual serta memastikan konsistensi dengan visi dan rencana pembangunan jangka panjang.

31.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator persentase peningkatan zakat pada tahun 2023. serta alternatif solusi yang telah dilakukan. dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penyebab Keberhasilan
 - a. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi kaum dhuafa serta pembangunan sosial ekonomi.
 - b. Efektivitas Program Promosi dan Edukasi:** Program-program promosi dan edukasi yang efektif telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi.
2. Penyebab Kegagalan
 - a. Target Kinerja yang Tidak Realistis. Target kinerja awal yang ditetapkan terlalu rendah. tidak mencerminkan potensi pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat.
 - b. Keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan program promosi dan edukasi tentang zakat serta dalam memastikan efisiensi pengelolaan dana zakat.

3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:**

- a. Dilakukan perubahan target kinerja agar lebih sesuai dengan potensi pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. Hal ini dilakukan untuk mencapai konsistensi antara target yang ditetapkan dengan kondisi aktual serta memotivasi kinerja yang lebih tinggi.
- b. Meningkatkan intensitas dan efektivitas program-program promosi dan edukasi tentang zakat untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat zakat serta meningkatkan partisipasi dalam pembayarannya.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk memperluas cakupan program promosi dan edukasi, serta memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan melakukan perubahan target kinerja yang lebih realistis dan mengoptimalkan program promosi dan edukasi serta pengelolaan dana zakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat dan mencapai pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

31.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk meningkatkan persentase zakat di Kabupaten Dharmasraya, beberapa sumber daya yang dapat berperan penting adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Mereka dapat mengkoordinasikan program-program edukasi dan promosi zakat, serta memfasilitasi kerja sama dengan lembaga-lembaga amil zakat untuk memperluas cakupan program tersebut.
2. Baznas Dharmasraya memiliki peran kunci dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Mereka dapat mengoptimalkan upaya pengumpulan zakat melalui program-program promosi dan edukasi, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dalam agama Islam. Mereka dapat memberikan ceramah, khutbah, dan nasehat kepada jamaah untuk mendorong mereka membayar zakat secara rutin.
4. Media massa, baik cetak maupun online, dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat luas. Liputan, artikel, dan iklan yang mengangkat tema zakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat.

5. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran tentang zakat. Mereka dapat menyelenggarakan program-program pendidikan agama yang mencakup materi tentang zakat, serta mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat dengan membayar zakat secara konsisten.

31.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program dan kegiatan penunjang yang efektif merupakan faktor kunci dalam pencapaian indikator kinerja persentase zakat di Kabupaten Dharmasraya. Berikut adalah analisis beberapa program dan kegiatan yang dapat berkontribusi dalam mencapai target tersebut:

1. Program Edukasi Zakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dalam Islam dan manfaatnya bagi kaum dhuafa serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Melalui seminar, ceramah, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban zakat serta dampak positifnya bagi kesejahteraan sosial.
2. Promosi zakat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, spanduk, brosur, dan kampanye publik lainnya. Tujuan dari promosi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat serta memberikan informasi tentang cara pembayaran zakat yang mudah dan transparan.
3. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Baznas Dharmasraya dan lembaga amil zakat lainnya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat. Melalui sinergi ini, dana zakat dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran, serta digunakan untuk program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
4. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang memungkinkan penghimpunan zakat langsung dari gaji ASN. Langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi ASN dalam membayar zakat, tetapi juga menciptakan budaya dan kesadaran zakat di kalangan pegawai negeri.
5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan program-program zakat untuk memastikan efektivitasnya. Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi guna meningkatkan pencapaian indikator kinerja persentase zakat di masa mendatang.

Dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disebutkan di atas secara terencana dan berkelanjutan, diharapkan persentase zakat di Kabupaten Dharmasraya dapat terus meningkat, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

32. PERSENTASE MDA/TPA/TPSA YANG AKTIF

$$\begin{aligned}\text{Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif} &= \frac{\text{Jumlah MDA/TPA/TPSA yang Aktif}}{\text{Jumlah seluruh MDA/TPA/TPSA}} * 100\% \\ &= \frac{38}{42} * 100\% = 90.48 \%\end{aligned}$$

32.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 32.1.1 Capaian Kinerja Persentase Mda/Tpa/Tpsa Yang Aktif berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	85	90.48	106.4	Memuaskan

Sumber Data : Bagian Kesra. 2023

Berdasarkan tabel 32.1.1 yang menggambarkan capaian kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif berdasarkan target tahun 2023. terdapat beberapa temuan penting. Dari target sebesar 85%. realisasi capaian mencapai 106.4%. yang menunjukkan kategori "Memuaskan". Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah MDA/TPA/TPSA yang aktif melebihi target yang ditetapkan. mencapai 90.4% dari total 42 MDA/TPA/TPSA yang ada. dengan 38 di antaranya aktif.

Capaian yang sangat baik ini menandakan adanya kesuksesan dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dalam kegiatan MDA/TPA/TPSA. Dengan demikian. program-program yang dilaksanakan telah efektif dalam menarik minat dan keterlibatan masyarakat. yang mungkin mencerminkan kualitas implementasi yang baik dan strategi komunikasi yang efektif. Ini adalah indikasi positif untuk keberlanjutan program-program tersebut dan menunjukkan adanya potensi untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat di masa mendatang.

32.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 32.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Persentase Mda/Tpa/Tpsa Yang Aktif Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	77	70	90 %
2022	80	80	100 %
2023	85	90.48	106.4 %

Sumber Data : Bagian Kesra. 2023

Dari tabel tersebut. terlihat bahwa target capaian kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif meningkat dari tahun ke tahun. yaitu dari 77% pada tahun 2021. menjadi 85% pada tahun 2023. Capaian kinerja juga meningkat dari tahun ke tahun. mencapai 106.4% pada tahun 2023.

yang merupakan pencapaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan progres yang positif dalam mobilisasi dan mempertahankan partisipasi masyarakat dalam kegiatan MDA/TPA/TPSA dari tahun ke tahun. Dengan adanya peningkatan ini, program-program tersebut tampaknya berhasil menarik minat dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. yang merupakan indikator kesuksesan dalam implementasi kegiatan tersebut.

32.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 32.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Mda/Tpa/Tpsa Yang Aktif dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	75	90.48	100	90.48%

Sumber Data : Bagian Kesra. 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif dengan target akhir masa RPJMD, ditemukan bahwa kondisi awal RPJMD pada tahun 2020 mencatat persentase sebesar 75%. Namun, pada tahun 2023, realisasi capaian kinerja meningkat signifikan menjadi 90.4%, mendekati target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 100%. Persentase capaian terhadap target akhir RPJMD untuk tahun 2023 mencapai 90.48%, hal ini mencerminkan kesuksesan dalam pelaksanaan program-program serta menunjukkan potensi untuk mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, hal ini memberikan keyakinan bahwa upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan MDA/TPA/TPSA telah berjalan dalam arah yang positif sesuai dengan visi dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

32.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai indikator persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif dapat memberikan wawasan penting dalam mengevaluasi efektivitas program-program tersebut. Beberapa penyebab yang mungkin memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Keberhasilan dalam meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif sering kali tergantung pada sejauh mana masyarakat menyadari pentingnya peran mereka dalam kegiatan tersebut dan seberapa aktif mereka berpartisipasi. Kegagalan dapat terjadi jika kesadaran masyarakat rendah atau jika ada hambatan yang menghalangi partisipasi aktif.

2. Kegagalan juga dapat disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Ini bisa termasuk kurangnya koordinasi antarstakeholder, kurangnya sumber daya yang memadai, atau kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program-program tersebut.
3. Keberhasilan dalam mencapai indikator tersebut juga tergantung pada keterlibatan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Kegagalan bisa terjadi jika tidak ada komitmen yang cukup dari pihak-pihak terkait atau jika tidak ada koordinasi yang baik antara mereka.
4. Faktor-faktor sosial-ekonomi dan budaya juga dapat memengaruhi keberhasilan dalam mencapai persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Misalnya, kondisi ekonomi yang sulit atau perubahan budaya di masyarakat dapat memengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan tersebut.

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan atau dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif antara lain:

1. Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran yang menasar masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya peran mereka dalam MDA/TPA/TPSA dan mendorong partisipasi aktif.
2. Memperbaiki kualitas pelaksanaan program-program yang ada dengan memperbaiki koordinasi, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program tersebut.
3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan dukungan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan MDA/TPA/TPSA.
4. Merancang program-program yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya lokal untuk meningkatkan relevansi dan daya tarik partisipasi masyarakat.

Dengan implementasi solusi-solusi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesuksesan program-program tersebut secara keseluruhan.

32.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif mencerminkan sejauh mana sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis efisiensi ini meliputi:

1. Alokasi Anggaran yang Efektif untuk program-program yang bertujuan meningkatkan persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. Penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan yang direncanakan.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. termasuk personel yang terlibat dalam pelaksanaan program-program terkait MDA/TPA/TPSA. Hal ini mencakup penempatan yang tepat. pelatihan yang diperlukan. dan manajemen kinerja yang efisien.
3. Penggunaan Infrastruktur dan Teknologi yang Tepat dalam mendukung kegiatan MDA/TPA/TPSA. Perlu dipastikan bahwa infrastruktur dan teknologi yang tersedia digunakan secara optimal untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi.
4. Penetapan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk terus memantau kinerja program-program terkait MDA/TPA/TPSA. Dengan melakukan evaluasi secara berkala. dapat diidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

32.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Dalam upaya mencapai kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif. program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat memainkan peran penting dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan masyarakat. Program ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisik. tetapi juga spiritual masyarakat.

Melalui program ini. berbagai kegiatan seperti pelatihan. ceramah. dan kegiatan sosial dilaksanakan dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai agama. Misalnya. pembentukan MDA/TPA/TPSA dilakukan dengan memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan. serta memfasilitasi kegiatan sosial yang menggalang partisipasi masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkaya aspek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar warga. Melalui pendekatan yang holistik. program ini tidak hanya menciptakan kegiatan yang bermanfaat secara spiritual. tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan MDA/TPA/TPSA secara keseluruhan.

Dengan demikian. program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat telah terbukti menjadi salah satu upaya yang efektif dalam mencapai kinerja persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif sambil memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 6.1.2 MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI NILAI AGAMAN. ADAT DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

33. JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA

JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA	=	JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA YANG DITETAPKAN OLEH SURAT KEPUTUSAN BUPATI
	=	2 Nagari

33.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 33.1.1 Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya berdasarkan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
JUMLAH NAGARI BERADAT DAN BERBUDAYA	4	2	50	Kurang Baik

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata. Pemuda dan Olahraga. 2023

Dari data yang Anda berikan, terlihat bahwa target jumlah nagari beradat dan berbudaya di Kabupaten Dharmasraya adalah 4. namun realisasi yang tercapai hanya sebanyak 2 nagari. Capaian ini mencerminkan pencapaian sebesar 50%. yang dikategorikan sebagai "Kurang Baik".

Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami penyebab dari ketidaksesuaian ini dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan jumlah nagari beradat dan berbudaya di Kabupaten Dharmasraya.

33.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir

Tabel 33.2.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	1	-	0 %
2022	3	2	66.66 %
2023	4	2	50 %

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata. Pemuda dan Olahraga. 2023

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa target jumlah nagari beradat dan berbudaya di Kabupaten Dharmasraya bertambah dari tahun ke tahun. Namun, realisasi capaian kinerja

menunjukkan bahwa belum tercapai secara optimal. dengan penurunan capaian dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya di Kabupaten Dharmasraya agar mencapai target yang ditetapkan

33.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 33.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya dengan Target Akhir Masa RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2026)	% Terhadap Akhir RPJMD
Nagari Beradat Dan Berbudaya	-	2	17	11.76%

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata. Pemuda dan Olahraga. 2023

Kondisi awal RPJMD pada tahun 2020 belum ada nagari beradat dan berbudaya yang ditetapkan. penetapan nagari beradat dan berbudaya dilakukan di tahun 2022 dengan penetapan 2 nagari melalui SK Bupati. realisasi jumlah nagari beradat dan berbudaya pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 nagari. sedangkan target akhir RPJMD yang ditetapkan adalah sebanyak 17 nagari. Capaian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan antara realisasi dan target yang ditetapkan.

Persentase capaian terhadap target akhir RPJMD untuk tahun 2023 adalah sebesar 11.76%. Angka ini menggambarkan bahwa capaian yang telah dicapai masih jauh dari target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. menandakan bahwa perlu adanya upaya intensif untuk meningkatkan jumlah nagari beradat dan berbudaya guna mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

Dengan demikian. analisis data menyoroti perlunya strategi yang lebih efektif dan terarah untuk mengatasi kesenjangan antara capaian aktual dan target yang ditetapkan dalam RPJMD. serta menegaskan pentingnya fokus pada upaya pemulihan dan peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

33.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator jumlah nagari beradat dan berbudaya dapat memberikan wawasan penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa mendatang. Beberapa penyebab yang mungkin memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Salah satu penyebab utama kegagalan bisa saja terletak pada keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk pengembangan nagari beradat dan berbudaya. Keterbatasan dana, personel, atau infrastruktur pendukung lainnya dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan upaya revitalisasi atau pemeliharaan terhadap nagari tersebut.
2. Kegagalan juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya memelihara dan melestarikan warisan budaya nagari beradat. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat lokal, upaya untuk meningkatkan jumlah nagari beradat dan berbudaya akan sulit untuk berhasil.
3. Kendala administratif seperti peraturan atau regulasi yang membatasi pembangunan atau pemeliharaan nagari beradat dan berbudaya juga dapat menjadi hambatan. Proses birokrasi yang rumit atau kurangnya koordinasi antara lembaga terkait juga bisa memperlambat progres dalam mencapai target.
4. Faktor-faktor alam atau lingkungan seperti bencana alam atau perubahan iklim juga dapat memengaruhi keberhasilan dalam menjaga dan mempertahankan nagari beradat dan berbudaya.

Untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target jumlah nagari beradat dan berbudaya, beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan atau dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya untuk program revitalisasi dan pemeliharaan nagari beradat dan berbudaya.
2. Melakukan program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara dan melestarikan warisan budaya lokal.
3. Merevisi atau memperbarui regulasi yang menghambat pembangunan atau pemeliharaan nagari beradat dan berbudaya, serta membuat kebijakan yang mendukung pengembangan dan pelestariannya.

Dengan implementasi strategi dan solusi yang tepat, diharapkan kinerja dalam mencapai target jumlah nagari beradat dan berbudaya dapat ditingkatkan secara signifikan.

33.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya merupakan hal yang penting untuk memahami sejauh mana upaya pemeliharaan dan pengembangan nagari berjalan secara optimal. Berikut adalah beberapa poin analisis yang relevan:

1. Efisiensi penggunaan anggaran dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari beradat dan berbudaya perlu dievaluasi.
2. Ketersediaan dan penempatan sumber daya manusia yang tepat dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari harus dievaluasi.

3. Evaluasi terhadap penggunaan teknologi dan metode kerja dalam proyek-proyek pemeliharaan dan pengembangan nagari perlu dilakukan.
4. Analisis terhadap kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). komunitas lokal. atau institusi pendidikan juga penting.
5. Sistem monitoring dan evaluasi perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa progres dalam mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya dapat terukur dengan jelas.

33.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. meskipun memiliki anggaran yang cukup besar. menunjukkan realisasi anggaran yang sedikit di bawah target. mengindikasikan potensi penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Program Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran yang signifikan. namun realisasi anggaran yang lebih rendah menunjukkan adanya perluasan penggunaan sumber daya yang belum optimal.

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. meskipun memiliki anggaran lebih rendah. menunjukkan realisasi anggaran yang mendekati target. menandakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sementara itu. Program Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan realisasi anggaran yang relatif baik. mendekati target yang telah ditetapkan. Kesimpulannya. sementara beberapa program menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk mencapai kinerja jumlah nagari beradat dan berbudaya yang diharapkan.

Evaluasi mendalam terhadap implementasi program dan identifikasi potensi perbaikan akan menjadi kunci untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

URAIAN	TAHUN 2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI			
DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	23.850.981.411.00	23.692.055.865.50	99.33
Pendapatan Retribusi	3.456.738.885.00	2.453.358.248.00	70.97

URAIAN		TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
(1)		(2)	(3)	(4)
Daerah				
Pendapatan	Hasil	4.832.210.107.00	4.832.210.107.00	100.00
Pengelolaan	Kekayaan			
Daerah	yang			
Dipisahkan				
Lain-lain	Pendapatan	78.087.093.333.00	85.016.532.951.15	108.87
Asli Daerah	yang Sah			
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		110.227.023.736.00	115.994.157.171.65	105.23
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak		13.626.961.000.00	16.318.233.003.00	119.75
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		8.398.374.000.00	18.929.251.900.00	225.39
Dana Alokasi Umum (DAU)		489.147.384.000.00	489.147.246.531.00	100.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		186.618.923.907.00	183.418.901.715.00	98.29
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		697.791.642.907.00	707.813.633.149.00	101.44
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus		-	-	
Dana Penyesuaian		63.089.878.000.00	63.086.878.000.00	100.00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-		63.089.878.000.00	63.086.878.000.00	100.00

URAIAN	TAHUN 2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)
Lainnya			
	760.881.520.907.00	770.900.511.149.00	101.32
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	67.546.841.362.00	48.627.484.675.00	71.99
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	67.546.841.362.00	48.627.484.675.00	71.99
Total Pendapatan Transfer	828.428.362.269.00	819.527.995.824.00	98.93
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	3.200.000.000.00	1.991.137.370.00	62.22
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	3.200.000.000.00	1.991.137.370.00	62.22
JUMLAH PENDAPATAN	941.855.386.005.00	937.513.290.365.65	99.54
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	399.766.874.955.00	373.990.257.238.36	93.55
Belanja Barang	285.840.493.202.00	278.076.015.874.40	97.28

URAIAN	TAHUN 2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)
Bunga	-		-
Subsidi	-		-
Hibah	29.122.932.580.00	28.767.442.546.00	98.78
Bantuan Sosial	-		-
Jumlah Belanja Operasi	714.730.300.737.00	680.833.715.658.76	95.26
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	-		-
Belanja Peralatan dan Mesin	41.345.977.665.00	39.031.009.865.00	94.40
Belanja Gedung dan Bangunan	56.200.220.019.00	45.091.507.154.00	80.23
Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan	51.343.724.700.00	50.167.680.309.00	97.71
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.828.479.825.00	2.751.538.825.00	97.28
Belanja Aset Lainnya	698.426.400.00	242.499.170.00	34.72
Jumlah Belanja Modal	152.416.828.609.00	137.284.235.323.00	90.07
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	4.154.380.709.00	3.924.380.709.00	94.46
Jumlah Belanja Tak Terduga	4.154.380.709.00	3.924.380.709.00	94.46
JUMLAH BELANJA	871.301.510.055.00	822.042.331.690.76	94.35
TRANSFER			
TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA			
Bagi Hasil Pajak	2.385.098.880.00	1.107.049.776.00	46.42
Bagi Hasil Retribusi	345.673.150.00	110.265.502.00	31.90
Bagi Hasil Pendapatan	108.235.636.000.00	108.235.636.000.00	100.00

URAIAN	TAHUN 2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)
Lainnya			
JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA	110.966.408.030.00	109.452.951.278.00	98.64
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	982.267.918.085.00	931.495.282.968.76	94.83

Sumber :Laporan Keuangan Dharmasraya tahun 2023

BAB 4. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari Implementasi SAKIP dapat digambarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah.

Laporan Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat terhadap kinerja yang di perjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 memberikan informasi kepada Stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis yang diukur oleh 33 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Indikator Kinerja Utama tidak dapat diukur yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2024.
2. Untuk Pencapaian 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis tersebut telah dialokasikan Anggaran sebesar 982.267.918.085.00.-. dengan realisasi sebesar 931.495.282.968.76.- (94.83%).
3. Kategori keberhasilan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 17 indikator kinerja utama mencapai berhasil dengan kategori memuaskan dengan capaian >100%
 - b. Sebanyak 11 indikator kinerja utama mencapai berhasil dengan kategori sangat baik dengan capaian >86%-100%
 - c. Sebanyak 2 indikator kinerja utama mencapai berhasil dengan kategori baik dengan capaian >56%-85.99%
 - d. Sebanyak 1 indikator kinerja mencapai berhasil dengan kategori kurang baik dengan capaian ≤56%.
4. Sasaran strategis Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang diukur oleh indikator kinerja Peringkat LPPD berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 94.7%. peringkat

LPPD menggunakan perolehan Peringkat Pada Tahun 2021 mengingat hingga saat ini baru penilaian atas LPPD Tahun 2021 yang dirilis oleh Kemendagri.

5. Sasaran strategis terpenuhinya Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat yang diukur oleh indikator kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya dengan capaian kinerja terendah sebesar 50%.

2. Strategi Peningkatan Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran peningkatan kinerja Instansi Pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP, diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program* Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai Stakeholders. Beberapa langkah yang dilakukan untuk pencapaian kinerja dan implementasi SAKIP pada tahun 2024 diantaranya :

1. Membentuk Tim Implementasi SAKIP Kabupaten Dharmasraya yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dengan Bupati Dharmasraya sebagai penganggung jawab dan terdiri dari Bapelitbang pada kelompok kerja perencanaan dan pengukuran kinerja. Bagian Organisasi pada kelompok kerja pelaporan kinerja serta Inspektorat pada kelompok kerja Evaluasi Internal;
2. Melakukan pembenahan terhadap dokumen SAKIP serta berupaya agar terdapat keselarasan diantara dokumen-dokumen yang ada;
3. Melakukan rapat evaluasi bersama Tim Implementasi SAKIP dan SKPD untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah Konkrit yang harus dilaksanakan dalam upaya peningkatan capaian kinerja;
4. Melakukan peningkatan kapasitas Tim Implementasi SAKIP serta SKPD secara berjenjang mulai dari Aparatur Perencana sampai ke tingkat Pimpinan SKPD sebagai pengambil keputusan.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga berupaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP.
2. Menyempurnakan tujuan, sasaran, indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kerangka berpikir logis dengan mempertimbangkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/195 /AA. 05/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

3. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran.
4. Meningkatkan peran Tim Koordinasi Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 untuk mengawal Implementasi SAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
5. Mengefektifkan pengawasan internal oleh Inspektorat.
6. Menyusun Perjanjian Kinerja sampai ke level individu/staf yang dijadikan acuan dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
7. Melakukan penyempurnaan dalam pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah.

Dharmasraya, Maret 2024
BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE, MM

BAB 4. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari Implementasi SAKIP dapat digambarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah.

Laporan Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat terhadap kinerja yang di perjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 memberikan informasi kepada Stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis yang diukur oleh 33 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Indikator Kinerja Utama tidak dapat diukur yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2024.
2. Untuk Pencapaian 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis tersebut telah dialokasikan Anggaran sebesar 982.267.918.085.00.-, dengan realisasi sebesar 931.495.282.968.76.- (94.83%).
3. Kategori keberhasilan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 17 indikator kinerja utama mencapai berhasil dengan kategori memuaskan dengan capaian >100%
 - b. Sebanyak 11 indikator kinerja utama mencapai berhasil dengan kategori sangat baik dengan capaian >86%-100%
 - c. Sebanyak 2 indikator kinerja utama mencapai berhasil dengan kategori baik dengan capaian >56%-85.99%
 - d. Sebanyak 1 indikator kinerja utama mencapai berhasil dengan kategori kurang baik dengan capaian ≤56%.
4. Sasaran strategis Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang diukur oleh indikator kinerja Peringkat LPPD berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 94.7%, peringkat

LPPD menggunakan perolehan Peringkat Pada Tahun 2021 mengingat hingga saat ini baru penilaian atas LPPD Tahun 2021 yang dirilis oleh Kemendagri.

5. Sasaran strategis terpenuhinya Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat yang diukur oleh indikator kinerja Jumlah Nagari Beradat Dan Berbudaya dengan capaian kinerja terendah sebesar 50%.

2. Strategi Peningkatan Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran peningkatan kinerja Instansi Pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP, diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program* Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai Stakeholders. Beberapa langkah yang dilakukan untuk pencapaian kinerja dan implementasi SAKIP pada tahun 2024 diantaranya :

1. Membentuk Tim Implementasi SAKIP Kabupaten Dharmasraya yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dengan Bupati Dharmasraya sebagai penganggung jawab dan terdiri dari Bapelitbang pada kelompok kerja perencanaan dan pengukuran kinerja. Bagian Organisasi pada kelompok kerja pelaporan kinerja serta Inspektorat pada kelompok kerja Evaluasi Internal;
2. Melakukan pembenahan terhadap dokumen SAKIP serta berupaya agar terdapat keselarasan diantara dokumen-dokumen yang ada;
3. Melakukan rapat evaluasi bersama Tim Implementasi SAKIP dan SKPD untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah Konkrit yang harus dilaksanakan dalam upaya peningkatan capaian kinerja;
4. Melakukan peningkatan kapasitas Tim Implementasi SAKIP serta SKPD secara berjenjang mulai dari Aparatur Perencana sampai ke tingkat Pimpinan SKPD sebagai pengambil keputusan.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga berupaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP.
2. Menyempurnakan tujuan, sasaran, indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan jangka menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kerangka berpikir logis dengan mempertimbangkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/195 /AA. 05/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

3. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran.
4. Meningkatkan peran Tim Koordinasi Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 untuk mengawal Implementasi SAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
5. Mengefektifkan pengawasan internal oleh Inspektorat.
6. Menyusun Perjanjian Kinerja sampai ke level individu/staf yang dijadikan acuan dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
7. Melakukan penyempurnaan dalam pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah.

Pulau Punjung, Maret 2024

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE., M.AP

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KABUPATEN DHARMASRAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN
Jabatan : BUPATI DHARMASRAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.



Pulau Punjung, 2023
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, SE

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	60
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	89
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	43.04
		Rasio pemukiman layak huni	Persen	91.45
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	76.37
		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	Persen	0
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71.87
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.56
		Harapan lama sekolah	Tahun	12.51
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89.17
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	44.79
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	3.4
8	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5.49
9	Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	6.02
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3.322
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP
		Hasil evaluasi AKIP	Bobot/ Indeks	BB (70)
		Nilai LPPD	Skor	3.7000
11	Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	Indeks	0
		Indeks SPBE	Indeks	2.41

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	71.7
12	Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	Indeks	3.12
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83.7
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0.8354
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0.7127
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0.601
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	10
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65.47
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	125
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	Persen	15
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	85
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	4

No	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	541.728.322.133
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	113.111.209.113
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	88.252.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	113.676.500
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	34.850.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	101.630.000
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	54.850.179.244
8	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	25.190.000
9	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp.	81.850.000
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	1.529.998.000
11	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.	402.648.000
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	170.000.000
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp.	7.782.350.400
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	1.481.338.000
15	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp.	33.450.000
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	2.621.042.000
17	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	24.265.564.115
18	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	58.200.716.631
19	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	416.323.380
20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	7.514.048.000
21	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	301.444.400
22	Program Kawasan Permukiman	Rp.	3.801.782.500
23	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	157.821.000
24	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp.	6.885.136.710
25	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban	Rp.	476.869.000

	Umum		
26	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	550.110.000
27	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	6.692.579.200
28	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	231.498.900
29	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	550.949.600
30	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp.	41.381.300
31	Program Penanganan Bencana	Rp.	162.302.600
32	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp.	69.077.000
33	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	40.667.200
34	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	119.186.200
35	Program Hubungan Industrial	Rp.	44.267.000
36	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	730.291.000
37	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	61.759.200
38	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp.	85.525.000
39	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	453.000.800
40	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	219.580.400
41	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	216.097.000
42	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	35.026.200
43	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Rp.	72.500.000
44	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp.	92.500.000
45	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	210.088.000
46	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	412.328.200
47	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	128.229.400
48	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	15.993.000
49	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Rp.	51.145.400
50	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Rp.	9.891.800

51	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	16.893.000
52	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	13.285.800
53	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	597.992.000
54	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	91.597.000
55	Program Pencatatan Sipil	Rp.	29.342.000
56	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	43.244.000
57	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp.	34.413.200
58	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	723.834.000
59	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	990.233.200
60	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	185.400.000
61	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp.	2.392.117.000
62	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp.	1.313.485.000
63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp.	536.744.660
64	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp.	1.395.539.600
65	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	74.461.000
66	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Rp.	55.119.000
67	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp.	157.778.000
68	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Rp.	297.472.700
69	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	399.998.000
70	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	143.986.000
71	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	511.300.000
72	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	35.296.000
73	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	460.006.000
74	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	3.027.104.372
75	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	50.007.000
76	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorai	Rp.	169.937.000
77	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	25.056.600
78	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	4.555.562.165

79	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp.	1.541.548.200
80	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp.	76.116.800
81	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.	11.144.472.000
82	Program Pengelolaan Arsip	Rp.	144.891.900
83	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	268.606.700
84	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp.	27.049.000
85	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	45.196.400
86	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	67.962.000
87	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	145.832.000
88	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp.	36.206.000
89	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	2.090.451.650
90	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	3.776.039.100
91	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	859.972.500
92	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	15.200.000
93	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	692.077.500
94	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	27.738.800
95	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	17.150.600
96	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp.	95.109.200
97	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	584.270.000
98	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	10.441.400
99	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	7.013.399.100
100	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp.	783.567.700
101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp.	17.986.078.500
102	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	588.102.200
103	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	556.673.900
104	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	115.958.136.600
105	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	494.329.000
106	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	679.726.600
107	Program Kepegawaian Daerah	Rp.	1.200.899.000

108	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	1.012.724.000
109	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	151.174.100
110	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	712.887.600
111	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp.	690.212.400
112	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1.186.069.600
113	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	2.439.973.480
114	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	34.983.000
115	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	424.000.200

TOTAL

941,855,386,005



Pulau Punjung,

2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, SE